

Interview: Romli Atmasasmita

AKTUAL

Edisi 42 | 17 - 31 Oktober 2015



Tiongkok "Kepret" Jepang

Tiongkok segera kuasai dunia
melalui jaringan jalur kereta api
cepat global.

ISSN 2337-8395



9 772337 839509

WWW.AKTUAL.COM

Rp. 30.000

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya,
disampaikan secara cepat, tepat, benar,
serta makin progresif!



INFO & PEMASARAN

☎ Dedy **081 20 53 8776**
Ranie **081 38 210 44 69**
Rhiza **081 828 0941 009**

✉ marketing@aktual.com
iklan@aktual.com

PENDIRI M Danial Nafis
KOMISARIS Yudi Latif
PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief
SEKRETARIS REDAKSI Tsurayya Zahra
REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi
SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Wahyu Romadhony
REDAKTUR Ferro Maulana, Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)
ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Arbie Marwan
STAF REDAKSI Soemitro, Fadlan Syam Butho, Maulana Khmal Macharani, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Muhammad Fikry Hizbullah, Novrizal Sikumbang, Warnoto (TV), Junaidi (Foto), Munzir (Foto), Dhanu Akbar Muhammad Daeng, Leonina K Lahama, Ludyah Annisah, Muhammad Fikry Hizbullah, Eko Sumaryanto (Foto Komersial)

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi, Nelson Nafis

HEAD IT DIVISION: Yudhi Astira
NETWORK: Tri Wahyudi (Hd), Rendra
SMC: Imelda, Taufik, Iqbal Maulana, Muhamad Farisi

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu (Meksiko)
REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Najamuddin Arfah (Makasar), Damai Oktavianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), A, Bobby Andalan (Denpasar), Andri Wawan MS Husen (Palu), Vina Fatma Sari (Bandung)

DIREKTUR OPERASIONAL Rinrin Sukmariana
MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah
STAF KEUANGAN Zulkarnain, Vinka H P
HRD & KESEKRETARIATAN Nuryana
HUBUNGAN INTERNASIONAL Fahad Thalib
SIRKULASI Widhi Maulana, Bayu Aji, N. Subihantoro
MARKETING OFFICER Dedy Kusnaedi, Rhiza Aditya, Ranie Anggoro

ALAMAT REDAKSI
 Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos: 12810
 Telp. 021 83794508 (Hunting)
 Fax. 021 83794706

redaksi@aktual.com
 iklan@aktual.com

aktual.com
 TERHANGAT TERPERCAYA

aktual
 MEDIA

Membaca Sisi Lain Kereta Api Cepat

Ada banyak peristiwa ekonomi dan politik penting terjadi pada bulan ini. Salah satunya adalah kalahnya Jepang di proyek kereta api cepat.

Jepang menganggap, pemerintahan Jokowi tidak punya etika atas penunjukan Tiongkok sebagai pemenangnya. Hal itu bisa dibenarkan jika dilihat dari upaya Jepang yang sudah tahunan mengincar proyek ini.

Namun, catatan lain yang dituangkan dalam Laporan Utama kali ini bercerita lain. Bahwa ada kesepakatan global antara Tiongkok dan AS (plus sekutunya) untuk berbagi proyek global untuk sama-sama menyelamatkan kepentingan geoekonomi dan geopolitik globalnya.

Akibatnya, ketika kesepakatan bagi-bagi proyek global itu terjadi maka itu membuat keributan politik dan ekonomi di Indonesia.

Proyek-proyek yang dulu banyak dijanjikan Jokowi ke Tiongkok kini harus dibagi ke AS dan sekutunya seperti Eropa dan termasuk Jepang juga.

Apalagi ketika Pemerintah Tiongkok menjadikan tersangka Sam Pa, orang penting di Sonangol yang melakukan beberapa kerjasama penting dengan Indonesia di sektor migas dan

properti. Ini jelas memporandakan beberapa skenario ekonomi dan politik Partai Nasdem. Itu belum lagi soal kasus Bansos yang menjadikan tersangka Sekjen Nasdem itu. Itu yang muncul dipermukaan, ada banyak catatan sebenarnya yang bisa jadi potret.

Aktual juga memotret soal revisi UU KPK. Meski pembahasan soal ini akhirnya ditunda sampai 2016 nanti, Aktual tetap memberi catatan penting. Prof Romli Atmasasmita kali ini memebri catatan penting agar KPK tetap independen dan tidak lagi jadi boneka kepentingan politik.

Aktual juga menyajikan hasil riset terbaru soal air. Seorang peneliti dari Jepang menemukan bahwa air ternyata bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. Peneliti itu menemukan, struktur molekul air akan berubah sangat indah ketika lagu Mozart didekatkan. Strukturnya akan berubah tak beraturan jika air didekatkan ke alunan musik heavy metal.

Ya, ini membuktikan bahwa air ternyata juga makhluk. Ya makhluk seperti kita, manusia yang bisa bereaksi terhadap sekelilingnya. Selamat membaca...o



Laporan Utama

26 Ketika Tiongkok Jadi Raja di Industri Kereta Api Cepat Global

Lewat rel kereta api cepat, Tiongkok ingin menghubungkan sekitar 40 negara di Asia, Afrika, Timur Tengah dan Eropa berdasarkan rute ekonomi jalur sutera kuno yang sudah dibuat leluhurnya.



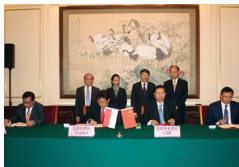
30 Proyek Kereta Cepat Bukan Sasaran Strategis Jepang

Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Ketua Bappenas Sofyan Djailil bahwa kepentingan Jepang di Indonesia lebih dari sekadar kereta, tersirat Jepang sedang menyoar sektor energi dan migas.



34 Kereta (Setengah) Cepat

Jika 'Tidak memakai APBN' menjadi kata kunci pemerintah dalam penentuan pemenang proyek tersebut, maka jelaskan pemerintah berada di pihak Tiongkok ketimbang Jepang.



20 POLITIK

Sinar Surya dari Gondangdia Hingga Medan

Disebutnya nama Surya Paloh oleh sejumlah tersangka membuat KPK terus mendalami keterlibatan bos Media Group tersebut.

36 WAWANCARA

RUU KPK: Enam Catatan Romli Atmasasmita

Penggagas UU KPK, Prof Romli Atmasasmita setuju dengan enam fraksi di DPR. Tetapi pakar hukum pidana dari Universitas Padjajaran ini memberi catatan khusus bahwa KPK jangan diperlemah. Aktual merangkum enam catatan penting dari Prof Romli soal itu



38 HUKUM

Akhirnya, Revisi UU KPK Ditunda

Jokowi dan pimpinan DPR sepakat untuk menunda pembahasan revisi UU KPK. Alasan penundaan itu, lantaran kedua belah pihak sepakat untuk melihat kondisi ekonomi.

46 EKONOMI

Mengaku Rugi, Ada Apa dengan Pertamina?

"Pertamina di awal-awal tahun merugi sekitar Januari-Februari. Kebijakan harga ini kan sudah sejak sekitar 6 bulan lalu. Jadi ya kemana uangnya," kata Muhammad Husen, Mantan Pj Direktur Utama Pertamina.

50 INTERNASIONAL

Strategi Putin dalam Intervensi Militer di Suriah

Intervensi langsung oleh militer Rusia di Suriah memberi komplikasi baru bagi upaya penyelesaian perang di Suriah. Banyak perkiraan terlontar tentang apa sebenarnya tujuan Rusia, dan bagaimana ia akan mencapai tujuan itu dengan langkah militernya tersebut.

54 LIFE

Air Unsur Paling Cerdas di Alam Semesta

dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr Masaru Emoto, peneliti dari Jepang, menunjukkan bahwa struktur molekul air sangat dipengaruhi oleh berbagai kejadian non fisik seperti kekuatan pikiran, kata-kata, dan niat seseorang.

Lengkapi kebutuhan informasi terkini dengan mengunduh Portal berita Aktual di smartphone Android Anda. Berita tersaji selama 24 jam dalam 7 hari seminggu dengan standar jurnalisme berkualitas yang meliputi berbagai peristiwa nasional maupun internasional.

3	Tatap Redaksi	18	Kilas Nasional	48	Kilas Ekonomi
5	Terkini	24	Kilas Politik	56	Life
8	Kaki Hari	42	Kilas Hukum	58	Oase



Pemerintah dan DPR Sepakati Tunda Pembahasan RUU KPK

Rapat konsultasi pemerintah dan pemimpin DPR di Istana Merdeka Jakarta Selasa memutuskan menunda pembahasan revisi UU tentang KPK hingga masa persidangan DPR berikutnya karena pemerintah masih fokus pada upaya pemulihan ekonomi.

“Kita sepakat revisi UU tentang Pemberantasan Korupsi akan dibahas pada masa sidang berikutnya,” kata Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan usai rapat konsultasi pemerintah-pemimpin DPR di Jakarta, Selasa (13/10).

Luhut menyebutkan pemerintah harus melihat atau memastikan bahwa pemulihan ekonomi harus jalan dulu.

“Akan diprioritaskan pembahasan RAPBN 2016. Saya kira teman-teman di DPR paham dengan posisi pemerintah,” kata Luhut dalam konferensi pers usai rapat itu.

Selain Luhut, tampak hadir dalam konferensi pers itu Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Mensesneg Pratikno, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Sementara dari pihak DPR tampak hadir Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Sementara itu Setya Novanto mengatakan pembahasan RAPBN 2016 harus diselesaikan 28 Oktober 2015 dan setelah itu DPR memasuki masa reses.

“Penyempurnaan UU tentang KPK direncanakan setelah semua bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” kata Setya Novanto. /Nebby-Ant

Soal Kebakaran Hutan, “Ada Upaya Asing Kuasai Sawit Nasional”

Praktisi bisnis Tanah Air Ahmad Rizal mengatakan berbagai pihak harus memandang lebih jauh terkait kebakaran hutan yang terjadi saat ini, karena bisa jadi ada upaya asing untuk mengambil alih industri sawit nasional melalui perantara.

“Saya justru curiga ada permainan apa, mengapa Singapura mau menuntut Indonesia secara legal internasional?. Sementara seperti diketahui sebagian besar perusahaan yang bergerak di kehutanan adalah milik nasional,” kata Rizal di Palembang, Senin (5/10), ketika diminta tanggapan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai seseorang yang sudah lama berkecimpung di organisasi bisnis dan profesi, ia mengatakan, Indonesia sebagai negara yang saat ini menjadi sorotan dunia terkait bencana kabut asap harus mengambil sikap yang tepat dan tidak perlu emosi, seperti menutup sejumlah perusahaan.

Menurut hakim Badan Arbitrase Nasional ini, setiap perusahaan seperti bubur kertas dan Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam kategori “besar” telah memiliki rencana perusahaan untuk jangka panjang, yakni minimal 20-30 tahun terkait pasokan bahan baku sehingga dipastikan akan



menjaga kesuburan tanah.

“Aneh rasanya jika perusahaan dituduh membakar hutan, karena itu justru merugikan buat mereka. Apalagi, perusahaan ini sudah diawasi oleh badan lingkungan dunia, seperti The Forest Trust, Rainforest Alliance, dan Greenpeace, yang jika melanggar aturan terkait lingkungan maka produknya tidak ada diterima,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Sumatera Selatan ini.

Ada kemungkinan, ia melanjutkan, kebakaran lahan ini disengaja oleh oknum tertentu untuk merusak citra perusahaan sawit nasional dengan memeralat warga.

Oleh karena itu, anggota dewan penasihat Apindo Sumsel ini mengharapkan, pemerintah mawas diri karena ada kemungkinan pihak yang ingin mengambil industri sawit nasional melalui tangan lain. Pola lainnya dapat juga berupaya membuat industri sawit Indonesia mati, lalu ketika dibeli investor asing menjadi sangat murah.

Menurutnya, hal ini cukup masuk akal, karena Indonesia merupakan negara yang berada di equator (garis khatulistiwa) dengan dua musim, sementara di belahan dunia lain ada negara yang dihadapkan empat musim.

Sumber Daya Alam Indonesia demikian berlimpah, asalkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan maka pada 20 tahun ke depan bakal menjadi sorotan dunia, karena menjadi negara pemberi makan dunia (energi dan pangan).

“Sekarang pertanyaannya, negara yang tidak tinggal di equator, bagaimana cara mereka untuk bisa eksis?. Jika tidak memiliki kantong energi sendiri, maka dipastikan mereka menjadi negara minus dan sangat tergantung dengan negara lain,” kata Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sumsel ini.

Untuk itu, jika berpandang lebih jauh, maka sudah sepatutnya Indonesia mewaspadai intrik-intrik yang mungkin digulirkan melalui isu lingkungan. /Arbie Marwan-Ant

Bioenergi: Solusi Menuju Ketahanan dan Kemandirian Energi

Saat ini isu energi telah menjadi isu global dikarenakan peranan energi yang sangat penting sebagai roda penggerak perekonomian dunia. Hal tersebut juga menjadi perhatian utama di Indonesia dimana 94% dari total penyediaan energi nasional masih dipenuhi oleh energi fosil yaitu minyak bumi dengan persentase sebesar 41%, batubara sebesar 29% dan gas bumi sebesar 24%. Peranan Energi Terbarukan saat ini masih minim baru sebesar 6% dari bauran energi nasional sedangkan potensi yang dimiliki cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Indonesia menyikapi isu tersebut dengan penetapan Kebijakan Energi Nasional yaitu Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014, dengan prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, menggunakan batubara sebagai

andalan pasokan energi nasional dan meminimalkan penggunaan minyak bumi. Di sini terlihat dari upaya tersebut bahwa ketergantungan energi fosil yang masih tinggi terus dikurangi sedangkan potensi Energi Terbarukan terus ditingkatkan tiap tahunnya.

Pada tahun 2025, Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan (EBT) dan penerapan konservasi energi akan menjadi pilihan layak yang kita punyai guna memperkuat ketahanan dan kemandirian energi saat ini dan di masa datang. Target kontribusi Energi Baru Terbarukan pada waktu itu ditargetkan sebesar 23% terhadap bauran energi nasional dengan tingkat efisiensi mencapai 11%.

Hal tersebut juga diterapkan dalam penyusunan program roadmap penyediaan tenaga listrik 2015 – 2019, Pemerintah menargetkan akan mendapatkan tambahan tenaga listrik sebesar 35.000 MW dimana peranan EBT sebesar 16% dari total tambahan tenaga listrik tersebut atau setara 5.687 MW. Bioenergi sebagai salah

satu jenis EBT diharapkan turut menyokong peningkatan penyediaan tenaga listrik sebesar 1.155MW.

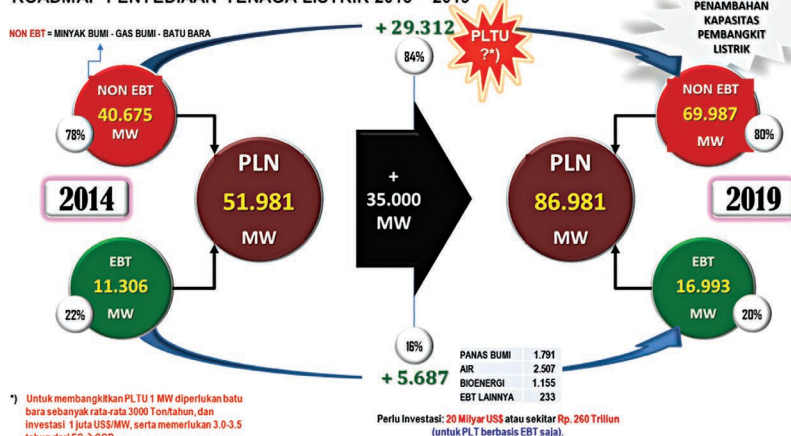
Bioenergi memiliki kelebihan yang dapat menjadi solusi penyediaan tenaga listrik karena dapat berfungsi sebagai *base load* dan juga *load follower*. Selain itu PLT Bioenergi sangat ramah lingkungan karena dapat memanfaatkan limbah industri pertanian maupun perkebunan termasuk dengan limbah sampah perkotaan yang bermanfaat untuk penyediaan listrik sekaligus peningkatan kebersihan lingkungan.

Berdasarkan data hasil survei Kementerian ESDM pada tahun 2011 dan 2012, potensi bioenergi untuk pembangkit listrik setara dengan 32 GW yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu limbah yang saat ini sedang digiatkan oleh Kementerian ESDM adalah limbah cair pabrik kelapa sawit atau dikenal dengan *Palm Oil Mill Effluent* (POME). Total potensi listrik yang dapat dikembangkan dari POME sebesar 797 MW dari total sekitar 689 Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Pemanfaatan POME untuk energi juga dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 23,3 juta ton CO₂e.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana pada berbagai kesempatan mengatakan bahwa perkembangan pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) untuk penyediaan tenaga listrik biogas, sudah terbilang cukup bagus dan sangat memungkinkan untuk digunakan karena mempunyai prospek yang baik untuk pemanfaatan limbah menjadi energi dan sekaligus ramah lingkungan.

“Perkembangan POME untuk penyediaan tenaga listrik sudah

ROADMAP PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 2015 – 2019





Pemerintah juga memberikan insentif tambahan berupa *Insentif Load Follower* (ILF). Pertama, Pemberian insentif terhadap PLTBm dan PLTBg yang digunakan mengikuti kebutuhan beban pada sistem ketenagalistrikan setempat (*Load Follower*). Kedua, ILF untuk PLTBm sebesar Rp80/kWh dan PLTBg sebesar Rp70/kWh terinterkoneksi pada tegangan menengah. Ketiga, ILF untuk PLTBm sebesar Rp100/kWh dan PLTBg sebesar Rp90/kWh terinterkoneksi pada tegangan rendah.

Kesimpulan

Ke depannya untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi, Pemerintah khususnya Kementerian ESDM akan terus mendorong penyediaan tenaga listrik berbasis EBT termasuk bioenergi, dengan memberikan insentif baik berupa insentif fiskal maupun kemudahan pengurusan perizinan pembangkit listrik, agar target penggunaan EBT pada tahun 2025 dapat sesuai dengan yang ditargetkan sebagaimana telah ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional.

bagus. Kita juga sudah sediakan harga yang menarik. Sekarang sudah banyak investor yang mendaftar ke kita,” kata Rida saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Saat ini, lanjutnya, DJ EBTKE tengah mengupayakan langkah untuk memprioritaskan pembangunan jaringan listrik yang bisa menjemput ke masing-masing POME. Untuk nilai investasi, penggunaan POME untuk listrik berbasis biogas ini juga energi terbarukan yang pro lingkungan dan tidak akan habis.

“Tergolong murah. Terlebih ini juga kalau untuk POME-nya sendiri kan gak mahal, dengan investasi sekitar USD2 -3 juta sudah bisa membangun 1 Mega Watt (MW) dengan *payback periode* sekitar 3-55 tahun,” jelasnya.

Capaian Program PLT Bioenergi

Guna mendorong peran swasta dalam mengembangkan PLT Bioenergi, Kementerian ESDM telah menetapkan regulasi yang mengatur harga jual listrik (*Feed in Tarif/ FiT*) dari pembangkit bioenergi yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2013 (berbasis sampah kota) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2014 (berbasis biomassa dan biogas). Untuk menarik lebih banyak investor, saat ini kedua Peraturan Menteri tersebut sedang dikaji untuk direvisi. Capaian

program PLT Bioenergi yang masuk ke jaringan PPT. PLN (Persero) atau *on grid* sampai dengan tahun 2014 sebesar 92,4 MW, dimana: PLT berbasis sampah kota sebesar 14,5 MW, PLT berbasis POME sebesar 1 MW, PLT berbasis limbah kelapa sawit lainnya sebesar 76,9 MW. Untuk tahun 2015, Direktorat Jenderal EBTKE telah memberikan penetapan pengembang PLT Bioenergi berbasis biomassa dan biogas sebesar 63,33 MW.

Selain insentif harga jual listrik,

FEED IN TARIFF PLT BIOGAS, BIOMASSA, DAN SAMPAH KOTA

No	Energi	Kapasitas	Tarif Listrik	Catatan
Tegangan Menengah				
1	Biomass *)	s.d 10 MW	Rp. 1.150,- / kWh X F	
2	Biogas *)	s.d 10 MW	Rp. 1.050,- / kWh X F	Non PLTSa
3	Sampah Kota **)	s.d 10 MW	Rp. 1.450,- kWh	<i>Zero waste</i>
4	Sampah Kota **)	s.d 10 MW	Rp. 1.250,- / kWh	<i>Landfill</i>
Tegangan Rendah				
1	Biomass *)	s.d 10 MW	Rp. 1.500,- / kWh	
2	Biogas *)	s.d 10 MW	Rp. 1.400,- / kWh	Non PLTSa
3	Sampah Kota **)	s.d 10 MW	Rp. 1.798,- / kWh	<i>Zero waste</i>
4	Sampah Kota **)	s.d 10 MW	Rp. 1.598,- / kWh	<i>Landfill</i>

Keterangan:

*) sesuai Permen ESDM No.27 Tahun 2014

F adalah faktor insentif berdasarkan wilayah instalasi pembangkit

Pulau Jawa : F = 1 Pulau Sumatera : F = 1,15

Pulau Sulawesi : F = 1,25 Pulau Kalimantan : F = 1,3

Bali, Bangka Belitung, Lombok : F = 1,5 Kep. Riau, Papua dan pulau lainnya : F = 1,6

***) sesuai Permen ESDM No.19 Tahun 2013



Kemerdekaan sebagai Emansipasi Berbasis Keilmuan

Apa yang diperjuangkan oleh pergerakan kaum muda sebelum kemerdekaan ini adalah kemerdekaan bangsa. Dalam alam pemikiran keindonesiaan, kemerdekaan pun mengandung prasyarat (modal) pengetahuan. Kata 'merdeka' sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Kawi/ Sanskerta 'maharddhika', yang berarti "rahib/ biku" atau "keramat, sangat bijaksana/berilmu (alim). Dalam bahasa Jawa kuno (Kawi), kata ini sering dinisbahkan kepada para "pandita" atau biku Budha, yang karena keluhuran ilmu dan kebijaksananya menduduki stratifikasi sosial yang tinggi. Ditinjau dari sudut ini, perjuangan kemerdekaan merefleksikan cita-cita emansipatoris untuk membebaskan diri dari pelbagai bentuk ketidakadilan dalam distribusi kehormatan dan pemilikan dengan memperkuat modal pengetahuan/ kebijaksanaan.

Demokrasi sebagai Kedaulatan Rakyat Berbasis Rasionalitas Ilmu/ Kebijaksanaan

Dengan kesadaran penuh akan kemuliaan pengetahuan/ kebijaksanaan itu pula gagasan kedaulatan rakyat hendak dibumikan. Demokrasi yang diidealisasikan oleh para pendiri bangsa tidaklah disandarkan pada legitimasi statistik suara mayoritas, melainkan pada daya-daya deliberatif (permusyawaratan) dengan mengandalkan kekuatan rasionalitas-keilmuan dan kebijaksanaan.

Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan" mengandung beberapa ciri dari alam pemikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok pikiran ketiga dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa kedaulatan itu berdasar atas "kerakyatan" dan "permusyawaratan".

Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri: (1) kerakyatan (daulat rakyat); dan (2) permusyawaratan (kekeluargaan).

Cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik; dengan memberi jalan bagi peranan dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya "kesederajatan/persamaan dalam perbedaan".

Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri "hikmat-kebijaksanaan". Cita hikmat-kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Orientasi etis ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang

positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh “mayorokrasi” dan “minorokrasi”.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Kelima, bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Keluasan makna dari prasyarat “hikmat kebijaksanaan” dalam demokrasi menurut alam Pancasila memperoleh kejelasannya menyusul pertukaran pikiran antara Mohammad Natsir dan Roeslan Abdoelgani dari PNI dalam sidang Konstituante pada 1956.

Dalam pandangan Natsir, kelemahan Pancasila justru terletak pada kehendaknya untuk sekadar menjadi “titik-pertemuan” dari berbagai paham ideologi. Dengan demikian, menurutnya, “Memang *raison d’etre*-nya Pancasila, alasan untuk adanya Pancasila itu sendiri, adalah mau netral. Pancasila mau berdiri netral, di atas semua ideologi yang ada.” Karena tendensi netralitasnya, “Pancasila akan tetap tak mau menanggalkan netralitasnya, tak mau menerima salah satu substansi yang positif. Lantaran itu ia tetap mau berdiri sendiri sebagai ‘pure concept’. Sebagai ‘pure concept’ yang berdiri sendiri ia tak merupakan satu realitas di dalam positif.” Lebih lanjut ia katakan, tanpa bersedia mengambil suatu pilihan positif,

toleransi yang dikembangkan hanyalah suatu toleransi negatif, yang berpretensi untuk sekadar berkompromi demi mengakomodasi segala aspirasi, namun tidak berusaha untuk mencapai yang terbaik. “Toleransi tanpa konfrontasi sesungguhnya bukanlah toleransi yang kita maksud, karena itu hanya berarti mengelakkan persoalan.... Yang kita perlukan ialah konfrontasi dalam suasana toleransi sehingga dari pembenturan antara ide-ide dan pemikiran yang kita ajukan masing-masing kita sampai kepada kebenaran.”

Menghadapi kritik seperti itu, Roeslan Abdoelgani menyatakan bahwa toleransi yang dikehendaki Pancasila adalah suatu kompromi dalam konteks toleransi yang positif karena senantiasa dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Selengkapnya ia katakan:

Saya tahu, bahwa ada pihak-pihak yang tidak suka mendengar kata kompromi. Secara absolut kompromi diartikan sebagai akibat kelemahan. Padahal seringkali kompromi lahir bukan karena kelemahan, melainkan justru karena kekuatan keyakinannya yang dalam menghadapi realitas menggunakan toleransi yang positif (*positive verdraagzaamheid*) atau hikmat kebijaksanaan untuk berkompromi. Berkompromi untuk tujuan yang lebih tinggi; berkompromi tidak dalam arti ‘*cease-fire*’ tapi dalam arti hidup berdampingan secara damai dan ber-*synthese*...”

Demokrasi permusyawaratan meletakkan keutamaan diskusi dengan kekuatan argumentasi berlandaskan daya-daya konsensus (hikmat-kebijaksanaan), di atas keputusan yang berdasarkan voting. Dalam demokrasi permusyawaratan yang menjunjung tinggi nalar pengetahuan dan kebijaksanaan, sesengit apa pun konfrontasi gagasan yang berkembang, selalu tersedia mekanisme penyelesaian konflik secara damai; selalu terbuka peluang untuk menghasilkan sintesis yang lebih bermutu. ‘Konflik yang bersifat

intelektual’, kata Randall Collins, ‘selalu dibatasi oleh fokus perhatian pada topik-topik tertentu, serta oleh usaha untuk mencari sekutu... Konflik merupakan sumber energi dari kehidupan intelektual, dan konflik intelektual dibatasi oleh dirinya sendiri’ (Collins 1998: 1).

Gelombang Surut Keilmuan sebagai Gelombang Surut Indonesia

Ketika kekuatan argumentasi (hikmat-kebijaksanaan) berhenti, yang akan berlangsung adalah dua kemungkinan yang destruktif. Pertama, toleransi negatif yang mengarah pada politik dagang sapi untuk kepentingan jangka pendek. Kedua, ‘kekuatan logika’ akan digantikan ‘logika kekuatan’ yang menutup proyek demokrasi dengan konflik-anarkisme di jalanan.

Pada titik inilah, titik genting perkembangan demokrasi di Indonesia. Bahwa gelombang pasang kebebasan demokratis di Indonesia beriringan dengan gelombang surut modal pengetahuan. Tingkat keberaksaraan dan keluasan erudisi manusia Indonesia saat ini mendapatkan ancaman dari berbagai penjuru. Ancaman pertama dari konsepsi utilitarian lembaga-lembaga pendidikan (Godzich, 1994). Fenomena ini melahirkan apa yang disebut Frank Furedi (2006) sebagai “the cult of philistinism”, pemujaan terhadap budaya kedangkalan oleh perhatian yang berlebihan terhadap interes-teres material dan praktis. Universitas dan lembaga pendidikan lainnya sebagai benteng kedalaman ilmu mengalami proses peluluhan kegairahan intelektual, tergerus oleh dominasi etos manajerialisme dan instrumentalisme; suatu etos yang menghargai seni, budaya dan pendidikan sejauh yang menyediakan instrumen untuk melayani tujuan-tujuan praktis. Orang-orang yang mengobarkan kegairahan dalam kedalaman intelektual berisiko dicap sebagai “elitist”, ‘tak membumi’, dan ‘marginal’. Kedalaman ilmu dan wawasan kemanusiaan dihindari, kedangkalan dirayakan.

Ancaman kedua, berupa terpaan luas dan intens dari multimedia, khususnya televisi. Selain biasanya terhadap kelisanan, kemaharajalelaannya di tanah air, saat tradisi literasi rapuh dan kesasteraan dimarjinalkan, memberi penguatan terhadap budaya kedangkalan seraya melemahkan fungsi-fungsi keberaksaraan.

Tekanan pada utilitarianisme dalam kelemahan tradisi literasi dan erudisi memberi ketimpangan pada kehidupan publik. Seperti diungkapkan oleh Habermas (1983), kehidupan dan ruang publik yang sehat memerlukan interaksi yang sepadan dari tiga pendekatan, yang meliputi dimensi kognitif-saintifik, praktis-moral, dan ekspresif-estetik. Menurutny, ketiga pendekatan itu bernilai setara. Ketika salah satu pendekatan mendominasi dan melemahkan yang lain maka yang akan muncul adalah ketimpangan dan kelumpuhan, yang tercemin dari rusaknya karakter bangsa.

Gelombang surut modal pengetahuan juga merupakan kehilangan terbesar “ciri keindonesian”; justru ketika dunia perekonomian semakin mengarah pada “ekonomi kreatif” (the creative economy) yang mengandalkan modal kreatif-inovatif pengetahuan. Richard Florida dalam *The Rise of the Creative Class* (2002) melukiskan secara baik tentang peran esensial dari kreativitas-pengetahuan. Bahwa pusat pertarungan ekonomi saat ini tidaklah seperti pada transisi dari era pertanian ke industri yang mengandalkan input fisik (tanah dan tenaga manusia), melainkan bersandarkan pada inteligensia, pengetahuan dan kreativitas. Kreativitas manusia-lah satu-satunya sumberdaya yang tak terbatas. Negara-negara dengan creative capital yang tumbuh baik, seperti Finlandia, Swedia, Denmark, Belanda, Irlandia, Canada, Australia dan New Zealand, terbukti memiliki daya saing perekonomian yang lebih kuat.

Isu utamanya di sini, bukanlah

human capital dalam arti konvensional yang semata-mata diukur berdasarkan pendidikan formal, melainkan pada pemuliaan daya-daya kreatif lewat penyediaan ekosistem yang baik bagi pengembangan kreativitas. Ekosistem kreativitas yang baik merupakan sinergi dari ketersediaan “teknologi, talenta, dan toleransi (3T)—dengan tiadanya hambatan bagi ragam ekspresi budaya.

Adapun pelaku utama dari ekonomi kreatif (the creative economy) ini tak lain adalah anak-anak muda dengan etos kreatif yang kuat. Itulah sebabnya, mengapa dalam perekonomian global hari ini, banyak pengusaha sukses yang tumbuh dari orang-orang berusia muda.

Restorasi Fitrah Keindonesiaan

Berdiri di awal milenium baru, menyaksikan arus globalisasi yang kian luas cakupannya, dalam penetrasinya dan instan kecepatannya, mengusik rasa hirau kita akan eksistensi bangsa kita di pentas dunia. Banyak ahli meramalkan bahwa dengan tendensi kemandegan perekonomian di Eropa dan Amerika Serikat, masa depan perkembangan dunia dilukiskan sebagai era kebangkitan Asia. Tetapi dalam era kebangkitan Asia ini, apakah takdir Indonesia sebagai negara besar hanyalah pelengkap penderita yang bercokol di halaman belakang dari dinamika kawasan? Ketika negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik makin percaya diri dengan daya saingnya, Indonesia justru menyongsong dinamika kompetisi pasar bebas dengan kondisi yang memprihatinkan.

Usaha apapun untuk memancang kembali marwah keindonesiaan harus mempertimbangkan fitrah keindonesiaan yang perjuangan emansipasi berbasis daya muda dan daya pengetahuan. Suatu usaha penemuan kembali Indonesia bisa dilakukan dengan melakukan transformasi paradigmatik dalam

kebudayaan. Strategi kebudayaan harus melakukan reorientasi pada dimensi mitos, logos dan etos. Kepercayaan kembali pada potensi kaum muda sebagai agen perubahan, pengukuhan kembali ilmu sebagai ukuran kehormatan, serta pemupukan etos kerja lewat pendidikan karakter yang memuliakan akhlak dan meritokrasi berbasis aktualisasi ragam kecerdasan insani.

Pada dimensi mitos, yang harus kita akhiri bukan saja "mitos pribumi malas", melainkan juga mitos yang memandang "status quo" dan senioritas sebagai ukuran kualitas dan tumpuan perubahan. Mitos baru harus dimunculkan dengan mempercayai kapasitas kaum muda sebagai agen perubahan. Seiring dengan itu, kaum muda sendiri dituntut untuk menyelamatkan kepercayaan rakyat kepada Republik, dengan mengembalikan politik pada khitahnya sebagai seni untuk mewujudkan kemaslahatan bersama (republik). Dalam kaitan ini, ada mitos lain yang harus diruntuhkan. Mitos lama yang mempercayai bahwa kemenangan suatu kelompok etnis-keagamaan-kelas sosial harus dibayar oleh kekalahan kelompok lain harus diakhiri. Kepercayaan baru perlu dihadirkan dengan kejembaran untuk berbagi kebahagiaan dengan merayakan kemenangan secara bersama. Kekayaan Indonesia sebagai negeri multikultural tidak boleh dibiarkan terus berjalan dalam situasi "plural monokulturalisme" yang berjalan sendiri-sendiri tanpa saling berinteraksi. Harus diciptakan wahana yang mendorong proses penyerbukan silang budaya (cross-culture fertilization), yang melahirkan persenyawaan yang unggul dan produktif.

Pada dimensi logos, pengukuhan kembali kekuatan ilmu sebagai ukuran kehormatan terasa penting ketika daya pikir ('bangsawan pikiran') mulai 'dihinakan' kembali oleh 'kebangsawanan baru', dalam bentuk kronisme dan politik dinasti, yang membawa mediokritas dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan

merajalelanya mediokritas, etos kreatif dan ekonomi kreatif sebagai basis daya saing global pada era pasca-industri tak bisa berkembang secara kondusif.

Jika bangsa ini ingin merestorasi elan vitalnya, seperti yang pernah dihidupkan oleh para pendiri bangsa, tak ada jalan lain bahwa modal pengetahuan dan pemahaman (logos) perlu ditingkatkan dengan memperbaiki sistem pembelajaran sosial secara kolektif (collective social learning). Terbukti bahwa kemajuan suatu bangsa tidak bisa hanya bertumpu pada modal sumberdaya alam. Yang terpenting justru modal sumberdaya insani. Bahwa kemajuan dan kesejahteraan rakyat harus dipandang sebagai hasil dari proses belajar sosial. Kesetaraan kesempatan dan interaksi sosial menjadi kata kunci.

Untuk memberi lingkungan yang kondusif bagi penguatan modal pengetahuan, praksis demokrasi harus kembali dipimpin oleh orientasi etis 'hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan nalar-pengetahuan dan kearifan. Seturut dengan itu, setiap warga harus diberi peluang yang sama untuk bisa memasuki dunia pendidikan. Harus dicegah proses pendidikan yang mengarah pada pengukuhan segregasi sosial. Sekolah-sekolah publik harus bisa diakses oleh orang dari latar agama dan etnis apa pun, dan menjadi wahana peyerbukan silang budaya (cross-culture fertilization) yang dapat memperkuat budaya kewargaan (civic culture). Kapitalisasi dunia pendidikan harus dibatasi dengan meneguhkan kembali standar meritokrasi, di atas daya beli.

Pada dimensi etos, perlu ada transformasi karakter untuk membebaskan bangsa dari perbudakan mental dan mentalitas budak—yang mudah dilamun ombak dan bersilang sengkarut—dengan memberi isi dan arah hidup kebangsaan. Seperti kata Bung Karno dalam Amanat Proklamasi 1956: "Bangsa Indonesia harus mempunyai isi-hidup dan arah-hidup. Kita

harus mempunyai levensinhouid dan levensrichting. Bangsa yang tidak mempunyai isi-hidup dan arah-hidup adalah bangsa yang hidupnya tidak dalam, bangsa yang dangkal, bangsa yang cetek, bangsa yang yang tidak mempunyai levensdiepte samasekali. Ia adalah bangsa penggemar emas-sepuhan, dan bukan emasnya batin. Ia mengagumkan kekuasaan pentung, bukan kekuasaan moril. Ia cinta kepada gebyarnya lahir, bukan kepada nurnya kebenaran dan keadilan. Ia kadang-kadang kuat,—tetapi kuatnya adalah kuatnya kulit, padahal ia kosong-mlompong di bagian dalamnya."

Pada titik ini, yang kita persoalkan adalah perlunya transformasi pada dimensi etos kejuangan. Etos adalah karakter dan sikap dasar manusia terhadap diri dan dunianya. Ia merupakan aspek evaluatif yang memberi penilaian atas berharga tidaknya sesuatu serta memberi orientasi atas tindakan manusia, yang tercermin dalam sikap dan pilihan-pilihan yang dikembangkannya.

Etos pemuda selama ini kental berkarakter kekerasan dan "kemalasan", seperti tercermin dari munculnya berbagai laskar dan mentalitas "pegawai". Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, etos seperti itu harus ditransformasikan menjadi etos kerja dan etos kreatif sesuai dengan bakat dan karakternya masing-masing.

Dengan menggali modal sejarah, kita bisa bercemin bahwa peristiwa Sumpah Pemuda bisa dilukiskan sebagai ekspresi pembongkaran kreatif (creative destruction). Menerobos kecenderungan serba ragu, konformis, parokialis dan status quois dari generasi tua, para pemuda-pelajar, yang semuanya berusia di bawah 30 tahun itu, datang dengan etos kreatif. Etos kreatif ini, seperti dilukiskan Margaret Boden dalam *The Creative Mind* (1968), bersendikan kepercayaan diri dan kesanggupan menanggung risiko, sehingga memiliki keberanian untuk mendekonstruksi bangunan lama demi konstruksi baru yang lebih baik. ◦

Pemuda Palestina Menentang 'Israel'

Pengunjuk rasa Palestina dengan penutup wajah melewati ban dibakar saat terjadi bentrokan dengan tentara Israel dekat perbatasan Israel dan Pusat Jalur Gaza, Rabu (14/10). Tujuh warga Israel dan 31 warga Palestina, termasuk anak-anak dan pejuang, tewas selama dua minggu pertumpahan darah di Israel, Yerusalem dan wilayah pendudukan Tepi Barat. Kekerasan sebagian dipicu kemarahan warga Palestina atas meningkatnya pelanggaran batas oleh Yahudi di wilayah masjid Al-Aqsa, Yerusalem, yang juga diyakini umat Yahudi tempat hancurnya dua kuil mereka.

Reuters







Rupiah stabil dan berdaulat adalah harapan kita semua. Meski demikian, kenyataan tak selalu berjalan seiring dengan harapan.

Dengan sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar Rupiah ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran. Ini artinya, apabila permintaan terhadap dolar AS lebih tinggi, secara alamiah dolar AS akan menguat. Kalau kita ingin menjadikan Rupiah lebih stabil dan menguat, jawaban sebenarnya sederhana, yaitu kurangi permintaan dolar, tingkatkan permintaan atau penggunaan Rupiah.

Namun masalahnya, tentu tak sesederhana itu. Sejak 2011, kondisi di pasar valuta asing (valas) kita diwarnai oleh lebih tingginya permintaan valas, terutama dolar AS, daripada pasokannya. Tingginya permintaan Dolar AS itu didasari oleh beberapa alasan, antara lain untuk kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri dan penjualan barang jasa dalam satuan valuta asing.

Kondisi ekonomi global saat ini juga memberi pengaruh. Rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed, telah mengakibatkan dolar AS menguat terhadap berbagai mata uang lain di dunia, termasuk Rupiah.

Di sisi lain, tahun 2005, utang luar negeri atau korporasi atau swasta berjumlah sekitar 80 miliar dolar AS. Di tahun 2015,

jumlahnya meningkat hingga mencapai sekitar 160 miliar dolar AS. Selain itu, rasio pembayaran utang luar negeri swasta terhadap pendapatan ekspor, atau yang dikenal dengan istilah Debt Service Ratio (DSR), juga meningkat dari sekitar 15 persen di tahun 2007 menjadi sekitar 54 persen di tahun 2015.

Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia telah menempuh beberapa kebijakan, antara lain, upaya pendalaman pasar keuangan, agar pelaku pasar memiliki lebih banyak pilihan instrumen dan kemudahan dalam bertransaksi. Bank Indonesia juga melakukan monitoring yang ketat terhadap utang luar negeri, khususnya di sektor korporasi. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 16/20/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri yang mencakup tiga hal, yakni rasio lindung nilai, rasio likuiditas dan peringkat utang.

Simbol kedaulatan

Selain kedua faktor di atas, secara geoekonomi, kita juga melihat kecenderungan meningkatnya pemakaian mata uang asing, khususnya dolar AS, dalam berbagai transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam praktik sehari-hari, masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan menggunakan Rupiah dan cenderung memilih menggunakan mata uang asing.

KEDAULATAN RUPIAH MEMPERSATUKAN 34 PROVINSI DI INDONESIA



Transaksi mata uang asing di wilayah NKRI yang dilakukan antar penduduk Indonesia jumlahnya cukup tinggi. Bayangkan, angkanya mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp78 triliun setiap bulan. Hal ini berarti sekitar Rp936 triliun per tahun.

Tingginya transaksi dalam dolar tersebut telah merambah ke segala sektor ekonomi, mulai dari sektor migas, pelabuhan, tekstil, manufaktur hingga perdagangan.

Fenomena penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI tak bisa dipandang sebagai konsekuensi dari liberalisasi, namun dapat dilihat sebagai bentuk 'ancaman' atau *soft invasion* terhadap kedaulatan politik dan ekonomi suatu Negara.

Pengalaman beberapa negara di Amerika Latin, Karibia dan Pasifik, membuktikan bahwa sikap permisif pada penggunaan mata uang asing di dalam negeri pada akhirnya akan memperlemah perekonomian nasional dan menimbulkan ketidakpastian. Kita juga pernah memiliki pengalaman pahit saat lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Salah satu alasan yang muncul pada waktu itu adalah karena Rupiah tidak lagi digunakan untuk bertransaksi di sana.

Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan tersebut, masyarakat perlu mendukung penggunaan mata uang Rupiah untuk bertransaksi di wilayah NKRI.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Mata Uang No 7 tahun 2011, dan selanjutnya, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.

Menjadikan Rupiah sebagai mata uang yang stabil dan berdaulat memang bukan langkah mudah. Tekanan terhadap Rupiah ditentukan oleh banyak hal. Langkah meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengatasi defisit ekspor-impor barang dan jasa, tidak dapat ditawar lagi.

Namun, di sisi lain, upaya menjadikan Rupiah berdaulat di negeri sendiri juga mutlak perlu didukung. Mata Uang Rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia.



Wajah industri penerbangan Indonesia kembali tercoreng. Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, dua insiden hilang dan jatuh pesawat terjadi.

Pada 2 Oktober 2015 lalu, sebuah pesawat Avia Star rute Masamba-Makassar dilaporkan hilang kontak. Pesawat itu adalah Twinotter dengan registrasi PKBRM/DHC6 bernomor penerbangan MV 7503 yang dipiloti Capten Iri Afriadi dengan Co Pilot Yudhistira serta teknisi Sukris.

Pesawat nahas itu membawa tujuh orang penumpang yakni lima orang dewasa dan dua balita yakni Nurul Fatimah, Lisa Falentin, Riza Arman, Sakhi Arqam, M. Natsir, Aff (bayi 1 tahun), Raya Adawiah (balita 3 tahun).

Harusnya, Twinotter itu tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada 15.39 WITA setelah menempuh perjalanan selama 70 menit dari Bandara Masamba pada 14.29 WITA.

Setelah tiga hari berturut melakukan pencarian tim gabungan, Polisi dan TNI berhasil menemukan pesawat itu. Sekitar 250 personel dikerahkan dengan melibatkan masyarakat setempat. "Pesawat Aviastar telah ditemukan di wilayah Pegunungan Latimojong, Kabupaten Enrekang. Hal ini berdasarkan informasi dari Polda Sulselbar yang mendapat informasi dari Polres Enrekang," kata juru bicara Basarnas, Zainal Thahar, Senin (5/10).

Satu minggu kemudian, Minggu 11 Oktober, sebuah helikopter EC 130 PK-BKA milik PT Penerbangan Angkasa Semesta dilaporkan hilang kontak juga sejak pukul 11.30 WIB.

Helikopter yang diterbangkan pilot Captain Teguh dengan *engineer* Heri itu mangangkut tiga penumpang yakni Nurhayanto, Giyanto dan Frans. Rencananya heli yang

Tim Basarnas membawa serpihan pesawat Aviastar DHC6/PK-BRM di Landasan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/10).

Wajah Buram Industri Penerbangan Indonesia



berangkat dari Samosir itu akan tiba di Kualanamo, Deli Serdang pada 12.35 WIB.

Regulator Penerbangan Masih Semrawut

Lagi-lagi yang jadi soal adalah kebijakan atau regulasi penerbangan yang masih semrawut. Padahal belum lama juga, insiden jatuhnya Air Asia QZ8501 harusnya jadi pelajaran penting buat dunia penerbangan Indonesia bahwa soal keselamatan di industri penerbangan di negeri ini masih jadi masalah besar.

Pengamat penerbangan, Dudi Sudibjo mengingatkan lagi bahwa pembenahan regulasi harus tetap dilakukan terus agar tidak kembali terjadi insiden lagi. Memang ini pekerjaan rumah yang luar biasa bagi Indonesia. “Di dalam kedukaan ini kita diberi peringatan, bahwa ada sesuatu permasalahan 'gunung es' di lingkungan regulator,” papar dia.

Dia menjelaskan, sebagai apapun maskapai atau hal lain di luar regulator, sama sekali tidak berguna kalau regulasinya lemah. Sebab, dunia penerbangan internasional hanya akan melihat sebagai apa regulasi penerbangan di suatu negara.

Sementara itu, sikap ‘aneh’ kembali ditunjukkan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan ketika menanggapi insiden kecelakaan pesawat yang terjadi dalam dua pekan di bulan Oktober ini. Kata Menteri Jonan, kecelakaan pesawat Aviastar adalah kesalahan pilot.

Pernyataan ini membuat banyak pilot pesawat protes keras. Lewat organisasi Solidaritas Pilot Indonesia, mereka menilai Menhub Jonan justru melanggar azas keselamatan penerbangan dengan membuat pernyataan tanpa dasar investigasi KNKT.

“Menurunkan kepercayaan masyarakat Indonesia dan dunia terhadap Industri Penerbangan Indonesia,” demikian pernyataan Solidaritas Pilot Indonesia dalam keterangan resminya yang diterima Aktual, beberapa waktu lalu.



Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan saat melakukan pemantauan pencarian pesawat Aviastar DHC6/PK-BRM hari ketiga di Crisis Center Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (5/10).

Mereka mengangap pernyataan Jonan merugikan dunia penerbangan Indonesia dan tidak menghargai profesi-profesi yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan terutama pilot Indonesia dan investigator KNKT.

Seyogyanya, Menteri Jonan melakukan evaluasi juga terhadap regulator yang ada di bawah komandonya. Jangan hanya menyalahkan pihak operator tanpa dasar yang jelas.

Apa Kabar Panja Penerbangan DPR RI?

Masih segar dalam ingatan kita, pasca insiden Air Asia QZ8501 yang jatuh dan menewaskan 280 penumpangnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk Panitia Kerja Keselamatan Penerbangan untuk mengevaluasi kinerja regulator penerbangan.

Hingga Oktober 2015 ini hasil Panitia Kerja DPR RI tersebut belum

diketahui hasilnya oleh publik. Kabar terakhir pasca insiden Aviastar, Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan bentuk Komisi V DPR RI ini diperpanjang .

“Melihat banyak kembali insiden penerbangan, kami (Komisi V) akan memperpanjang Panja Penerbangan,” ujarnya kepada Aktual, Jum'at (9/10).

Sementara itu, Fauzi H Amro anggota Komisi V DPR RI sekaligus anggota Panja penerbangan mengatakan hingga saat ini, panja penerbangan belum pada titik kesimpulan, sehingga kinerja panja kembali bisa diperpanjang mengingat masih terjadinya insiden penerbangan.

“Hingga sekarang belum ada kesimpulan (panja),” katanya, Senin (12/10) kepada Aktual.

Fauzi juga mengingatkan janji Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang akan meningkatkan kategori keselamatan penerbangan Indonesia di ICAO (organisasi penerbangan Internasional) dari kategori III ke kategori II di bulan Mei 2015.

“Kalau melihat masih adanya insiden akhir-akhir ini, peningkatan katagori keselamatan penerbangan ini tidak akan terjadi,” ungkapanya. ◦

Sukardjito

10 Ribu Pasang Sandal Berlafadz Dimusnahkan

Sebanyak 10 ribu pasang sandal yang berlafadz Allah, dimusnahkan. Pemusnahan itu dilakukan di halaman kantor PWNU Jawa Timur, Selasa (13/10).

Pemusnahan sandal tersebut, disaksikan oleh jajaran pengurus PWNU Jatim, masyarakat dan Kepolisian.

Liem Long Hwa, Pimpinan PT Pradipta Perkasa Makmur, yang memproduksi sandal berlafadz itu, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia.

Liem Long Hwa mengaku, sejak awal tidak mengetahui jika di sandal yang diproduksi oleh pabriknya, bertuliskan lafadz Allah. Dirinya baru mengetahui setelah ada laporan distributor.

“Saya tidak tahu jika ada lafadznya. Saya pesan cetakan dari China. Maka dari situ, saya meminta maaf karena ini di luar kesengajaan,” ujar Long Hwa di Surabaya, Selasa.

Sebagai tanggung jawab, lanjutnya, pihak perusahaan akan



memusnahkan mesin dan bahan baku yang tersisa, serta akan menarik semua produk yang sudah beredar. Bahkan, pihaknya akan mengganti produk baru jika sudah ada yang terlanjur membeli.

Sementara Ketua PWNU Jatim, Muttawakil, mengatakan dengan dilakukan pemusnahan tersebut, diharapkan warga tidak ada yang memakai sandal tersebut. Sebab, sandal tersebut sudah beredar di Indonesia dengan angka 30 ribu pasang sandal.

Hasil penelitian PWNU, sebenarnya tidak hanya lafal bertuliskan Allah. Tetapi pada alas tersebut jika dicermati ada bentuk seperti kaligrafi tulisan Muhammad. /Zaenal Arifin-Ahmad H. Budliawan

Rieke Jadi Ketua Pansus Pelindo II

Rapat pansus Pelindo II akhirnya memutuskan Rieke Diah Pitaloka menjadi ketua Pansus.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/10).

Kesepakatan ini didapat setelah masing-masing fraksi mengirimkan nama calon pimpinan. Menurutnya, penunjukan Rieke tak diwarnai perbedaan pendapat dan perdebatan.

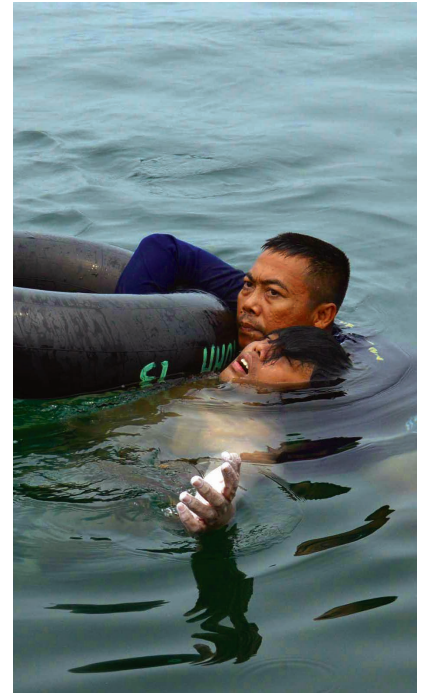
“Setelah diadakan konsultasi dan lobi, ditetapkan panitia angket dipimpin Rieke, dengan Wakil Ketua Aziz Syamsuddin, Desmond J Mahesa dan Teguh Juwarno,” ujar Fadli.

“Kita yakin panitia angket akan bekerja maksimal,” tambahnya.

Pansus akan membuat beberapa program, diantaranya metode rapat, membuat program pelaksanaan jadwal kerja berikut mekanismenya.



Hasil kerja pansus akan dilaporkan dalam 60 hari. /Karel Stefanus Ratulangi



Mukjizat, Satu Penumpang Helikopter EC 130 Ditemukan Selamat

Satu orang penumpang Helikopter EC 130 milik PT PAS ditemukan selamat.

“Betul satu penumpang ditemukan selamat,” kata Kepala tim evakuasi Kapten Sigit Darsino, Selasa (13/10).

Supriyadi menjelaskan, korban ditemukan di pinggir pantai sebelah selatan Nainggolan tempat ditemukannya jok Helikopter yang hilang kontak sejak hari Minggu (11/10) lalu.

“Korban ditemukan dalam kondisi lemas, dan saat ini sudah dievakuasi ke Puskesmas,” ucapnya.

Adapun kronologisnya, tim pada pukul 08.00 Wib melakukan penyisiran dari titik ditemukan jok Heli EC 130 itu. Nah, kemudian penyisiran berjarak 500 meter tim menemukan salah satu penumpang yang diketahui namanya bernama Fransiskus itu tergeletak di pinggir pantai.

“Kita belum mengambil keterangan lebih dari Fransiskus,” tutupnya. /Sukardjito

Tanggapi Isu Reshuffle, Jaksa Agung Siap Dicotot



Jaksa Agung Muhammad Prasetyo siap dicopot dari jabatannya. Pendapat Prasetyo itu menanggapi isu reshuffle jilid II di pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama terhadap Jaksa Agung yang diimban dari Partai Nasdem.

“Ya silakan saja lah, yang penting saya bekerja untuk bangsa ini,” kata Muhammad Prasetyo di Gedung Kejaksaan, Jumat (16/10).

Dia mengklaim, selama bekerja di Korps Adhyaksa itu merupakan bagian pengabdian untuk negara. “Saya bekerja untuk bangsa ini tidak ada urusan lain,” ujar dia.

Beredar desakan dari beberapa

pihak agar Presiden Joko Widodo mengganti Jaksa Agung, terutama dari politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Apalagi, Jaksa Agung telah membuat kegaduhan karena kasus salah geledah di Kantor PT Victoria Securities Indonesia pada Agustus silam. Kemudian pihak Kejaksaan yang dipimpin Prasetyo itu kembali berulah, dengan menggeledah kantor VSI dengan tak menunjukkan surat dari pengadilan.

Saat ini, isu yang mencuat yakni keterlibatan Jaksa Agung dalam kasus penanganan perkara bansos, tunggakan dana bagi hasil dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumatera Utara yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumut atau Kejaksaan Agung yang ditangani KPK.

Dalam kasus tersebut, KPK sudah menyematkan status tersangka kepada kolega Prasetyo, yakni Rio Capella sesama kader Partai Nasdem, yang merupakan besutan Surya Paloh. /Wisnu



Luas Kebakaran di Sumatera dan Kalimantan Capai 1,7 Juta Hektar

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membeberkan kalau luas kebakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan sudah mencapai 1,7 juta hektare.

Luasnya lahan yang terbakar itulah yang jadi penyebab munculnya kepungan asap di Sumatera dan Kalimantan hingga negara tetangga.

“Ini merupakan data terakhir sejak kebakaran lahan dan hutan terjadi di Sumatera dan Kalimantan,” kata Siti, saat meninjau lokasi kebakaran bersama Presiden Joko Widodo di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (9/10).

Jokowi yang mendengar beberan data itu pun akui wilayah kebakaran hutan memang sangat luas. Padahal, kata dia, tim pemadaman sudah lakukan segala upaya. “Tim kita di lapangan sudah berkerja maksimal,” kata dia. /M Vidia Wirawan

Pasal Satu Ahok Selalu Benar, Jika Salah Kembali Lagi ke Pasal Satu

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI, Selamat Nurdin menilai, sikap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kerap menyerang lembaga atau perorangan adalah bagian dari agenda *setting* untuk pencitraan.

“Penyerapan (APBD) rendah atau APBD-P enggak jalan-jalan dia bilang yang salah, menteriya enggak bener. Sekarang malah mau bikin KTP anak, ngurus e-KTP aja enggak beres-beres kok jadi nyerang. Ini menyalahkan orang untuk menaikkan citra diri,” ujar nya kepada wartawan, Minggu (11/10).

Selain itu, ucapan Ahok yang keras dan suka cari masalah justru menjadikannya banyak diburu media. Karena fenomena sosok Ahok dianggap sebagai hal baru di negeri ini, maka secara otomatis akan selalu menjadi sorotan banyak media massa.

“Ahok itu dijaga dengan citranya, Karena media darlingnya terlalu darling, itu yang dijaga Ahok. Dengan cara kalau ada apa-apa metode Ahok itu menyerang lawannya dan musuhnya yang dianggap salah. Lalu dia mendapat *image* bagus,” ungkapnya.

Padahal, selama Ahok naik pangkat menjadi Gubernur menggantikan Jokowi yang jadi Presiden, belum ada hasil kerja yang bisa dibanggakan.

“Kinerjanya dia (Ahok) sebenarnya biasa kan ya, rata-rata aja enggak menonjol juga. Pencitraannya yang justru menonjol,” bebarnya.

Sehingga akhirnya, banyak pihak yang justru merasa tersudut dengan tuduhan Ahok. Ketika membalas, media seakan berada di belakang Ahok.

“Pokoknya kalau ada kegiatan enggak benar Pak Ahok selalu benar pasal satu. Kalau Ahok salah kembali ke pasal satu,” tandasnya.

/Wahyu Romadhony-Ivan Setyadhi



Sinar Surya dari Gondangdia Hingga Medan

Hari masih pagi Selasa, 7 Juli 2015 Pukul 7:43 WIB ketika Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho meminjam *handphone* milik ajudannya Joko Arifin untuk menghubungi Yagari Bhastara Guntur. Pria yang ditelepon oleh orang nomor satu di Sumut pagi itu

adalah anak buah pengacara senior Otto Cornelis Kaligis.

“Soal di Gedung Bundar bagaimana ya?” ujar Gatot mengawali pembicaraan.

Gatot gusar dengan perkembangan penyidikan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang disidik Kejaksaan

Agung. Informasi yang ia terima kasus tersebut akan naik ke tingkat penyidikan. Artinya akan segera ada yang menyandang status tersangka. Padahal politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut sudah bertemu elit Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu hadir Kaligis sebagai pengacara sekaligus Ketua Mahkamah Partai Nasdem. Sekjen Nasdem. Sebagai tuan rumah pertemuan yang disebut Kaligis sebagai upaya mendamaikan konflik antara



Tersangka tindak pidana korupsi suap majelis hakim dan panitera PTUN Medan Gatot Pujo Nugroho tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/9).

penghentian penyelidikan adanya surat penghentian penyidikan,” ujar Gary menjawab pertanyaan Gatot.

Pembicaraan keduanya tanpa disadari direkam oleh tim Indra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alat sadap dari kantor lembaga anti rasuah itu di Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Jumat (31/7) rekaman tersebut diperdengarkan kepada Gary.

Masih dalam rekaman pembicaraan itu Gary mengatakan Gatot menginginkan kasus korupsi dana Bansos dapat dihentikan setelah kesepakatan damai atau islah di kantor Nasdem.

“Saya menerangkan pada saat islah waktu itu tercapai tujuan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak (Gubernur dan Wagub) semestinya perkara di Kejaksaan Agung tersebut bisa dihentikan, karena pada saat islah tersebut katanya hadir juga Surya Paloh yang merupakan ketua Nasdem dan Pak OC Kaligis (Ketua Mahkamah Partai Nasdem) dan Jaksa Agung adalah orang Nasdem, maka atas dasar itu seharusnya Surya Paloh bisa melakukan pendekatan kepada Jaksa Agung untuk bisa

menghentikan spindiknya,” ujar Gary menerangkan maksud pembicaraan kepada penyidik KPK.

Penjelasan Gary tersebut dijawab oleh Gatot singkat. “Iya”.

Dua hari setelah pembicaraan itu Gary dan tiga hakim Pengadilan Tinggi Tatausaha Negara (PTUN) Medan ditangkap oleh tim penyidik KPK. Tripeni Irianto Putro yang merupakan Ketua PTUN Medan, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting hakim anggota dan panitera sekretaris PTUN Medan, Syamsir Yusfan.

Sepekan berselang giliran Kaligis, Gatot dan istri keduanya Evy Susanti ditetapkan sebagai tersangka. Dari kesaksian Gary lah mereka ditetapkan sebagai tersangka. Pria kelahiran 18 Mei 1985 ini juga yang menyeret sejumlah elit Partai Nasdem dalam pusaran kasus korupsi.

Sekjen Nasdem Patrice Rio Cappella tanggal 23 September lalu harus berurusan dengan KPK. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Masih menurut Gary dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menyebut adanya peran Rusli Paloh, kakak Surya Paloh dalam kasus ini.

Nama Rusli pertama kali disebut oleh Evy dalam sadapan pembicaraan antara dirinya dengan Gary. Evy menceritakan pascadamai Nasdem meminta komitmen dengan mengutus Rusli. “Ada sejumlah angka dan komitmen bapak (Gatot) dengan

Gatot, Wakil Gubernur Sumut Teuku Erry Nuradi dan Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh. Maklum Erry adalah Ketua DPW Nasdem Sumut.

Gary yang mendapat pertanyaan dari Gatot lantas menjawab. “Kalau hasil pertemuan dengan SP (Surya Paloh) itu positif walaupun ditingkatkan (sprindik di Kejaksaan Agung) ada dua kemungkinan, ditingkatkan itu untuk dikeluarkan sebuah produk agar bisa dihentikan, karena kalau tidak ditingkatkan penyelidikan itu tidak bisa dihentikan, sebab tidak ada surat

Tersangka suap yang juga anak buah OC Kaligis, M Yagari Bhastara alias Gerry memberikan kesaksian pada sidang lanjutan dengan Terdakwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Syamsir Yusfan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/9).

si abang nya SP (Surya Paloh) itu mengenai penempatan beberapa eselon,” kata Gary menirukan ucapan Evy Susanti di BAP yang diterima *Aktual*, Senin (5/10).

Komitmen *fee* dan permintaan penempatan sejumlah pejabat eselon di Pemprov Sumut, sebagai timbal balik jika penganan kasus korupsi Bansos yang ditangani Kejaksaan Agung berhenti. Disampaikan juga kesemuanya itu oleh Evy kepada Sekjen NasDem Patrice Rio Capella.

“Komitmen *fee* antara Gubernur dengan kakaknya Surya Paloh (Rusli Paloh) tentang penempatan pejabat eselon di Pemprov Sumut agar bisa mendorong Surya Paloh untuk menyelesaikan permasalahan (Bansos) di Kejaksaan Agung,” jelasnya.

Mantan pengacara Gatot, Razman Arief Nasution membenarkan adanya kesepakatan pembagian kekuasaan antara Gatot dan Nasdem pascadamai.

“Menurut Evy dan Gatot ke saya, pertemuan itu juga bahas bagi-bagi kekuasaan. Ada pembicaraan ‘power sharing’,” ujar Razman, saat dihubungi, Sabtu (3/10).

Kaligis sendiri membantah keterangan mantan anak buahnya tersebut. Ia bersikukuh tidak ada keterlibatan Partai Nasdem dalam kasus yang menjeratnya.

“Sama sekali tidak. Itu keterangan palsu. Keterangan Gary itu, bukan untuk saya. Masa ikut-ikutan keterangan yang nggak benar,” ujar OC Kaligis, usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/10).

Begitu juga ketika disinggung bahwa keterangan Gary itu disampaikan sesuai dengan curhat istri Gatot, Evy Susanti. OC Kaligis juga mempertanyakan curhat itu.

“Dia tahu apa itu? Jangan tarik-tarik dong. Saya kan yang tahu, saya sudah bilang itu tidak ada hubungannya dengan perkara,”



pungkasnya.

Disebutnya nama Surya Paloh oleh sejumlah tersangka membuat KPK terus mendalami keterlibatan bos Media Group tersebut. Bahkan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK Indriyanto Seno Aji menyebut pihaknya tengah mengkaji kemungkinan pemanggilan untuk Surya sebagai saksi.

“Perlu tidaknya kehadiran pemeriksaan SP (Surya Paloh) akan dikaji minggu depan,” kata Indriyanto.

Paloh pun mengaku siap diperiksa sebagai saksi jika dibutuhkan KPK. Pernyataan itu disampaikan usai menyampaikan pidato dalam HUT pertama Fraksi NasDem di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (1/10).

“Kalau memang diperlukan oleh KPK saya akan datang kalau dipanggil, tapi kalau tidak diperlukan

ngapain saya katakan tolong panggil saya. Gila juga saya. Ini supaya transparan,” ujarnya.

Kesiapan Paloh diperiksa KPK dinilai positif oleh anggota Komisi III DPR Desmond J Mahesa. Namun politisi Nasdem ini justru mempertanyakan nyali KPK.

“Pertanyaannya, penyidik KPK berani panggil enggak? Kan itu aja. Kalau enggak berani ada masalah dengan KPK,” ucap Desmond, di Gedung DPR, Senayan, Kamis (8/10).

Desmond mengatakan, pemeriksaan terhadap Surya Paloh memang agak ‘spesial’. Mengingat dia adalah bos partai salah satu pendukung pemerintah, orang dekat presiden, dan memiliki media.

“Inikan punya partai, punya media, kan susah. Siapa yang lebih berkuasa dari Surya Paloh? Enggak ada,” tandas dia.

Tantangan Desmon ternyata



direspons cepat oleh KPK. Kamis (15/10) lembaga anti rasuah itu menetapkan Sekjen Partai Nasdem Rio Cappela sebagai tersangka.

“Penyidik menemukan dua bukti permulaan yang cukup menetapkan PRC sebagai tersangka selaku anggota DPR,” ujar plt pimpinan KPK Johan Budi.

Rio diduga menerima uang sebesar Rp200 juta dari Gatot. Peruntukan uang tersebut tidak jelas. Diduga sebagai akomodasi menuntaskan kasus korupsi yang bisa menjerat Gatot.

Dari kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat Surya Paloh menyampaikan keprihatinannya.

“Ini tentu memprihatinkan, tapi inilah bagian daripada sebuah komitmen atas konsistensi sikap yang terus-menerus dipegang teguh,” terang Paloh dalam jumpa pers di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat.

Nasdem menghargai dan menjunjung tinggi upaya-upaya penegakan hukum di negeri ini. Bos Media Grup itu juga menekankan partainya tidak pernah bermain-main antara ucapan dan perbuatan. Kegiatan Rio dalam pusaran kasus

dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sumut, Paloh mengaku tidak mengetahuinya sama sekali.

Evy Susanti dalam kesaksiannya untuk terdakwa Otto Cornelis Kaligis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/10), mengatakan jika suaminya pernah dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan penyimpangan dana Bansos Pemprov Sumut. Dalam panggilan itu suaminya sudah berstatus tersangka.

Penetapan tersangka itulah yang diduga kuat menjadi cikal bakal pertemuan di Kantor DPP Nasdem. Pertemuan dilakukan untuk mendamaikan Gatot dan Wakilnya Tengku Erry Nuradi yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Sumut atas inisiasi OC Kaligis. OC sendiri saat itu masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai Nasdem.

“Seakan-akan ada pertemuan di sini yang mengonstruksikan ada upaya saya jadi makelar kasus. Atau ada upaya saya mempergunakan legalitas saya, mengatur-aturl perkara saudara Gatot misalnya. Bicara dengan Jaksa Agung misalnya. Saya bicara dengan akal sehat saya, nurani saya, kebenaran saya,” tepis Paloh. Wahyu Romadhoni

Kolega Bisnis Paloh di Senangol Ditangkap

Di saat Sekjen Rio dijadikan tersangka KPK, kabar tidak sedap datang dari Negeri Tirai Bambu.

Kolega bisnis Surya Paloh asal Tiongkok, Mr Sam Pa, ditangkap kepolisian setempat. Pemilik Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola EP (Sonangol EP) itu ditangkap pada 8 Oktober lalu di Beijing.

Dilansir Financial Time, Sam Pa ditahan sehari setelah pemerintah Tiongkok mengumumkan telah melakukan penyelidikan terhadap Gubernur Provinsi Fujian, Su Shulin, dan mantan Ketua Sinopec dengan dugaan pelanggaran disiplin serius.

Sam Pa berdasarkan laporan itu, diketahui tengah melakukan perjalanan dengan seorang diktator dari Harare ke Pyongyang dalam



upaya melakukan perjanjian kerja sama mengenai sumber daya dan infrastruktur senilai miliaran dolar.

Penyelidikan Sam Pa dan Su Shulin digambarkan pada pertemuan tingkat tinggi di Beijing tahun 2008 bersama seorang pejabat minyak ternama dari Angola.

Presiden Joko Widodo, dalam catatan Aktual, diketahui pernah bertemu langsung dengan Sam Pa. Jokowi bahkan membubuhkan tanda-tangan pertamanya selaku Presiden untuk kerjasama bilateral saat

bertemu Sam Pa. Yakni saat meneken MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Sonangol EP.

Saat itu, Oktober tahun lalu, Pemerintah Indonesia menyepakati kerjasama pembelian minyak mentah sebanyak 100 ribu barel dari Sonangol. Indonesia dijanjikan diskon sebesar 15 persen dari harga pasar. Tragisnya, janji tinggal janji, karena diskon tersebut tidak pernah terealisasi.

Setelah kesepakatan tersebut, Jokowi juga memberikan perhatian khusus atas pembangunan Gedung Indonesia 1. Gedung dengan tinggi 303 meter itu rencananya dibangun kerajaan bisnis Surya Paloh yakni Media Group bersama China Sonangol Land. Total investasi pembangunan mencapai Rp8 triliun. Apakah proyek ini masih akan berjalan? Menarik untuk kita tunggu. Wahyu Romadhoni



Pansus Pelindo II Akan Ungkap Korupsi Sampai Kesejahteraan Pekerja

Anggota Panitia Khusus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengatakan Pansus akan menangani berbagai masalah di anak perusahaan BUMN pimpinan RJ. Lino tersebut. Khususnya, masalah konsesi dan ketenagakerjaan.

“Tentu berbagai persoalan dari mulai indikasi bagaimana kerugian negara. Yang kemudian juga ada persoalan konsesi di sana, ada persoalan-persoalan lain yang publik sudah tahu karena ini sudah ramai dibicarakan dan tentu saja persoalan ketenagakerjaan yang salah satunya adalah pemberangusan terhadap Serikat Pekerja di Pelindo II ini,” ujar Rieke di DPR, Jakarta, Selasa (13/10).

Anggota Komisi IX ini belum mengetahui kapan pansus ini mulai bekerja. Yang jelas, kata Rieke, Pansus ini ingin mengembalikan BUMN untuk menyejahterakan rakyat bukan pribadi.

“Mulai efektifnya mungkin akan dibahas diantara pimpinan dan harus diputuskan siapa yang menjadi pimpinan pansus Pelindo II ini, tapi yang jelas dalam pansus ini kita berupaya ini adalah pintu masuk bagaimana kita mengembalikan yang namanya BUMN itu sebagai alat untuk kesejahteraan rakyat, tidak untuk memperkaya orang per orang ataupun kelompoknya,” ungkap Rieke

Lebih lanjut, Politisi PDIP ini berharap agar pansus bisa menyelamatkan aset-aset negara yang

selama ini diduga BUMN ditunggangi kepentingan kelompok.

“Ini menjadi penting sekali karena ini adalah aset nasional dan saya kira ini akan menjadi sebuah perjuangan untuk menyelamatkan aset-aset nasional khususnya yang dikelola untuk BUMN,”

“Mungkin hari Kamis, sudah ada keputusan dan Minggu depan kami sangat berharap kita sudah bisa mulai bekerja,” jelasnya

Selain itu, Rieke juga sangat berharap tidak ada yang ‘masuk angin’ dalam pansus Pelindo II.

“Kalau satu persoalan di BUMN ini bisa kita selesaikan insya Allah ini juga akan menyelesaikan indikasi kasus-kasus diberbagai BUMN. Jangan sampai BUMN itu malah mengakibatkan kerugian negara. Kemudian disuntik lagi dengan KMN. Yang terakhir 34 triliun kemarin juga sudah puluhan triliun, sementara persoalan yang ada tidak terselesaikan,” tegasnya

Sementara itu, Rieke mengaku output dalam pansus masih akan dikerjakan. Pastinya, lanjut dia, pansus akan bekerja keras membongkar indikasi kecurangan dan kerugian di BUMN, khususnya Pelindo II.

“Tapi kami sudah mengatakan bahwa tentu saja kita akan berupaya keras untuk membongkar berbagai indikasi kerugian negara yang ada di Bumn khususnya di pelindo II kemudian, konsesi mengakibatkan kerugian negara dan berbagai persoalan lain,” pungkasnya. /Wahyu Romadhoni

Survei Publik: Kinerja Jokowi-JK Menurun

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menjelaskan hasil survei yang dilakukannya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun hingga 11,5 persen dibandingkan survei enam bulan sebelumnya.

“Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini sebesar 46,0 persen, yang tidak puas 51,1 persen. Jika dibandingkan survei enam bulan lalu turun dari 57,5 persen ke 46,0 persen,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Kamis (8/10).

Survei ini dilakukan pada tanggal 14-22 September 2015 di 34 propinsi dengan jumlah responden 1200 orang dengan *margin error* sebesar 3,0 persen.

Lebih lanjut Qodari menjelaskan, hasil survei juga memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wapres M Jusuf Kalla juga turun sebesar 42,1 persen.

“Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wapres Jusuf Kalla turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen maka penurunannya hingga 11,2. persen,”

“Ini survei dengan jawaban terbuka. Jadi semua jawaban tidak kami konstruksikan, ini jawaban terbuka dari masyarakat, sehingga kadang-kadang tidak menyambung,” tambah Qodari. /Karel-Ant



Kadin: Ada Obligor BLBI Menumpang di RUU Tax Amnesty

Pelaksana harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Zainal Bintang mengingatkan agar kebijakan Tax Amnesty dilakukan secara selektif agar tidak ditumpangi 'Penumpang Gelap'.

Zainal menyebut penumpang gelap itu bisa saja obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak mau diganggu.

"Ya bisa saja. Penumpang gelap nya penikmat obligor BLBI yang tidak mau terganggu zona nyamannya. Maka dia ciptakan isu yang kerakyatan tapi penuh penumpang gelap," ujar Zainal di Jakarta, Selasa (13/10).

Zainal mengingatkan agar tax amnesty selektif dikaji, sebab dimungkinkan akan menguntungkan para obligor BLBI.

"Itu saya katakan tax amnesty harus selektif harus dikaji, yang betul-betul memberikan dampak langsung dan gunanya bagi ekonomi kita. Jangan sampai tax amnesty dengan gagah dinyatakan untuk kepentingan orang banyak tapi penumpang gelap obligor BLBI," cetusnya. /Wahyu Romadhoni



Ada indikasi Nilai Rupiah Dimainkan Kelompok Tertentu

Mantan anggota DPR RI Drajad Wibowo menduga hancurnya nilai Rupiah dalam beberapa bulan terakhir ini disebabkan oleh manipulasi oleh kepentingan tertentu. Bukan hanya spekulasi.

"Sudah beberapa bulan ini saya mencurigai terlalu besarnya depresiasi rupiah, kedua terjelek di Asia setelah Ringgit. Padahal, Malaysia mengalami krisis politik, sementara politik Indonesia stabil. Saya yakin, pasti ada yang tidak wajar. Pasti ada yang memanipulasi Rupiah," ungkap Drajad, seperti dikutip dari Kompas.com Rabu (14/10).

Kecurigaan Drajad muncul ketika Minggu lalu secara mengejutkan Rupiah menguat 8,3 persen terhadap dollar Amerika Serikat. Selama sembilan bulan rupiah anjlok sekitar 17 persen. Namun dalam seminggu, setengah dari anjloknya rupiah tersebut pulih kembali.

Menurut dia, kalau rupiah menguat 1-2 persen, mungkin masih wajar. Tapi lonjakan 8,3 persen? Sangat tidak masuk akal. Kalau hanya faktor fundamental dan kebijakan ekonomi, tidak akan sedrastis itu.

"Soal utang bank BUMN dari China, hal tersebut sudah ramai sejak Mei 2015. Bulan Juli 2015 pun diklaim sudah beres. Pada bulan tersebut Rupiah tetap merosot. Perjanjian utang diteken 16 September 2015, rupiah masih merosot hingga dua minggu berikutnya. Memang dana dari China untuk bank BUMN sudah ada yang masuk. Tapi baru sebagian kecil. Kita tahu berapa jumlahnya. Kita bisa monitor pergerakan cadangan devisa BI kok. Jika dibandingkan dengan kemerosotan cadangan devisa, dana yang masuk tersebut sangat kecil. Tidak mungkin bisa menggerakkan Rupiah naik 8,3 persen dalam hitungan hari," kata Drajad.

Dengan data dan fakta seperti itu, Drajad yakin bahwa ada kepentingan tertentu yang memanipulasi kurs Rupiah. Menurutnya, besar kemungkinan manipulator selama



ini menumpuk dollar sehingga rupiah anjlok pada skala yang di luar kewajaran. Mereka bisa melakukan itu karena punya akses terhadap kekuasaan moneter.

Dengan akses tersebut, manipulator akan dapat informasi soal kapan Rupiah anjlog dan kapan akan naik lagi. Tujuan manipulator adalah profit taking. Manipulasi terhadap kurs Rupiah ini lebih berbahaya dari spekulasi, padahal spekulasi saja sudah berbahaya.

Di AS, Pemerintah Amerika pernah menghukum bank-bank besar dunia karena terbukti melakukan manipulasi kurs Amerika-Euro. Bank-bank tersebut adalah Citicorp, JPMorganChase, Barclays dan RBS (Royal Bank of Scotland). Denda yang dijatuhkan pun besar, mencapai USD 5,5 miliar.

Berkaca dari pengalaman AS tersebut, Drajad mengimbau Preisiden Jokowi untuk melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang ada di BI, OJK, bank-bank BUMN dan beberapa konglomerat yang dikenal suka memperlmainkan Rupiah.

"Sudah terlalu banyak perusahaan sektor riil yang jadi korban perilaku manipulasi Rupiah ini," kata Drajad menegaskan. /Wahyu Romadhoni





Ketika Tiongkok Jadi Raja di Industri Kereta Api Cepat Global

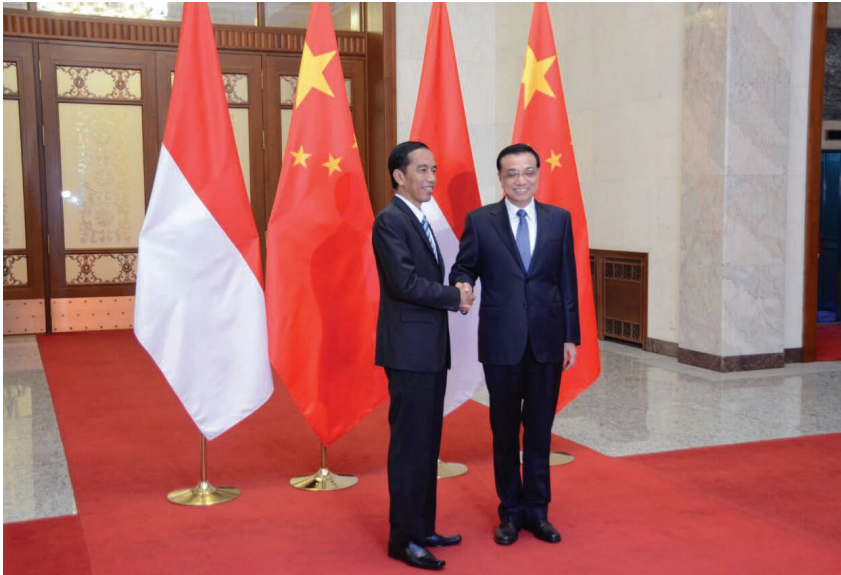
Ini data yang cukup mencengangkan. Lewat rel kereta api cepat, Tiongkok ingin menghubungkan sekitar 40 negara di Asia, Afrika, Timur Tengah dan Eropa berdasarkan rute ekonomi jalur sutera (*Silk Road Economic Belt*) kuno yang sudah dibuat leluhurnya.

Untuk visi besar geopolitik dan geoekonomi itu, PM Lie Keqiang menjadikan dirinya sebagai “top salesman” menjual kereta api cepat. Keqiang yakin, dengan menguasai infrastruktur transportasi darat global maka Tiongkok akan memutus banyak persoalan di sistem transportasi maritim global yang sekarang mulai naik tensinya ke arah peperangan.

Keqiang yakin juga, dengan suksesnya beberapa kontrak penting kereta api cepat di AS, Eropa, Afrika, Timur tengah, India, Russia, Amerika Latin, dan Asia (termasuk Indonesia) maka ‘energi’ politik dan ekonomi untuk mempertahankan kepentingan maritimnya di kawasan Selat Malaka dan Timur Tengah akan berkurang.

Keqiang juga sangat optimistis dengan ini: bahwa, ke depan, Tiongkok

Pengunjung mengamati miniatur kereta cepat dalam Pameran Kereta Cepat Dari Tiongkok di Jakarta, Kamis (13/8/15).



Presiden Jokowi bertemu PM RRT Li Keqiang, di Beijing, Jumat (27/3)

akan mampu mengeksport barang ke Barat hanya dengan waktu 15 hari dibandingkan dengan menggunakan kapal laut (resiko dan *cost*-nya cukup besar) yang rata-rata membutuhkan waktu lebih dari 35 hari.

Layak, Keqiang menyatakan bahwa Industri Kereta Api Cepat Tiongkok akan menjadi kunci penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi negaranya.

Lalu, apa strategi Tiongkok untuk semua itu?

Pada 2014 lalu, Tiongkok sebenarnya telah membentuk semacam lembaga keuangan khusus untuk membiaya proyek-proyek infrastruktur darat dan laut yang menghubungkan akan seluruh negara-negara di Asia.

Lewat “Marine Silk Road Investment Management Fund” dan beberapa dukungan keuangan dari beberapa negara Asean, Tiongkok bersedia setor uang sekitar USD40 triliun untuk membantu mengembangkan proyek-proyek infrastruktur darat dan laut di Asia. Tiongkok bahkan memainkan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk memenangkan proyek-proyek infrastrukturnya di India, Afrika, Timur Tengah dan Russia.

Langkah ini membuat langkah IMF dan World Bank di proyek

globalnya di Asia dalam kerangka “Green Funds for Climate Change” terganjal. Ini juga yang membuat tensi geopolitik dan geoekonomi antara AS (plus sekutunya) dan Tiongkok di Laut China Selatan sempat memanas.

Namun, tensi itu mulai turun ketika Presiden XI Jinping dan Presiden Obama bertemu di Washington beberapa saat lalu. Pascapertemuan itu, secara mengejutkan, Obama menerima proposal Tiongkok untuk membangun konstruksi kereta api cepat pertama di AS yakni jalur Los Angeles - Las Vegas.

New York Times menulis langkah Tiongkok ini seperti ini: “*Xi is obsessed with strategic rivalry with the United States.*” Di sisi lain, langkah Obama menerima tawaran Tiongkok itu ditentang banyak politisi di Senat AS yang sampai saat ini menganggap Tiongkok adalah “musuh besar” AS dalam konteks persaingan geopolitik global. Di samping alasan ekonomis dibalik perjanjian itu.

Akan halnya Eropa, Tiongkok juga tak ingin memanas tensi geopolitiknya dengan Eropa. Tiongkok sadar dengan cara *reverse engineering* teknologi kereta api cepat dari Siemens (Jerman), Alstom (Perancis) dan Bombardier (Canada) dan Kawasaki (Jepang)

maka Tiongkok bisa menguasai pasar global kereta api cepat. Ya, tanpa perusahaan-perusahaan yang pernah *leading* di industri kereta api cepat itu maka Tiongkok tidak bisa punya kereta api cepat.

Tiongkok saat ini merangkul mereka untuk menjadi partner penting untuk mewujudkan impian besarnya. Bombardier Transportation misalnya, beberapa saat lalu mendapat kontrak dari China Railway Corp. (CRC) untuk menyuplai 15 kereta api super cepat CRH380D dengan total USD381 juta. Begitu pula dengan yang lainnya.

Mengapa Tiongkok Lebih Memilih Jalan “Damai”?

Tensi pertarungan geopolitik di Asia sempat menguat akibat beberapa tekanan skema geopolitik Tiongkok “Silk Road Economic Belt” versus skema geopolitik AS dan Eropa dengan bungkus “Green Economy and Climate Change”.

Rupanya strategi Sun Tzu dalam hal “menang tanpa melakukan peperangan” kali ini benar-benar digunakan pemerintah Tiongkok. Langkah *win-win solution* mulai diperlihatkan pemerintah China untuk memuluskan mimpi besarnya.

Tiongkok melihat, AS dan Eropa mulai cemas melihat sisi lain dari kontrak besar senilai USD25 triliun beberapa saat lalu antara Russian Railways dan China’s National Development and Reform Commission untuk menghubungkan Moskow dan Beijing lewat jalur kereta api cepat.

Dalam kontrak itu, Russia dan China sepakat membangun 7000 jaringan rel kereta api untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Asia Tengah. Namun yang membuat AS dan Eropa berpikir panjang adalah bahwa perjanjian itu ternyata menyertakan beberapa kerjasama lain..

Rencananya, jaringan rel tersebut akan berperan penting untuk



Presiden AS Barack Obama (kiri) berbincang dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat mereka berjalan dari Sayap Barat Gedung Putih untuk makan malam pribadi di Blair House, Washington, Kamis (24/9).

Dalam sebuah kolomnya BBC menulis seperti ini, “*China has advantages in this game: enormous economies of scale, the absence of a political cycle to disrupt long-term planning, state-owned rail builders with deep pockets, and not least control of the media*”.

Sesungguhnya, pertemuan Jinping dan Obama itu adalah momen penting babak baru “bagi-bagi proyek global”. Dalam beberapa hal, kedua negara adidaya tersebut sepakat untuk menyelamatkan beberapa kepentingan besarnya di balik visi Silk Road Economic Belt dan Green Economy and Climate Change. Ini sangat mengganggu kepentingan Russia.

Lantas, apa artinya buat Indonesia?

Sederhana. Babak “bagi-bagi proyek global” antara Tiongkok dan AS (plus sekutunya Eropa misalnya) akan terjadi juga di Indonesia. Negara ini, suka atau tidak suka, akan dipaksa untuk mengikuti skema bagi-bagi itu.

Ini jelas akan berimbas ke kondisi politik Indonesia. Politisi-politisi yang visinya hanya sebagai *backing* proyek-proyek perusahaan asing pada ribut semua. Birokrat atau politisi yang dapat ijon akan kelimpungan ketika proyek yang diinginkan pengijon terancam gagal.

Kasus kalahnya Jepang di proyek kereta api cepat misalnya. Ini jangan diartikan sebagai sekadar kekecewaan dan kemarahan Jepang terhadap pemerintah Indonesia. Tapi kemarahan Jepang terhadap politisi-politisi yang mem-*backup* investasi dan rencana investasi Jepang di Indonesia.

Sungguh miris dan sangat menyakitkan hati. Ternyata Tiongkok dan AS (plus sekutunya) hanya melihat Indonesia dan banyak negara Asia lain hanya negara tempat bagi-bagi jatah proyek global. Tak lebih... ♦ Faizal Rizki

mempercepat kerjasama eksplorasi bersama dua lokasi sumber gas besar plus pembangunan pipa gas ke dua negara. Ada kerjasama juga di sektor industri penerbangan pengembangan energi nuklir bersama Sedrta mengembangkan pangkalan laut penting di Teluk Pasific yakni port Zarubino.

Sekadar informasi, port Zarubino akan dikembangkan menjadi pangkalan laut terbesar di Asia Selatan. Rencananya, rel kereta api cepat akan menghubungkan Zarubino ke Vladivostok lewat jalur selatan, ke Jilin di Tiongkok lewat jalur barat dan ke Rajin, Korea Utara lewat jalur Khasan.

Jadi pertemuan Jinping dan Obama itu juga harus dibaca sebagai langkah AS untuk menyeimbangkan penetrasi geopolitik China dan Russia.

Dan ada fakta penting lain dibalik

kontrak kereta api cepat Tiongkok-AS itu. Ternyata ada MoU antara Tiongkok dan AS untuk juga mengembangkan proyek ‘Green Economy’ berupa pembangunan 60 Pembangkit Listrik Tenaga Angin di Kenya. Proyek kerjasama antara China National Machinery Industry Corp. dan General Electric Co tersebut menelan investasi sebesar USD327 juta.

Dalam kesempatan itu juga, Washington juga menekan Tiongkok untuk mengembangkan kerjasama membuat pesawat komersial (bekerjasama dengan Boeing) untuk menyeimbangkan keinginan Russia mengembangkan pesawat komersial serupa dengan China. Itu belum beberapa agenda kerjasama lain di bidang perdagangan, *green* energi, keuangan, penerbangan pertahanan dan infrastruktur lainnya.

Proyek Kereta Cepat Bukan Sasaran Strategis Jepang

Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Ketua Bappenas Sofyan Djalil bahwa kepentingan Jepang di Indonesia lebih dari sekadar kereta, tersirat Jepang sedang menyasar sektor energi dan migas. Reputasi JX Holdings dan Idemitsu Kosan sebagai pemain kunci dalam eksplorasi gas laut lepas pantai maupun pertambangan, kiranya perlu diwaspadai.

Menyusul kandasnya Jepang dalam merebut proyek kereta api supercepat Jakarta-Bandung memang pukulan psikologis bagi pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dan para pelaku bisnis Jepang di Indonesia. Belum pernah dalam sejarah hubungan bilateral Indonesia-Jepang, negeri Matahari Terbit tersebut merasa begitu dipermalukan, meskipun Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN) Ketua Bappenas Sofyan Djalil sempat meredakan amarah Wakil Perdana Menteri Taro ketika diutus Presiden Jokowi ke Tokyo, bahwa kepentingan Jepang di Indonesia lebih luas dari sekadar kereta api cepat. Seraya menawarkan proyek-proyek lain kepada sejumlah lembaga keuangan Jepang. Itu untuk menjelaskan bahwa Indonesia membuka kerjasama untuk pendanaan dalam proyek lainnya.

Entah bisa berakibat baik atau buruk bagi perekonomian Indonesia, namun menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jepang merupakan negara dengan rasio realisasi investasi paling tinggi di Indonesia, yaitu sekitar 62%. Artinya, kalau Jepang meradang lalu meninjau kembali kerjasama yang selama ini terjalin dengan Indonesia, memang bisa jadi runyam, apalagi ketika saat ini cadangan devisa kita yang semula 108 miliar dolar AS kabarnya sekarang menyusut jadi 101 miliar dolar AS gara-gara untuk intervensi agar mata uang rupiah kita tidak semakin terpuruk.

Bukan itu saja. Pada semester



I-2015, total realisasi investasi Jepang di Indonesia ada di peringkat ketiga sebesar USD 1,6 miliar atau 11,3% dari total realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA). Di tempat pertama Malaysia dengan USD 2,6 miliar, dan posisi kedua ditempati investor Singapura dengan USD 2,3 miliar.

Meski Disalip Cina, Jepang Tetap Jadi Acuan Kekuatan Ekonomi Global

Produk Domestik Bruto Cina berhasil menyalip Jepang sejak 2010, sehingga menempatkannya di urutan kedua ekonomi dunia, meskipun pendapatan per kapitanya, bahkan berdasarkan paritas daya beli, hanya sekitar seperlima Jepang. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), produk domestik bruto nominal Amerika Serikat pada 2010 adalah 14,5 triliun dolar AS, dibandingkan dengan 5,88 triliun

dolar AS untuk Cina dan 5,46 triliun dolar AS untuk Jepang.

Tak heran jika menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Geoff Hiscock, dalam bukunya *Earth Wars*, menggambarkan betapa Jepang saat ini pelan-pelan semakin dipandang enteng oleh supremasi ekonomi Cina dan India di abad-21 saat ini. Namun, kekuatan Jepang dalam bidang inovasi energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kedokteran, desain industri, keahlian produksi, komunikasi, budaya, keuangan, dan ritel masih tetap menjadi acuan global.

Jadi salah besar kalau pemerintahan Jokowi-JK hanya karena terlalu berkiblat ke Cina, lantas mengabaikan Jepang. Bahkan di lingkungan yang serba sulit pada 2010, Jepang masih tetap jadi ekonomi terbesar dunia kedua. Selain permintaan domestiknya yang tetap tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologinya, keahlian manufakturnya yang teruji-termasuk kemampuan untuk membangun pabrik-pabrik kelas dunia di luar negeri, serta jaringan perdagangan dan modal intelektual dan keuangannya, telah memastikan kelanjutan posisi penting Jepang di lingkaran bisnis global.

Pemintaan Jepang untuk energi, mineral, dan makanan juga memastikannya tetap sebagai pemain yang diperhitungkan dalam perebutan sumberdaya. Jepang saat ini merupakan importir minyak netto nomor 3 di dunia setelah Cina dan Amerika Serikat, membeli sekitar 8,5 persen perdagangan global minyak mentah dan lebih dari 30 persen LNG yang diperdagangkan.

Sekitar 45 persen dari total kebutuhan energinya berasal dari impor minyak mentah, bersumber terutama dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Iran. Jepang adalah importir batu bara terbesar di dunia. Dalam bijih besi, batu bara kokas, dan batu bara uap, investasi web, kekuatan keuangan, hubungan perdagangan jangka panjang, serta jaringan informasi mineral dan energi, Jepang sedemikian kuat sehingga tidak dapat diabaikan



Seorang petugas memberi penjelasan proses pengujian mesin saat peresmian fasilitas baru "Engine Test Bench" di pabrik Honda Prospect Motor Karawang, di Kawasan Industri Mitra Karawang, Jawa Barat, Rabu (30/9).

ketika sebuah proyek baru mencari pendukung atau pelanggan.

Jepang juga merupakan salah satu pasar makanan terbesar di dunia, terutama untuk makanan laut, daging, biji-bijian, kedelai, dan minyak sayur yang bersumber terutama dari Amerika Serikat, Cina, Asia Tenggara, dan Australia.

Meski dunia internasional mengenal merek konsumen Jepang seperti Toyota, Sony, Canon, Honda, Shiseido, dan Nintendo, nama-nama yang kurang akrab berikut inilah yang berada di garda depan pertempuran sumberdaya global:

1. JX Holdings (Didirikan dari penggabungan Nippon Oil dan Nippon Mining pada 2010).
2. BUMN Japan Oil, Gas and Metals National Corp (JOGMEC), yang

mengambilalih fungsi *sourcing* Japan National Oil Corp. Metal Mining Agency of Japan pada 2004.

3. Inpex Corp, di mana pemerintah Jepang memegang 19 persen saham.
4. Japan Petroleum Exploration Co (Japex), di mana pemerintah Jepang memiliki 34 persen.
5. Pemain Swasta Cosmo Oil dan Idemitsu Kosan.
6. Perusahaan perdagangan besar Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, ITOCHU Corp, Marubeni Corp, Sumitomo Corp, dan Sojiz Corp.

Satu lagi fakta yang kiranya sangat konyol jika pemerintahan Jokowi-JK mengabaikannya begitu saja. Kenyataan bahwa Jepang tidak memiliki sumber energi konvensional yang murah, maka negeri Sakura ini tetap merupakan pasar potensial bagi para pemasok energi dan logam dari seluruh dunia. Itu saja sudah cukup untuk memastikan bahwa bagaimanapun juga masa depan demografisnya

(kependudukannya), Jepang masih akan mempunyai kekuatan geopolitik yang patut diperhitungkan oleh dunia internasional, termasuk Cina, saingan beratnya di kawasan Asia Pasifik.

Menurut bank global HSBC dalam proyeksi tahun 2011-nya *The World in 2050*, penduduk Jepang akan turun jadi 102 juta orang, dibandingkan dengan 1,61 miliar untuk India, 1,42 miliar untuk Cina, 404 juta untuk Amerika Serikat, dan 219 juta untuk Brazil. Ekonomi Jepang masih akan diperingkat keempat menurut ukuran setelah Cina, Amerika Serikat, dan India. Dengan GDP 6,43 triliun dolar AS konstan tahun 2000.

Meneropong Persaingan Global Jepang-Cina di Asia Tenggara

Persaingan Jepang-Cina dalam merebut tender proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, sebenarnya harus dibaca bukan sekadar sebagai wujud persaingan kedua negara adikuasa tersebut sejatinya merupakan persaingan kedua negara

dalam berebut pengaruh geopolitiknya di Indonesia, bukan sekadar sebagai persaingan di bidang ekonomi. Dalam konteks ini, masuk akal juga pernyataan Sofyan Djalil bahwa kepentingan Jepang lebih luas dari sekadar kereta cepat.

Artinya selain ada pertarungan lain di sektor non ekonomi, bahkan di sektor ekonomi pun soal kereta cepat ini bukan sasaran pertarungan yang sesungguhnya dari kedua negara adikuasa tersebut.

Selain berebut pengaruh dengan Cina sebagai pemain ekonomi pendatang baru di kawasan Asia Pasifik, namun juga diwarnai oleh konflik laten yang sudah berkembang sejak Perang Dunia II. Jadi selain khawatir terhadap Cina sebagai aktor ekonomi, juga khawatir dari segi penguatan militer Jepang saat ini.

Pada paruh kedua 2011, Jepang merilis sebuah laporan militer yang membuat marah Cina. Dalam White Paper tahunannya, Kementerian Pertahanan Jepang menyebut Cina “jumawa” atau angkuh dalam menangani konflik di perairan yang dipersengketakan seperti Laut Cina Timur dan Selatan.

Dalam White Paper tahunannya itu, Jepang mengatakan bahwa sikap jumawa Cina akan membuat cemas negara-negara tetangga menyusul semakin pesatnya pembangunan militer Cina. Jepang juga mengkhawatirkan meningkatnya nilai nominal anggaran pertahanan Cina dan agresivitas militer Cina secara keseluruhan. Jepang bahkan mengingatkan Cina agar menyadari tanggungjawabnya sebagai kekuatan utama dan mematuhi aturan-aturan internasional.

Dari sini tergambar jelas betapa persaingan di sektor ekonomi hanyalah cermin dari persaingan yang jauh lebih krusial di bidang pertahanan dan sentimen sejarah masa lalu. Seperti diketahui, pada 1936 Jepang pernah menginvasi Cina dan membantai warga sipil Cina. Persaingan atas dasar sentimen sejarah dan konflik militer tersebut dijabarkan melalui sengketa perbatasan.

Seperti sengketa teritorial di Laut



Cina Timur, di mana ada tumpang tindih sekitar 40.000 km persegi di zona ekonomi eksklusif yang diklaim oleh Cina dan Jepang. Selain sumberdaya perikanan, ada potensi sengketa sumberdaya energi yang meliputi ladang gas Chunxio (dikenal sebagai ladang Shirakaba oleh Jepang), yang terletak di dalam wilayah Cina dan sedang dikembangkan oleh perusahaan minyak milik Cina CNOOC dan Sinopec. Gas pertama mengalir dari Chunxiao pada 2006. Jepang mengakui bahwa Cina beroperasi di perairan Cina, tetapi mengatakan mereka mungkin melakukan pengeboran di ladang gas yang meluas ke wilayah sengketa, di mana Jepang mungkin memiliki hak atas sebagian gas tersebut.

Tentu saja Cina menolak klaim Jepang, seperti juga Cina menolak mengakui berbagai klaim atas Laut Cina Selatan yang kaya minyak di selatan oleh Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Taiwan. Dalam berbagai kesempatan, Cina selalu mengingatkan negara-negara tetangganya bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan milik Cina.

Sedemikian gawatnya konflik geopolitik Jepang-Cina, sampai-sampai Rand Corporation, lembaga penelitian pertahanan yang disponsori Pentagon Amerika Serikat, merilis sebuah penelitian terbaru. Dalam penelitian tersebut, menemukan bahwa sengketa teritorial yang sedang berlangsung atas kepulauan Senkaku/Diaoyu yang



tumpang-tindih klaim zona ekonomi eksklusif di Laut Cina Timur terus mengganggu hubungan Cina-Jepang.

Konflik bisa timbul yang dipicu oleh sebuah insiden laut di Laut Cina Timur, atau dari eskalasi perang kata-kata yang diperkuat oleh semacam bentrokan maritim. Meskipun konflik antara Jepang dan Cina sebenarnya sudah berlangsung selama beberapa dekade. Meskipun anehnya, tingginya pertumbuhan ekonomi Cina justru tetap penting bagi perekonomian Jepang.

Cina memang mitra dagang Jepang nomor 1 untuk barang dan jasa, dengan hubungan perdagangan dua arah pada 2011 bernilai sekitar 320 miliar dolar AS. Sehingga menjadikannya sebagai salah satu arus perdagangan bilateral terbesar di dunia, hanya dilampaui oleh perdagangan Cina dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Bahkan Cina pun merupakan tujuan utama bagi investasi Jepang. Perusahaan-perusahaan Jepang telah melaksanakan lebih dari 43.000 proyek Cina selama tiga dekade terakhir, dengan banyak investasi dalam produk jadi seperti elektronik, barang-barang konsumen lainnya, dan kendaraan bermotor, yang ditujukan untuk pasar global.

Waspada JX Holdings Bermain Bisnis Energi di Indonesia

Kalau Menteri PPN Ketua Bappenas Sofyan Djalil mengatakan kepentingan Jepang di Indonesia lebih luas dari sekadar kereta cepat, maka manuver JX Holdings di sektor bisnis energi kiranya perlu diwaspadai, mengingat agenda strategis pemerintahan Jokowi-JK nampaknya fokus di eksplorasi gas di lepas pantai atau *off-shore* di bawah payung Program Poros Maritim.

JX Holdings, merupakan perusahaan energi dan sumberdaya terpadu terbesar di Jepang, dengan omzet sekitar 115 miliar dolar AS setahun hingga Maret 2011 dari eksploitasi, pengilangan, dan operasi pemasaran minyak bumi dan bisnis logam yang dibangun di sekitar tembaga dan bahan elektronik.

Perusahaan ini mempunyai aset minyak dan gas luar negeri di Vietnam, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Papua Nugini, Australia, Laut Utara, Teluk Meksiko, Abu Dhabi, dan Qatar.

Kenyataan bahwa Sofyan Djalil menyebut telah melobi lembaga-lembaga keuangan di Jepang, memperkuat dugaan bahwa sasaran sesungguhnya Jepang adalah memperoleh konsesi eksplorasi dan eksploitasi gas laut di Indonesia. JX Holdings merupakan perusahaan yang relatif baru, yang terbentuk melalui penggabungan Nippon Oil

dan Energy pada 2010. Perusahaan tersebut dimiliki 42 persen oleh lembaga-lembaga keuangan Jepang, sementara investor luar negeri, termasuk pemerintah Singapura memegang 31 persen.

Nippon Oil mulai hidup pada 1888. Perusahaan itu bergabung dengan Mitsubishi Oil pada 1999, kemudian melalui serangkaian konsolidasi dengan berbagai perusahaan pengilangan, petrokimia, dan produsen gas dalam tahun 2000-an, sebelum bergabung dengan Nippon Mining. Perusahaan tersebut sejauh ini memiliki jumlah outlet ritel bensin terbanyak di Jepang, dengan pangsa pasar sekitar 34 persen.

Di sisi logam, Nippon Mining merupakan salah satu *smelter* tembaga terbesar di dunia dan memiliki saham di tambang tembaga Escondida, Callahuasi, dan Los Pelambres di Chili.

Apakah hal ini mengindikasikan bahwa dalam menyasar sektor migas dan energi tambang di Indonesia, Jepang akan mengandalkan JX Holdings sebagai pasukan garis depan? Jika benar, berarti kekalahan Jepang dalam berebut tender dari Cina dalam proyek kereta cepat, jangan-jangan sekadar strategi pengelabuan belaka. Karena kereta jadi seperti mainan kecil belaka.

Apalagi selain JX Holdings, ada juga Idemitsu Kosan, pemain energi Jepang yang lain lagi, yang memegang saham di beberapa ladang minyak Inggris dan Norwegia di laut utara, dan menjadi investor di sana bersama Osaka Gas. Idemitsu juga mengeksplorasi wilayah barat Kepulauan Shetland, dimana ia mendapat penemuan minyak dan gas mulai pada 2009 lalu dan seterusnya. Dalam bisnis energi non minyak, Idemitsu menambang sekitar 10 juta ton batu bara per tahun melalui anak perusahaan di Australia, dan juga memiliki saham di perusahaan uranium Cigar Lake di provinsi Saskatchewan, Kanada. Selain itu, Idemitsu dikenal memiliki proyek tenaga angin, panas bumi, biofuel dan *fuel cell*. • Hendrajit

Kereta (Setengah) Cepat

Proyek kereta cepat yang digagas pertama kali oleh Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Tiongkok menjelang akhir Maret 2015 menuai banyak pro kontra. Bisnis kereta cepat tersebut dinilai tidak mengukur ekosistem yang ada, bahkan ada yang menilai menteri BUMN tidak transparan dalam menunjuk Tiongkok sebagai pemenang.

Rute kereta cepat yang dirancang adalah kereta cepat dari Stasiun Gambir di Jakarta sampai dengan Stasiun Gedebage di Bandung, Jawa Barat. Jalur tersebut memiliki panjang 150 kilometer dengan nilai investasi, setelah dihitung ulang, menjadi USD5,5 miliar atau sekitar Rp 74 triliun. Tentunya nilai investasi tersebut terbilang besar bagi negara, belum lagi *multiplier effect* yang diharapkan muncul dari proyek tersebut. Namun, pemerintah tidak mau mengambil risiko kerugian jika nantinya proyek tersebut gagal.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kriterianya cuma satu, kereta cepat tidak boleh menggunakan APBN," kata Menkeu Bambang.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga menegaskan proyek kereta cepat tidak boleh memakai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, hanya proyek-proyek pembangunan kereta di luar Pulau Jawa yang memakai APBN. "Harus pakai swasta, tidak boleh pakai APBN," tegas dia.

Jika 'Tidak memakai APBN' menjadi kata kunci pemerintah dalam penentuan pemenang proyek tersebut, maka jelaslah pemerintah berada di pihak Tiongkok ketimbang Jepang. Pasalnya, tawaran Tiongkok



Presiden Jokowi (kiri) meninjau Transportasi Massal Terintegrasi di Stasiun Dong Zhi Men Beijing Tiongkok, pada 26 Maret 2015 lalu.

dalam proyek kereta cepat ini tidak melibatkan APBN secara langsung. Sementara, skema pembiayaan dari Jepang ada potensi masuknya uang pemerintah dari APBN.

Sedangkan pihak Jepang menawarkan biaya proyek kereta cepat Shinkansen E5 hingga USD6,223 miliar atau sekira Rp87 triliun. Tawaran Jepang ini lebih mahal daripada Tiongkok untuk kereta cepat CRH 380A senilai USD5,585 miliar atau sekira Rp74 triliun.

Tawaran Jepang dalam pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini berasal dari tiga sumber, yaitu: anggaran pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta atau *business entity* (SPV). BUMN berperan sebagai pengembang proyek (*project development*), sedangkan swasta sebagai pelaksana proyek (*project operating*).

Jepang punya empat skenario pembiayaan yang seluruhnya melibatkan dana pemerintah, BUMN, dan swasta. Pada skenario pertama, pemerintah berperan dalam pembiayaan hingga 16 persen yang berasal dari pinjaman dan modal. Lantas, BUMN mengambil peran pembiayaan hingga 74 persen mencakup modal dan pinjaman.

Menteri BUMN Rini Sumarno (belakang kedua kiri) menyaksikan penandatanganan kerjasama pinjaman antara Presiden Eksekutif Bank Pembangunan Tiongkok Zeng Zhihe (kedua kanan) dan Bank BUMN yang diwakili oleh Direktur Utama BRI Asmawi Syam (kiri), Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin (tengah) dan Direktur Utama BNI Achmad Baiquni (kanan) di Beijing, Rabu (16/9).

Sementara itu, peranan swasta mencapai 10 persen yang terdiri dari modal dan pinjaman.

Pada skenario kedua, peranan pemerintah tetap 16 persen. Kemudian, BUMN sebesar 70 persen, swasta sebanyak 14 persen.

Skenario ketiga, peranan pemerintah tetap 16 persen, BUMN sebesar 60 persen, dan swasta sebanyak 24 persen. Skenario keempat, peranan pemerintah 6 persen terhadap pembiayaan, BUMN tak ada, dan sebanyak 94 persen ditanggung swasta.

Selain itu, proses pengerjaan proyek kereta cepat meliputi 3 tahapan; Pertama, fase persiapan yang mencakup pembebasan lahan, pembiayaan awal, dan kelembagaan yang dikerjakan oleh pemerintah.

Kedua, fase konstruksi mencakup konstruksi, instalasi, pengadaan kereta, pra pengoperasian dikerjakan oleh BUMN atau swasta. Ketiga, operasi mencakup pengoperasian dan perawatan mencakup BUMN atau swasta.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno



mengatakan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan Tiongkok dengan skema *Business to Business* (B to B), yakni melalui konsorsium Tiongkok dan konsorsium BUMN Indonesia.

"Keputusan pemerintah adalah kereta cepat tetap dibangun, namun skemanya harus *business to business*, tidak menggunakan anggaran negara, tidak memakai jaminan pemerintah. Nah, yang memenuhi syarat adalah proposal China," kata Menteri BUMN Rini Soemarno.

Namun, keputusan terakhir tetap di presiden Joko Widodo. Semula diajukan kereta cepat atau High Speed Railways (HSR) akhirnya berubah menjadi kereta menengah. Pemerintah menilai, kereta cepat dengan rencana jarak 150Km akan sulit untuk mencapai kecepatan maksimum.

"Keputusan presiden jangan kereta cepat, cukup kereta api menengah yang kecepatannya 200-250Km/jam. Berbeda 11 menit, tapi biayanya bisa 30-40 persen lebih murah," ujar Menko Darmin.

Kereta api cepat untuk mencapai

kecepatan maksimum membutuhkan waktu 14 menit. Sedangkan jarak Jakarta-Bandung dengan 5-8 stasiun harus berhenti sebelum 14 menit, artinya kecepatan kereta hanya mencapai 200km/jam.

Untuk membiayai pembangunan kereta cepat, Menteri BUMN bertolak ke Tiongkok bersama dengan tiga bank BUMN. Rini memastikan bahwa Tiongkok menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia, yakni pembangunan murni bisnis, tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN. Pembangunan kereta cepat tersebut melibatkan perwakilan konsorsium asal negeri Tiongkok dengan konsorsium BUMN. Konsorsium Tiongkok yang akan memimpin proyek ini adalah China Railways Construction Corporation Limited. Sementara konsorsium BUMN digawangi oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan anggota PT KAI (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

'Dikalihkannya Jepang' dalam

tender kereta cepat direspon oleh wakil ketua komisi I Tantowi Yahya. Dirinya menilai keputusan Jokowi menunjuk pemenang tanpa *beauty contest* dinilai tidak beretika.

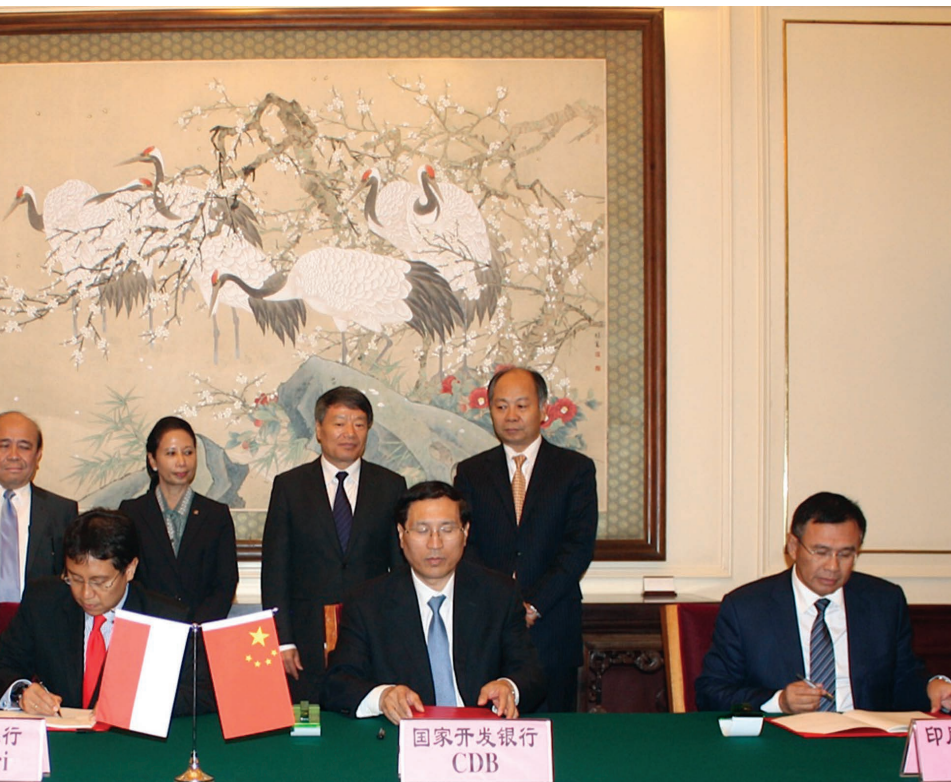
"Bagi Jepang, kalah dalam persaingan bisnis adalah hal yang biasa. Tapi dikalahkan dengan cara-cara tidak etis menjadi hal yang tidak biasa. Seharusnya keputusan strategis tidak hanya dilihat dari perspektif untung dan rugi, tapi secara politik juga. Dalam hubungan luar negeri, jalinan persahabatan dua negara bermuara pada sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu," jelasnya.

Pemerhati ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai proyek kereta cepat yang digagas Presiden Jokowi bukan hal yang mendesak untuk dilakukan saat ini. Dirinya menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan kereta cepat Merak-Semarang-Banyuwangi.

"Jakarta-Bandung itu sudah selesai dengan Cipularang. Lebih baik buat kereta cepat dari Merak-Semarang-Banyuwangi. Jakarta-Bandung itu urusan Pemda-nya masing-masing," jelasnya.

Secara ekonomi, proyek tersebut tentunya akan menimbulkan multiplier efek dan kepentingan bisnis. Pemerintah sudah seharusnya tidak hanya membebaskan tanah dan membangun kereta cepat, namun ikut juga terjun dalam pembangunan bisnis pendukung di setiap stasiun pemberhentian. Jangan sampai, pemerintah membuat kereta cepat dengan resiko hubungan baik Indonesia-Jepang memburuk, justru keuntungan didapatkan para taipan-taipan modal asing dengan pembangunan Mall perumahan, apartemen, tempat wisata, industri dan lain sebagainya.

Sudah seharusnya BUMN mengambil langkah untuk mengembangkan bisnis pendukung. Apabila bisnis tersebut menguntungkan, maka keuntungan akan kembali ke rakyat, sesuai dengan hakekat BUMN, dari rakyat, kembali untuk rakyat. o Ismed Eka





RUU KPK: ENAM CATATAN ROMLI ATMASASMITA

Sebanyak 45 anggota DPR dari enam fraksi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nasdem, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan, agar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi direvisi.

Revisi UU KPK itu pun digodok Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015 atas usulan 45 anggota dari enam fraksi itu. Namun, atas revisi yang disodorkan oleh kebanyakan partai pendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo itu menuai kritikan. Pasalnya, dalam revisi RUU KPK itu dinilai bukan untuk memperkuat lembaga *ad hoc* itu, melainkan memperlemah lembaga superbodi itu.

Aktual sempat berbincang dengan pengagas UU KPK Prof Romli Atmasasmita soal polemik tersebut.

Meski dia setuju dengan enam fraksi di DPR tapi pakar hukum pidana dari Universitas Padjajaran ini memberi catatan khusus bahwa KPK jangan diperlemah. Aktual merangkum enam catatan penting dari Prof Romli soal itu. Berikut rangkumannya.

Kenapa KPK harus diawasi oleh Dewan Pengawas?

RUU KPK harus memuat yang pertama, soal pembentukan dewan pengawas dimana dewan pengawas itu harus diangkat oleh Presiden, di luar struktur KPK. Karena sifatnya di

luar internal KPK. Ini agar KPK tidak bertindak di luar koridor hukum, maka perlu pengawasan.

Dalam Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan, bahwa penyadapan yang dilakukan KPK dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan. Sedangkan dalam revisi tersebut, kewenangan itu justru direduksi, dan menyatakan bahwa penyadapan KPK harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri?

Penyadapan tetap diatur rinci batasan-batasannya dong! Itu tetap saja ada penyadapan, tanpa ada izin. Tapi harus ada syarat-syaratnya, siapa yang disadap, alasan kenapa menyadap. Berapa lama yang mau disadap, harus ada pembatasannya. Itu harus dirinci dan secara jelas.

Terkait dengan penanganan perkara korupsi, KPK hanya boleh menangani kasus sebesar Rp30 miliar?

Itu cukup mengubah Pasal 11, nilai Rp 30 miliar di atas dan penyelenggara dan aparatur negara yang ditangani. Kalau di bawah Rp 30 miliar, biarkan saja Kepolisian dan Kejaksaan. Biarkan mereka bekerja, itu sikapnya koordinasi supervisi (korsup), bisa berkoordinasi. Tujuannya agar Kejaksaaan dan Kepolisian bekerja.

Lalu bagaimana soal ketentuan tentang pengangkatan penyidik dan penuntut?

Dalam hal ini, harus ditegaskan, penyidik itu dari mana dan siapa? Penyidik yang diangkat KPK atau dari Polri, selama ini kan multitafsir,

ada yang bilang dari Polri, ada yang menyebut independen. Nah saya kira itu harus jelas. Makanya perlu.

Pasal soal kewenangan penuntutan KPK yang diatur dalam Pasal 6 ayat c dan pasal 8 ayat (2) UU KPK. Ini juga menjadi salah satu poin penting yang dianggap sebagai langkah untuk mengampulasi kewenangan KPK. Dalam naskah akademik (NA) revisi itu, disebutkan bahwa kewenangan penuntutan yang selama ini sudah menjadi salah satu kewenangan KPK, perlu dihilangkan dan dikembalikan menjadi kewenangan Kejaksaan?

Tidak perlu ada batas waktu sebenarnya. Kan susah mengukur batas waktu kerja efektif Kepolisian dan Kejaksaan. Biarkan saja bekerja, seperti halnya di Hongkong jalan terus, mereka tetap berjalan meski ada KPK. Sekalipun mereka sudah terbaik. Nah itu harus jalan terus.

Yang terakhir soal koordinasi supervisi (korsup). Harusnya seperti apa?

Tetap, tapi diperluas ke Kementerian dan Lembaga serta kewajiban kerjasama dengan inspektorat dan Satuan Pengawasan Internal (SPI). Bukan penyidikan saja, tetapi pencegahan dia bisa masuk dalam ke setiap Kementerian dan Lembaga melakukan koordinasi dengan supervisi, selama ini korsup di KPK hanya penindakan, jadi di harus perluas. Terus yang terpenting, anggaran ditambah karena saat ini kan tidak cukup. Itu yang terpenting, karena dengan keadaan saat ini tidak cukup. /Wisnu Yusop



Akhirnya, Revisi UU KPK Ditunda

Di tengah ketidakpastian hukum, DPR justru sibuk memberikan tanggapan terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mereka anggap 'superior'. Entah takut, atau memang punya niat memperbaiki penegakan hukum di tanah air, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK seakan menjadi agenda penting para penghuni kompleks Parlemen. Kendati demikian, rencana tersebut justru mendapatkan kecaman dari masyarakat karena dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap KPK.

Pro dan kontra revisi UU KPK, bukan hanya kali ini. Sebelumnya, pada 2012 juga terjadi pembahasan yang sama. Namun perbedaannya, pada 2012 lalu seluruh fraksi DPR menolak rencana pemerintah itu. Tapi sekarang para wakil rakyat justru berbalik 180 derajat.

Enam dari sepuluh fraksi di DPR menyetujui adanya perubahan beberapa Pasal yang terdapat dalam UU tersebut, sedangkan satu fraksi sisa, masih labil menentukan sikap.

Pembahasan revisi UU KPK pertengahan Oktober 2015 sudah masuk ke tahap tanggapan fraksi. Komisi III menyetujui bahwa perubahan peraturan tersebut sudah layak untuk dibahas dalam sidang Paripurna. Sejauh ini, fraksi yang secara gamblang setuju adanya perubahan UU KPK yakni fraksi PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, Hanura, dan PPP. Sedangkan yang jelas-jelas menolak ialah fraksi Gerindra, PKS dan Demokrat. Dan PAN masih belum menuntukan sikap politiknya.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki menyatakan bahwa pihaknya akan terus 'melawan' rencana pemerintah

untuk merevisi UU tersebut. Dia mengklaim jika Presiden Joko Widodo juga mempunyai pandangan yang sama terkait revisi UU KPK. Patut dipertanyakan ihwal penolakan Jokowi. Pasalnya, pada 23 April 2015 Jokowi layangkan surat mengenai sambutan singkat atas penyelesaian pembahasan RUU tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam surat tersebut Presiden menyatakan harapannya agar Perppu tersebut bisa disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Hal ini berbanding terbalik dengan pengakuan yang disampaikan Plt Komisioner KPK, baik itu Ruki maupun Indriyanto Seno Adji. Keduanya justru menyatakan bahwa Jokowi menolak perubahan UU KPK.

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Polhukam Luhut Pandjaitan (kedua kanan) dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kanan) menggelar rapat konsultasi dengan Ketua DPR Setya Novanto (kelima kiri) dan empat Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto (keempat kiri), Fadli Zon (ketiga kiri), Taufik Kurniawan (kedua kiri) dan Fahri Hamzah (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10). Pemerintah dan DPR menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang tentang KPK ditunda hingga masa persidangan tahun depan guna fokus kepada penguatan ekonomi.

Sejauh ini belum ada draf resmi mengenai revisi UU KPK, yang menjadi bahan pembahasan di DPR ialah melalui naskah akademik (NA). Dalam NA tersebut terdapat perubahan secara substansi dalam Pasal-pasal yang justru dinilai sebagai ruh dibentuknya KPK. Perubahan terhadap Pasal tersebut juga menjadi perdebatan alot, lantaran dianggap menjadi dasar mengapa banyak kalangan menyebut revisi tersebut merupakan upaya pelemahan KPK.

Setidaknya terdapat lima Pasal krusial, yang menjadi sasaran perubahan. Pertama Pasal 12 yang mengatur tentang Penyadapan (interception). Dalam Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan, bahwa penyadapan yang dilakukan KPK dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan. Sedangkan dalam revisi tersebut, kewenangan itu justru direduksi, dan menyatakan bahwa penyadapan KPK harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Kedua ialah mengenai kewenangan penuntutan KPK, yang diatur dalam Pasal 6 ayat c dan pasal 8 ayat (2) UU KPK. Ini juga menjadi salah satu poin penting yang dianggap sebagai langkah untuk mengamputasi kewenangan KPK. Dalam NA revisi itu, disebutkan bahwa kewenangan penuntutan yang selama ini sudah menjadi salah satu kewenangan KPK, perlu dihilangkan dan dikembalikan menjadi kewenangan Kejaksaan.

Ketiga yakni perihal penghentian perkara. Jika merujuk pada Pasal 40 UU KPK, salah satu lembaga produk Demokrasi ini tidak berhak menerbitkan surat penghentian

penyidikan dan penuntutan kewenangan untuk menghentikan perkara, yang didalam KUHAP disebut dengan SP3. Namun, dalam NA revisi UU KPK aturan ini tidak akan diberlakukan. Tertuang dalam naskah tersebut, bahwa KPK harus diberikan kewenangan SP3 atau surat keputusan penghentian penuntutan. Alasannya, adalah sebagai alat kontrol jika terjadi kesalahan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Selanjutnya, dalam naskah tersebut juga membahas mengenai adanya perubahan terhadap aspek pencegahan KPK, yang tertuang dalam Pasal 6. Terdapat beberapa kasus dimana KPK sebenarnya sudah mengetahui rencana penyelenggara negara atau pihak swasta yang melakukan tindak pidana korupsi. Namun, hal itu dibiarkan sampai tindak pidana korupsi itu terjadi. Sedangkan dalam perubahannya nanti, jika KPK mendapatkan rencana seseorang melakukan tindak pidana korupsi, diharuskan melakukan upaya pencegahan lebih dulu. Alasannya adalah untuk memaksimalkan fungsi pencegahan dengan memberikan peringatan kepada atasan penyelenggara negara tersebut agar dapat dilakukan pembinaan.

Beralih ke Pasal 30, yang juga jadi target revisi. Dalam Pasal 30 UU KPK tidak disebutkan mengenai keharusan KPK untuk melimpahkan suatu kasus ke pihak Kepolisian ataupun Kejaksaan dengan merujuk



kepada perhitungan kerugian negara. Nantinya, KPK diharusnya untuk melimpahkan semua kasus yang perhitungan kerugian negaranya kurang dari Rp50 miliar. Dengan demikian, lembaga antirasuah hanya akan diberikan kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negaranya lebih dari Rp 50 miliar.

Dan poin terakhir yang cukup membuat para pendukung KPK bertanya-tanya ialah terkait pembubaran KPK. Dalam NA tersebut dituangkan mengenai aturan pembentukan KPK yang hanya memiliki usia 12 tahun. Jika revisi tersebut disetujui oleh Jokowi, KPK hanya memiliki usia 12 tahun sejak disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2015.

Berbagai Pasal yang direvisi menurut Indriyanto Seno Adji nantinya justru akan memotong kewenangan lembaga antirasuah. Jika revisi itu terjadi, pakar hukum pidana Universitas Indonesia menilai KPK akan menjadi lembaga 'public state institution', lantaran kewenangan khususnya sudah diamputasi.

Bola Liar Revisi UU KPK

Pemerintah dan DPR RI seakan saling melemparkan 'bola panas' revisi UU KPK. Keduanya seakan tidak mau dicap 'pelindung koruptor' lantaran mereduksi kewenangan KPK. Kementerian Hukum dan HAM sebagai wakil Presiden Jokowi, juga tidak mau pimpinannya dianggap ingkar terhadap Nawacita. Demikian pula DPR, sekumpulan orang yang katanya wakil rakyat itu juga tidak mau dianggap sebagai penjual nama rakyat untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Karena kita ketahui, tidak sedikit para anggota DPR yang juga tersebut pusaran korupsi.

Sebagai penangkal 'bola panas' revisi UU KPK, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menegaskan bahwa rencana itu bukan datang dari pemerintah, melainkan dari DPR. Dia menyatakan, secara garis besar revisi tersebut merupakan usulan

DPR. Namun demikian, dia tidak menampik jika pemerintah memang mengajukan adanya Perppu. Politikus PDI-P itu mengklaim, dalam Perppu tersebut pemerintah hanya akan merevisi aturan ihwal pengangkatan pelaksana tugas Komisioner KPK.

Menurut Yasonna, jika usulan pemerintah itu ingin disetujui, harus ada mahar yang diberikan pihak pemerintah ke DPR. Pria lulusan North Carolina University itu mengungkapkan, agar Perppu itu diterima DPR meminta adanya revisi beberapa Pasal yang tertuang dalam UU KPK. Hal itulah yang menurut Yasonna dijadikan senjata oleh DPR, agar seakan-akan rencana revisi UU KPK berasal dari pemerintah.

"Bukan. Dari dulu, kan, revisi garis besarnya diusul DPR. Komisi III menginginkan mereka menerima perpu KPK tapi ada usul revisi. Jadi seolah-olah (revisi) datang dari kami" kata Yasonna di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat, 9 Oktober 2015.

Anggota Badan Legislasi DPR, Muslim Ayub mengatakan usulan revisi UU KPK menggunakan draf rancangan yang sempat diusulkan pemerintah. DPR menurutnya hanya melanjutkan inisiatif yang disampaikan pemerintah. Politikus dari Partai Amanat Nasional itu bahkan menyindir pemerintah supaya tidak menutupi bahwa merekalah yang sebenarnya berinisiatif untuk merevisi UU KPK. Dia berkilah, rancangan revisi UU yang diusulkan DPR kali ini sepenuhnya merujuk pada draf yang pernah diusulkan pemerintah sebelumnya.

"Kalau inisiatif draf dari DPR kenapa lambangnya ada lambang Presiden (di draf). Ini pemerintah tidak berterus terang juga ini. Harusnya draft itu kan dari kami sebagai pengusul, tapi draf itu dari pemerintah. Ini yang harus kita bereskan dulu," kata Ayub saat ditemui di gedung DPR, Rabu, 7 Oktober 2015.

Revisi UU KPK Tabrak Nawacita Jokowi

Jokowi dan Jusuf Kalla

merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Poin keempat dalam Nawa Cita Jokowi-JK yakni menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dalam kampanyenya, juga di hadapan Abraham Samad, yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK, Jokowi berkali-kali mengeluarkan pernyataan akan memperkuat KPK.

Sekarang Jokowi sudah menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan Indonesia. Namun, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan, khususnya rencana revisi UU KPK, justru dianggap bertabrakan dengan Nawa Cita yang diusung Jokowi. Demikian pula yang kekecewaan yang disampaikan para pendukungnya, yang tergabung dalam organisasi bernama 'Projo'.

"Kami menolak usulan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam Nawacita jelas agenda pemberantasan korupsi adalah agenda yang menjadi tekad perjuangan kita bersama. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah program prioritas pemerintahan Jokowi," tegas Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, dalam siaran persnya, Kamis, 8 Oktober 2015.

Jikalau Jokowi cerdas, KPK seharusnya bisa menjadi ujung tombak untuk merealisasikan Nawa Cita, dan saling beriringan dengan pemerintah dan DPR. Tapi, yang terjadi justru pemerintah dan DPR terlihat gusar dengan keberadaan KPK. Poin-poin yang ingin direvisi memang tidak melemahkan, namun berdampak negatif yang lebih besar. Revisi UU KPK justru dinilai bertabrakan dengan Nawa Cita yang diusung Jokowi.

"Sebetulnya KPK ini bukan sebagai penghalang, penghalang adanya Nawa Cita. Tapi KPK adalah beriringan dengan Nawa Cita ini, supaya saling melengkapi.



Pemerintah ataupun Jokowi bukan melemahkan, memang benar bukan melemahkan tapi menghancurkan KPK. (Revisi UU KPK) iya akan bertabrakan. Seharusnya dua-duanya itu bertobatlah. Kita tahu DPR itu tidak akan nyaman dengan adanya KPK. Pemerintah tidak akan nyaman dengan adanya KPK," ujar aktivis anti-korupsi, Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Selasa (13/10).

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pembahasan

Dua dari tiga Plt Pimpinan KPK, Taufiequrrachman Ruki dengan Indriyanto Seno Adji secara tegas menolak adanya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang lembaga tempat mereka bernaung. Ruki yang menjabat sebagai Plt Ketua KPK secara gamblang menegaskan bahwa pihaknya akan 'melawan' segala upaya yang bertujuan untuk melemahkan kewenangan KPK



Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (kanan) mengikuti aksi para alumni lintas perguruan tinggi yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi (GAK) bersama mahasiswa perguruan tinggi di halaman Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/10).

membatalkan revisi tersebut ialah dengan mengajukan ‘judicial review’ ke Mahkamah Agung.

Pernyataan sikap baik dari berbagai elemen masyarakat dan KPK sendiri lambat laun membuat telinga para anggota dewan yang bersikukuh bahwa UU Kpk harus direvisi, menjadi gatal. Para wakil rakyat, yang memang lebih menjadi sorotan ketimbang pemerintah, selalu didesak untuk menunda pembahasan revisi UU KPK.

Desakan itu pun akhirnya membuahkan hasil, meski hanya bersifat sementara. Jokowi dan pimpinan DPR sepakat untuk menunda pembahasan revisi UU KPK. Kesepakatan itu muncul setelah kedua belah pihak menggelar rapat konsultasi di Istana Negara pada 13 Oktober 2015. Alasan penundaan itu, lantaran kedua belah pihak sepakat untuk melihat kondisi ekonomi.

“Kami sepakat mengenai penyempurnaan UU KPK itu. Kami masih menunggu persidangan yang akan datang, karena pemerintah masih perlu melihat ekonomi secara lebih baik,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Panjaitan.

Lulusan terbaik Akademi Militer Nasional 1970 itu mengatakan, bahwa saat ini pemerintah akan fokus menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Pemerintah menilai penyelesaian RAPBN lebih penting ketimbang memikirkan revisi UU KPK.

Namun demikian, belum jelas siapa yang berinisiatif untuk menunda pembahasan revisi UU KPK. Pasalnya, Luhut sendiri sempat mengatakan, soal pembahasan revisi UU KPK pemerintah akan mengikuti pola permainan DPR. Di hari yang sama, Baleg DPR juga menunda pembahasan tersebut, dengan alasan belum adanya draf mengenai penyempurnaan dari revisi UU KPK. © Mochammad Zaky Kusumo

sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Penegasan Ruki disampaikan ketika KPK digeruduk oleh Gerakan Anti Korupsi (GAK) Alumni Lintas Perguruan Tinggi. Kedatangan GAK adalah untuk mendukung ‘perlawanan’ yang akan dilakukan KPK terhadap rencana revisi UU tersebut. Seakan kembali memulihkan semangat pemberantasan korupsi, Ruki yang menyambut kedatangan GAK berdiri tegak di depan pintu lobi gedung KPK.

Seketika para anggota GAK menghampiri Ruki, dia pun lantas menyambut kedatangan para akademisi itu. Seperti seorang orator yang tengah membakar semangat para demonstran, Ruki pun mulai berceletoh. Meski tak banyak, namun beberapa kalimat yang dia sampaikan sudah cukup menegaskan sikap terhadap rencana pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK.

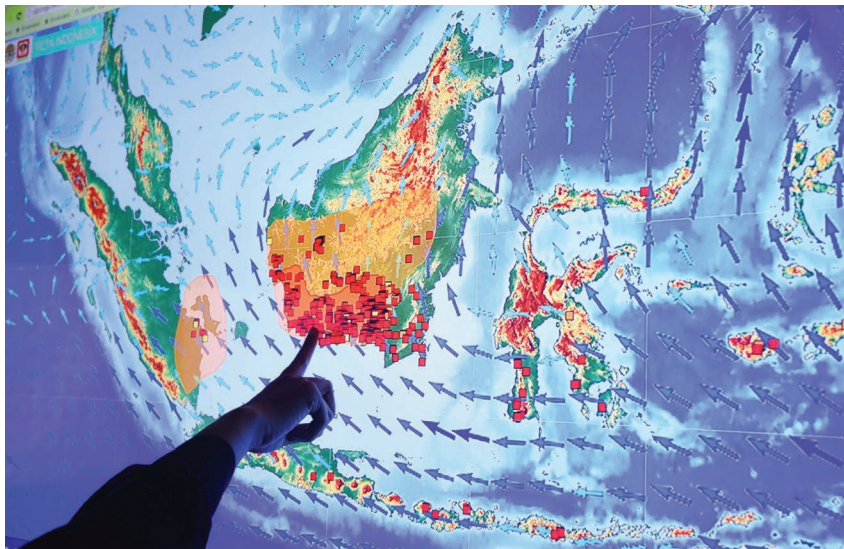
Kondisi gedung ‘angker’ bagi para

koruptor itu semakin hangat bahkan cenderung panas. Para anggota GAK yang memakai ikatan kepala berwarna merah bertuliskan ‘save KPK’ terlihat memadati pelataran gedung KPK. Banner sepanjang lima meter, bertuliskan ‘Tolak Revisi UU KPK’ juga tak ketinggalan melambangkan panji perlawanan kaum akademisi.

“Kehadiran alumni lintas perguruan tinggi sangat memperkuat semangat kami untuk maju terus, lawan. Tidak ada kata-kata lain kecuali lawan (revisi UU KPK),” tegas Ruki, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2015.

Sedangkan Indriyanto menyatakan, pihaknya siap melakukan perlawanan hukum jika revisi UU KPK itu tetap disahkan. “KPK siapkan langkah hukum apabila RUU revisi disahkan,” jelas Indriyanto, Kamis, 8 Oktober 2015. Satu-satunya langkah hukum yang bias digunakan KPK untuk

Kebakaran Hutan Kalbar: 33 Kasus Diproses, 25 Tersangka



Kepolisian Daerah Kalimantan Barat hingga saat ini sudah memproses sebanyak 33 kasus pembakaran lahan yang menyebabkan kabut asap dalam beberapa bulan terakhir.

Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Arianto mengatakan dari 33 kasus sudah 25 orang ditetapkan sebagai tersangka. Semuanya perorangan atau masyarakat yang membakar lahannya untuk aktivitas pertanian atau perkebunan.

Polda Kalbar juga sedang melakukan penyidikan terhadap tiga perusahaan yang diduga melakukan pembakaran saat membersihkan lahannya,

“Dua perusahaan di Kabupaten Ketapang yakni PT KAL yang berlokasi di Dusun Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, kemudian PT SKM berlokasi di Desa Tanjung Pasar dan Desa Suka Maju Kecamatan Muara Pawan,” kata Arianto, di Pontianak, Sabtu (10/10).

Sedangkan satu perusahaan lagi, yakni PT RJP berlokasi di Dusun Teluk Binjai, Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, katanya.

“Ketiga pimpinan perusahaan itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh kami, dan masih dalam proses penyidikan sehingga belum ditetapkan sebagai tersangka,”

ungkapnya.

Data sementara dari Polda Kalbar mencatat, adapun luas lahan yang terbakar, yakni sekitar 525 hektare yang sudah diidentifikasi, diantaranya di wilayah Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya sekitar 22 hektare, Sambas 14,5 hektare, Bengkayang 2,7 hektare, Landak tujuh hektare, Sanggau 110 hektare, Sekadau 16 hektare, Melawi 60 hektare, Sintang 111 hektare, Kapuas Hulu 12 hektare, dan di Kabupaten Ketapang 33 hektare, kata Arianto.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Komisaris Besar (Pol) Agus Nugroho menyatakan, dalam menangani kasus korporasi, penyidik harus berhati-hati. Teknis yang dilakukan penyidik adalah mengumpulkan keterangan ahli dari dinas perkebunan dan dinas kehutanan, mengumpulkan barang bukti di lapangan, baik dari masyarakat hingga ke karyawan perusahaan.

Dari pantauan di lapangan, asap tipis kembali menyelimuti Kota Pontianak dan sekitarnya, karena dalam beberapa hari terakhir tidak diguyur hujan, sebelumnya Pontianak dan sekitarnya sempat diguyur hujan cukup lebat, sehingga mengurangi ketebalan asap akibat terbakarnya hutan dan lahan di Provinsi Kalbar. /M Vidia Wirawan-Ant

Matikan Syaraf Libidonya!

Pelaku kejahatan seksual harus diberi sanksi berat yang bisa memberi efek jera. Usulan muncul, salah satunya mematikan syaraf libido. Usulan itu tak lain disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Kata Khofifah, usulan mematikan untuk adanya pemberatan hukum sebenarnya sudah pernah disampaikan Februari lalu.

“Mereka yang predator ini sudah seyogyanya diberikan hukum berat antara lain dimatikan syaraf libidonya,” kata dia, di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10).

Tak mau timbul perdebatan lebih jauh, Khofifah menjelaskan yang dimaksud mematikan syaraf libido bukan berarti mengamputasi kelamin si pelaku atau kebiri.

Tetapi, ujar dia, dimatikan dengan mengoleskan zat kimia tertentu atau bisa juga melalui operasi yang dapat mematikan syaraf libido predator kejahatan seksual. “Saya diberikan keterangan operasi mematikan syaraf libido ini bukanlah operasi berat,” kata dia. /M Vidia Wirawan-Ant



Tersangka Pembunuhan Salim 'Kancil' Jadi 24 Orang

Polda Jawa Timur terus melakukan pengembangan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kasus pembunuhan dan pertambangan ilegal di Desa Selok Awar-awar, Pasirian, Lumajang.

Jumlah tersangka terus bertambah. Disampaikan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Argo, sejauh ini sudah ada 31 orang yang jadi tersangka. Sejumlah 13 tersangka untuk kasus pertambangan ilegal, dan 24 tersangka untuk kasus pembunuhan aktifis petani, Salim Kancil.

Argo tidak menampik kemungkinan jumlah tersangka terus bertambah berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi yang bisa naik statusnya jadi tersangka. Sebab dari pemeriksaan, ada beberapa item yang mengarah pada status tersangka. Hanya saja, penyidik masih membutuhkan beberapa alat bukti untuk menetapkan sebagai



status tersangka.

“Diduga ada orang-orang lain lagi yang terlibat penambangan. Perlu diketahui, dari 31 tersangka, di antaranya ada yang terlibat dalam dua kasus tersebut.” ujar dia, Selasa (6/10).

Contohnya, seperti kepala Desa

Selok Awar-awar, Hariono. Selain jadi tersangka untuk kasus pembunuhan Salim Kancil, dia juga jadi tersangka dalam kasus pertambangan ilegal. Seluruh tersangka, lanjutnya, dibagi menjadi enam berkas. Dua berkas di antaranya diberikan pada kejar Lumajang. /M Vidia Wirawan-Ahmad H. Budawan

Ada 12 Perusahaan jadi Tersangka Pembakaran



Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya sudah menyematkan status tersangka ke 12 perusahaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

“Sampai dengan 12 Oktober 2015, korporasi yang dijadikan tersangka sudah 12,” kata dia dalam konferensi pers di kantor Kemenkopluhukam, Jakarta, Senin (12/10).

Badrodin menuturkan dari seluruh perusahaan yang sudah dijadikan tersangka itu, ada empat kasus yang sudah masuk pada tahap satu dan tinggal menunggu penelitian dari pihak penuntut umum.

Menurut dia, saat ini pihaknya telah menerima sebanyak 244 laporan terkait dengan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Seluruh laporan tersebut, katanya,

diterima dari enam kepolisian daerah (Polda) yang wilayahnya terkena dampak, yakni Polda Sumatera Selatan, Polda Jambi, Polda Riau, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Barat, serta Polda Kalimantan Selatan.

Dia menjelaskan terkait 244 laporan itu, sebanyak 26 laporan masih diselidiki dan 218 laporan masuk dalam proses penyidikan. Selanjutnya, dia menerangkan dari total 218 penyidikan, terdapat 113 penyidikan perorangan dan 48 penyidikan perusahaan.

“Kemudian ada 57 korporasi yang sudah P21 (berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa),” kata Badrodin.

Badrodin menuturkan para tersangka telah melanggar Pasal 108 UU Nomor 32 Tahun 2009, di mana ancaman hukuman yang akan dikenakan berupa kurungan minimal tiga tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda minimal Rp 3 miliar dan maksimal Rp 10 miliar. /Wisnu-Fadlan Syiam Butto

OTORITAS JASA KEUANGAN KEMBALI KELUARKAN KEBIJAKAN STIMULUS PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Otoritas Jasa Keuangan kembali mengeluarkan rangkaian kebijakan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional setelah sebelumnya sejak Juli 2015 beberapa kebijakan telah diluncurkan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada Oktober ini OJK menerbitkan enam kebijakan stimulus ekonomi di sektor keuangan yaitu:

1. Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan (trust) bank
2. Penyiapan skema asuransi pertanian
3. Revitalisasi modal ventura
4. Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
5. Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
6. Penegasan implementasi one project concept dalam penetapan kualitas kredit

Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D Hadad mengatakan bahwa keenam kebijakan ini merupakan inisiatif OJK bersama Pemerintah untuk terus berupaya mendorong perekonomian nasional kembali pada jalur pertumbuhan yang sesuai dengan rencana Pemerintah dalam mendorong kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga stabilitas di sektor keuangan.

Relaksasi ketentuan bisnis trust or trustee merupakan upaya OJK untuk mendukung kebijakan stimulus lanjutan dan meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola valuta asing terutama sebagai kelanjutan dari kebijakan sebelumnya terkait pengelolaan valas hasil ekspor.

Dengan relaksasi persyaratan melakukan kegiatan usaha Trust ini diharapkan:

- Industri perbankan dapat menampung dana valas termasuk dari sektor migas yang selama ini menggunakan Trustee luar negeri;
- Meningkatkan pasokan valas sehingga diharapkan dapat membantu mendukung stabilitas nilai tukar dan memperdalam pasar valas domestic; dan
- Meningkatkan daya saing perbankan nasional melalui diversifikasi layanan dan kegiatan perbankan domestik

Saat ini Bank yang telah melakukan kegiatan usaha Trust adalah Bank Mandiri, BRI dan BNI. Dengan relaksasi persyaratan ini maka terdapat 20 Bank Umum dan 3 KCBA yang memenuhi syarat melakukan kegiatan Trust ini.

Skema asuransi pertanian, OJK sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Perusahaan Asuransi BUMN (Konsorsium) merancang skema Asuransi Pertanian. Skema yang akan diterapkan adalah Asuransi Usaha Tani Padi yang 20% premi dibayar petani dan 80% dibayar Pemerintah.

Manfaat dari kebijakan ini:

- Pertanian rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen pertanian. Dengan Asuransi ini, Petani akan terlindungi secara financial akibat kegagalan panen.
- Menjadikan petani bankable terhadap kredit pertanian
- Menstabilkan pendapatan petani
- Meningkatkan produksi pertanian nasional

Program revitalisasi modal ventura, didorong untuk meningkatkan pendanaan kepada UMKM khususnya start-up business yang bergerak di sektor ekonomi kreatif. Sebagian besar Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang ada saat ini melakukan kegiatan pembiayaan bagi hasil seperti di perbankan. Hal ini menyebabkan adanya mismatch antara kegiatan penyertaan modal dengan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman.

Diharapkan dengan kebijakan ini:

- Terciptanya industri modal ventura di Indonesia yang mencerminkan karakteristik modal ventura melalui kegiatan dukungan pendanaan pada industri start-up termasuk ekonomi kreatif.
- Mengurangi mismatch antara sumber pendanaan dengan karakteristik kegiatan usaha PMV.
- Tersedianya akses pendanaan bagi perkembangan pelaku usaha yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dan UMKM.
- Terciptanya lapangan kerja baru pada sektor industri kreatif dan sektor pendukungnya, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Pembentukan konsorsium Industri Pembiayaan digagas Otoritas Jasa Keuangan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Ekonomi Kreatif untuk mendorong Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan di sektor industri kreatif, berorientasi ekspor dan UMKMK yang mendapatkan program penjaminan dari Perusahaan Penjaminan yang tergabung dalam



Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO). Kebijakan ini merupakan Sinergi Industri Keuangan Non Bank yang diharapkan akan mengakselerasi pembiayaan yang berorientasi ekspor, ekonomi kreatif dan UMKMK.

- Potensi tambahan pembiayaan dari mekanisme ini adalah sebesar Rp5-10 Triliun.
- Berdasarkan data dari Rencana Aksi Jangka Menengah Ekonomi Kreatif 2015 sd 2019, Ekonomi Kreatif ini menyumbang sekitar 7,5% PDB nasional dan kontribusi terhadap ekspor nasional sebesar 5,7%. Sedangkan kontribusi ekonomi kreatif dalam pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru adalah sebesar 2% atau sekitar 250 ribu lapangan kerja baru per tahun. Dengan inisiatif ini diharapkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional dan penciptaan lapangan kerja

baru akan semakin meningkat.

Optimalisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sangat diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis. OJK melihat perlunya deregulasi peraturan agar LPEI menjadi lebih fleksibel dalam menjalankan bisnisnya yang tidak mengacu kepada industri perbankan dan lebih pro kepada UMKMK.

OJK akan mengeluarkan kebijakan yang bersifat relaksasi atas beberapa prudential regulation bagi LPEI antara lain mencakup:

1. Penghapusan ketentuan batas modal minimum – OJK tidak akan mengatur mengenai batas modal minimum yang harus dimiliki LPEI agar LPEI lebih leluasa dalam pelaksanaan tugasnya mendorong pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Namun demikian, OJK akan

menambahkan aturan mengenai gearing ratio yang lebih sesuai dengan karakteristik LPEI sebagai Lembaga Pembiayaan Ekspor .

2. Menambahkan pengaturan Financing Aset Ratio – OJK akan mengatur mengenai batas minimum portofolio pembiayaan yang dilakukan oleh LPEI dibandingkan dengan total aset yang dimiliki dalam rangka mendorong LPEI dapat menjalankan visi misinya untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.
3. Mendorong pembiayaan UMKMK – OJK akan menambahkan aturan mengenai batasan minimum penyaluran pembiayaan oleh LPEI kepada UMKMK, sehingga dapat lebih mengoptimalkan peran LPEI dalam mendorong dan mengembangkan UMKMK yang berorientasi ekspor.

Implementasi one project concept dalam penetapan kualitas kredit. Ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum tahun 2012, telah diatur bahwa Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap kredit yang digunakan untuk membiayai satu debitur atau satu proyek yang sama, baik yang diberikan oleh satu bank atau lebih dari satu bank.

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko kredit terhadap satu debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari beberapa bank, maka ditegaskan kembali bahwa dalam hal terdapat pemisahan arus kas maka penetapan kualitas kredit yang diberikan kepada beberapa proyek dari debitur yang sama, dapat ditetapkan berbeda (one project concept).

Sebelumnya pada 24 Juli 2015 OJK telah mengeluarkan 35 kebijakan dalam rangka mendorong stimulus perekonomian yang terdiri dari 12 kebijakan di sektor perbankan, 15 kebijakan di sektor Pasar Modal, empat kebijakan di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan empat kebijakan di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Beberapa kebijakan ini bersifat temporer selama dua tahun dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian ke depan.

Mengaku Rugi, Ada Apa dengan Pertamina?

Flukuasi harga minyak mentah (*crude oil*) dunia dalam beberapa bulan terakhir ini masih di kisaran USD40-USD50 per barel. Namun harga yang rendah tersebut belum membuat PT Pertamina (Persero) menurunkan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar.

Alih-alih menurunkan harga BBM, BUMN yang mengurus migas ini justru malah mengaku menelan kerugian cukup besar. Corporate Secretary Pertamina, Wisnuntoro mengungkapkan bahwa hingga September 2015, perseroan telah menelan kerugian mencapai Rp15,2 triliun.

“Untuk diketahui dulu sejak 2015 awal sudah disebutkan oleh pemerintah juga oleh Pak Menteri ESDM (Sudirman Said), bahwa untuk jual premium sampai rugi Rp12 triliun, sampai hari ini Rp15,2 triliun,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, kerugian tersebut disebabkan karena harga jual premium yang tak sesuai dengan harga keekonomiannya yang sebesar Rp7.700 hingga Rp7.800 per liter, sementara Pertamina hingga hari ini masih dipaksa untuk menjual seharga Rp7.400 per liter.

Menurut Mantan Plt Direktur Utama Pertamina, Muhammad Husen bahwa harga BBM saat ini yang sudah berlaku sejak sekitar 6 bulan yang lalu, sesungguhnya telah merugikan rakyat.

“Jika lihat harga minyak sekarang, seharusnya harga keekonomian itu Rp6000-an per liter. Ya silakan ditafsirkan sendiri kebijakan pemerintah,” ujar dia saat berbincang dengan Aktual beberapa waktu lalu.

Jika alasan pemerintah untuk menutupi kerugian Pertamina, semestinya tidak sampai lebih dari 2 bulan kebijakan harga tersebut dipertahankan.

“Pertamina di awal-awal tahun merugi sekitar Januari-Februari. Kebijakan harga ini kan sudah sejak sekitar 6 bulan lalu. Jadi ya kemana uangnya,” kata dia. Sehingga menurut Husen tak ada alasan harga saat ini masih dipertahankan.

Senada dengan Husen, pengamat energi dari Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto mengatakan semestinya harga BBM jenis premium bisa turun hingga kisaran Rp6.000 per liter. Hal tersebut bisa terjadi karena harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) USD40 per barel dan kurs Rp14.000 serta alpha Rp1.000.

“Jika ICP berada di kisaran USD50-USD55 per barel dan kurs Rp14.500 serta alpha Rp1.000, maka harga premium bisa dibanderol di kisaran Rp6.500-Rp7.000 per liter,” kata dia belum lama ini.

Menurut Agung, seharusnya penurunan harga BBM sudah bisa dilakukan sejak Agustus lalu, saat harga minyak di kisaran USD40 per barel. “Perhitungan kami itu, harga tersebut sudah termasuk PPN dan PBBKB,” jelasnya.

Masyarakat Energi Indonesia menilai aneh jika Pertamina mengaku merugi sampai belasan triliun rupiah. Padahal sampai saat ini harga BBM bersubsidi masih tetap sejak sekitar 6 bulan lalu, ditengah harga minyak dunia sedang turun.

“Kinerja Pertamina dibawah kepemimpinan Dwi Soetjipto terkesan amburadul dan tidak cakap mengatur perusahaan BUMN terbesar itu. Jauh dibanding dengan kepemimpinan Direksi Pertamina sebelumnya,” ujar Koordinator Masyarakat Energi Indonesia, Agung Sanjaya lewat siaran pers.

Soal kerugian yang sangat fantastis Agung mendesak Komisi VI DPR segera memanggil Direktur Utama Pertamina untuk diminta



klarifikasi dan pertanggungjawabannya.

Selain itu juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif untuk mengukur kedalaman serta sejauh mana kerugian tersebut benar, mengingat



Petugas mengisi BBM bersubsidi jenis premium di Agen Premium & Minyak Solar (APMS) Distrik Sota, Merauke, Papua, Jumat (18/9).

gaji dan tunjangan pegawai Pertamina besar sekali dan standar perusahaan internasional.

Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika menegaskan bahwa tidak sepatutnya kerugian suatu BUMN yang diakibatkan oleh penugasan Pemerintah kemudian dibebankan ke rakyat. Dikatakannya, untuk merugi sebenarnya sudah ada mekanisme khusus yang bisa dilakukan Pemerintah.

“Begini, masalah untuk BUMN. Kalau merugi ada mekanismenya. Misalnya dengan penugasan atau yang biasa disebut *Public Service Obligation* (PSO). Jadi dengan menugasi itu bisa merugi,” jelas Kardaya beberapa waktu lalu.

Ia melanjutkan, nantinya kerugian tersebut bisa ditutupi dengan subsidi, bukan dengan cara membebani rakyat seperti yang dilakukan pemerintah saat ini.

“Nanti pengantiannya itu, dalam

keuangan negara itu dengan subsidi. Tapi kalo kerugian BUMN lalu ditutupi dengan membebankan kepada rakyat, rakyat harus menanggung dengan membayar harga yang lebih tinggi, bukan begitu, itu keliru,” tutupnya.

Terkait kerugian Pertamina, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah akan menutupi kerugian PT Pertamina (Persero) akibat menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dimana terhitung hingga September 2015 perseroan telah merugi sebesar Rp15,2 triliun.

“Kalau misalnya negatif (keuangan Pertamina) kan dibayar pemerintah ke Pertamina,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja.

Dikatakannya, kerugian yang akan dibayarkan pemerintah akan berbentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) atau melalui dana ketahanan energi. Sehingga Pertamina tidak lagi

menderita kerugian akibat penjualan premium yang di bawah harga keekonomian.

“Itu PMN salah satu opsinya. Bisa juga dengan dana ketahanan energi, bila disetujui bisa jadi dari sana akan diganti. Kan nanti kita sedang usulkan dana ketahanan energi,” imbuh dia.

Wacana pemberian PMN kepada Pertamina langsung ditanggapi pedas oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Hafisz Tohir. Ia mengatakan, pihaknya mempertanyakan hal itu.

“Akan kami tolak kalau Pertamina diberi PMN. Masa rugi tapi disubsidi lewat PMN?,” tegas Hafisz kepada Aktual.

Dirinya mengaku geram dengan wacana yang mulanya dilontarkan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM tersebut.

“Kacau Pertamina ini. Enggak bisa begitu aja, kalau lewat PMN tentu berat, karena mereka akan lewat komisi VI. Akan kami tolak,” ujar dia.

Berbeda dengan Kementerian ESDM, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku justru tidak mengetahui wacana menutup kerugian Pertamina dengan PMN. “Apa? Saya ga tahu,” kata Rini saat ditemui di gedung DPR RI.

Terkait skema menutup kerugian Pertamina, Rini pun menolak berkomentar. “Tolong tanya ke Pertamina. Saya belum bisa detilkan dengan Pertamina. Saya tidak hafal,” ujar dia.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengganti kerugian Pertamina. Hal itu kata Bambang, tidak ada pos anggaran dalam neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Coba kamu bongkar anggarannya. Ada tidak? Tidak ada. APBN 2016 dari mana coba?” jawabnya singkat. o Dhanu Akbar-Arbie Marwan

Menteri Rizal Desak Royalti Freeport Naik Jadi 7 Persen

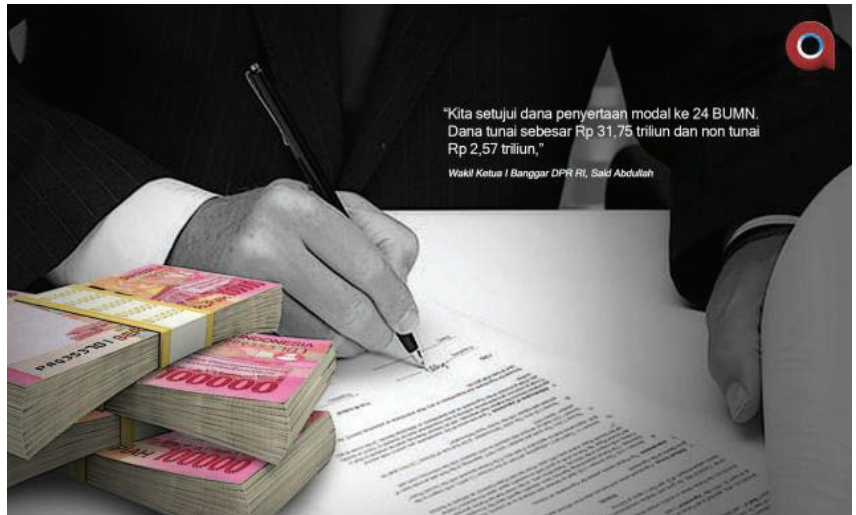
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) harus meningkatkan nilai royaltinya menjadi 6%-7% dari semula yang hanya sebesar 1%.

“Freeport sejak tahun 1967 sampai 2014 hanya bayar royalti emas 1 persen, royalti 0,5 persen, padahal diseluruh dunia royalti 6 sampai 7 persen,” kata Rizal dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/10).

Ia menyampaikan, sekian puluh tahun PTFI hanya membayar royalti sebesar 1% akibat adanya praktik KKN dilingkungan pejabat negara setiap kali terjadi proses perpanjangan kontrak perusahaan tambang AS itu di Indonesia. Terlebih, sekian lama juga PTFI membuang limbah seenaknya di sungai Amungme, Papua.

“Pada perpanjangan kontrak di pertengahan 1980-an seharusnya term dalam kontrak bisa lebih menguntungkan Indonesia. Namun pejabat disogok, perpanjangan kontrak tidak diubah term-nya. Akibat limbahnya, ikan mati, rakyat sakit-sakitan. Di AS, perusahaan tambang di sana tidak berani melanggar aturan. Di Indonesia seenaknya karena mereka yakin pejabat Indonesia gampang dilobby, gampang disogok,” ujar dia.

“Kita sampaikan Freeport ini paling mencla-mencle soal divestasi. Ada aja alasan. Pertama royalti, kedua limbah, ketiga percepat proses divestasi. Kalau mereka ngotot tidak mau, asal kita tidak gampang dilobi saya yakin mereka akan menyerah,” tutupnya. /Arbie Marwan-Dhanu Akbar



“Kita setuju dana penyertaan modal ke 24 BUMN. Dana tunai sebesar Rp 31,75 triliun dan non tunai Rp 2,57 triliun,”

Wakil Ketua I Banggar DPR RI, Said Abdullah

PMN di 24 BUMN Senilai Rp34,3 T

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 24 badan usaha milik negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Banggar DPR RI, Said Abdullah diketahui dana PMN untuk BUMN pada RAPBN 2016 sebesar Rp 34,32 triliun. Dimana uang tunai sebesar Rp 31,75 triliun dan non tunai sebesar Rp 2,57 triliun.

“Kita setuju dana penyertaan modal ke 24 BUMN. Dana tunai sebesar Rp 31,75 triliun dan non tunai Rp 2,57 triliun,” ujar Said di ruang rapat Banggar, Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/10).

Berikut rincian dana PMN untuk 24 BUMN dalam RAPBN 2016:

1. PT Krakatau Steel dana tunai Rp 1,5 triliun dan dana non tunai Rp 956,49 miliar
2. PT Perkebunan Nusantara I dana tunai Rp 25,45 miliar
3. PT Perkebunan Nusantara VIII dana non tunai Rp 32,78 miliar
4. PT Perikanan Nusantara dana non tunai Rp 29,40 miliar
5. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dana tunai Rp 1 Triliun
6. PT Angkasa Pura II dana tunai Rp 2 triliun
7. PT Industri Kereta Api dana tunai

- Rp 1 Triliun
8. PT Jasa Marga dana tunai Rp 1,25 triliun
9. PT Pelabuhan Indonesia dana non tunai Rp 564,80 miliar
10. PT Barata Indonesia dana tunai Rp 500 miliar tunai
11. PT Reasuransi Indonesia Utama dana tunai Rp 500 miliar
12. PT Asuransi Kredit Indonesia dana tunai Rp 500 miliar
13. Perum Jamkrindo dana tunai Rp 500 miliar
14. PT Bahana PUI dana tunai Rp 500 miliar
15. PT Hutama Karya dana tunai Rp 3 triliun
16. PT Wijaya Karya dana tunai Rp 4 triliun
17. PT Pembangunan Perumahan dana tunai Rp 2 triliun
18. Perum Perumnas dana non tunai Rp 235,41 miliar
19. PT Amarta Karya dana non tunai Rp 32,15 miliar
20. Perum Bulog dana tunai Rp 2 triliun
21. PT Rajawali Nusantara Indonesia dana non tunai Rp 692,50 miliar
22. PT Perusahaan Listrik Negara dana tunai Rp 10 triliun
23. PT Pertani dana tunai Rp 500 miliar
24. PT Pelabuhan Indonesia III dana tunai Rp 1 triliun

Wahyu Romadhoni-Nailin In Saroh

Pamadaman Api, Pemerintah Habiskan Rp500 Miliar

Pemerintah sudah menghabiskan hingga Rp500 miliar untuk penanggulangan bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan dalam dua bulan terakhir.

Dari enam provinsi yang mengalami bencana kabut asap, Sumatera Selatan merupakan yang paling banyak menyerap dana bantuan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menjelaskan Sumsel paling banyak menyerap dana karena paling banyak terdeteksi titik panas atau "hotspot".

"Melihat kondisi titik panas di provinsi ini paling banyak di antara provinsi lainnya, semua peralatan dan bantuan penanggulangan bencana kabut asap dipusatkan di Sumsel," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Palembang, Senin (12/10).

Pihaknya terus berupaya memberikan bantuan kepada daerah yang mengalami bencana kabut asap, agar masyarakat segera terbebas dari penderitaan.

Bantuan yang diberikan untuk menanggulangi bencana kabut asap yang mengakibatkan banyak masyarakat terserang penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA), terganggunya berbagai aktivitas dan transportasi udara, berupa peralatan untuk operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui darat dan udara.

Kata dia, dengan dukungan dana dan peralatan penanggulangan bencana kabut asap yang diberikan, diharapkan permasalahan tersebut segera berakhir dan kehidupan masyarakat kembali normal. /M Vidia Wirawan-Ant



HM Sampoerna "Right Issue" Rp77.000/Saham

Rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) menyepakati untuk melaksanakan penawaran umum terbatas atau "right issue" seharga Rp77.000 per saham.

"Pelaksanaan 'right issue' ini untuk memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan semua perusahaan terbuka yang terdaftar untuk memenuhi setidaknya 7,5 persen kepemilikan publik dari total modal disetor paling lambat tanggal 30 Januari 2016," ujar Presiden Direktur HM Sampoerna Tbk Paul Janelle di Jakarta, Jumat (9/10).

Ia menyampaikan bahwa aksi korporasi perseroan ini merujuk pada Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Emiten.

Dalam peraturan itu disebutkan, Perusahaan Tercatat dapat tetap tercatat di BEI apabila jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 saham dan paling kurang 7,5 persen dari jumlah saham dalam modal disetor. Dan, jumlah pemegang saham paling sedikit 300 pemegang saham yang memiliki rekening efek di Anggota Bursa Efek.

Paul Janelle memaparkan HM Sampoerna menawarkan sebanyak-banyaknya 269.723.076 saham baru. Philip Morris Indonesia sebagai pemegang saham utama akan melaksanakan sebagian hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dalam aksi korporasi ini.

"Seluruh dana yang akan akan diraih dari 'right issue' ini diperkirakan berjumlah sekitar Rp20,768 triliun yang akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman modal kerja," katanya.

Ia menyampaikan bahwa setelah "right issue" dilaksanakan, maka



kepemilikan Philip Morris Indonesia di HM Sampoerna sebesar 92,5 persen, sementara sisanya sebesar 7,5 persen saham akan dimiliki oleh publik. Sebelum pelaksanaan 'right issue', kepemilikan saham Philip Morris Indonesia sebesar 98,18 persen.

"Pelaksanaan 'right issue' ini juga telah menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri, terutama dengan modal yang berasal dari investor luar negeri yang kemudian dikonversi menjadi arus masuk mata uang asing ke dalam negeri, yang tentunya menunjukkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia dan juga pasar saham," kata Paul Janelle.

Ia mengatakan bahwa setelah pelaksanaan "right issue" ini, maka saham HM Sampoerna dapat menjadi bagian dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sehingga semakin memperkuat pasar modal Indonesia.

Paul Janelle juga mengatakan bahwa transaksi dari pelaksanaan "right issue" ini juga akan menjadi salah satu penawaran saham terbesar dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya di Indonesia melainkan juga di seluruh Asia Tenggara.

"Hal ini sekaligus menggarisbawahi kepercayaan perseroan terhadap Indonesia dan prospek jangka panjang negara ini. Sebagai pembayar pajak terbesar di Indonesia dan salah satu perusahaan terkemuka yang telah beroperasi lebih dari 100 tahun, kami berkomitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia," ucapnya. /Ismed-Ant

Strategi Putin dalam Intervensi Militer di Suriah

Intervensi langsung oleh militer Rusia di Suriah memberi komplikasi baru bagi upaya penyelesaian perang di Suriah. Banyak perkiraan terlontar tentang apa sebenarnya tujuan Rusia, dan bagaimana ia akan mencapai tujuan itu dengan langkah militernya tersebut.

Langit di atas Suriah sampai pertengahan Oktober 2015 ini digetarkan oleh raungan pesawat-pesawat jet tempur Rusia. Pesawat-pesawat itu membombardir kubu kelompok oposisi yang menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad. Yang juga diserang adalah kubu kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Serangan dahsyat Rusia yang gencar ini mengubah arah pertempuran di darat, yang sebelum ini membuat pasukan Suriah pro-Assad terdesak.

Menurut pengamatan pihak Barat, yang lebih banyak dihantam oleh serangan pesawat-pesawat negara beruang merah itu tampaknya adalah basis pertahanan kelompok oposisi anti-Assad. Padahal, awalnya alasan resmi bagi aksi militer Rusia adalah untuk “memerangi kelompok teroris ISIS.”

Hal ini menimbulkan kecaman dari kelompok oposisi Suriah dan negara-negara Barat, yang menuduh Rusia hanya menjadikan ancaman ISIS sebagai dalih. Karena yang disasar serangan terutama justru kubu kelompok-kelompok oposisi atau wilayah di mana hanya terdapat sedikit elemen ISIS. Jatuhnya sejumlah korban di kalangan warga sipil juga menjadi alasan untuk mengancam serangan pesawat-pesawat Rusia.

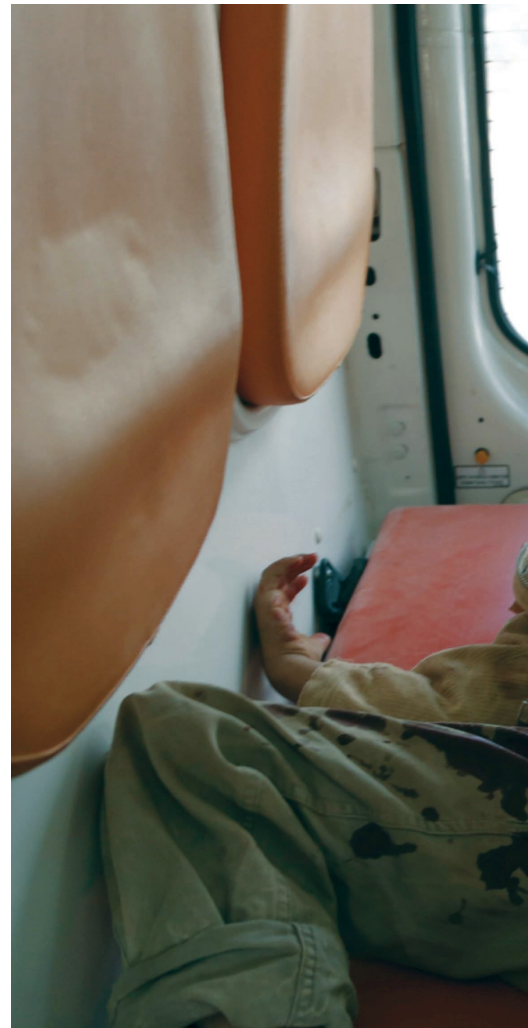
Dengan hadirnya intervensi militer Rusia secara langsung, konstelasi konflik di Suriah menjadi semakin rumit. Awalnya, konflik di Suriah adalah seperti perang proxy (kepanjangan tangan). Militer

Suriah pro-Assad, yang didukung Rusia, Iran, dan Hizbullah-Lebanon, berperang melawan berbagai kelompok oposisi anti-Assad, yang didukung Arab Saudi beserta rekan-rekan Arabnya, Amerika Serikat beserta sejumlah negara Barat, dan Turki. Berbagai persenjataan untuk kelompok oposisi anti-Assad disalurkan oleh CIA dan intelijen Arab Saudi melalui perbatasan Turki. Sedangkan ISIS adalah “pemain liar” yang memanfaatkan kekisruhan di Suriah dan Irak untuk kepentingannya sendiri, dan berhasil menguasai wilayah yang luas di Suriah dan Irak.

Seperti Telur di Ujung Tanduk

Ketika militer Rusia –yang memiliki pangkalan laut di Suriah-- belum turun tangan secara langsung, militer Suriah sedang terdesak berat. Banyak wilayah yang dikuasai militer Suriah sudah jatuh ke tangan kelompok oposisi anti-Assad dan kelompok ekstrem ISIS. Cepat atau lambat, kekalahan militer Suriah – yang berarti juga ambruknya rezim Assad—tampaknya akan terjadi. Militer Suriah kini tinggal menguasai sebagian kecil wilayah Suriah, yang menjadi basis tradisional lama pendukung Assad.

Posisi kritis Assad, yang seperti telur di ujung tanduk, membuat Rusia selaku sekutu lama merasa khawatir. Banyak aset dan kepentingan Rusia di kawasan Timur Tengah akan terancam lenyap, jika kekuasaan Assad dibiarkan runtuh. Maka Presiden Rusia Vladimir Putin pun mengambil keputusan, saatnya



Anggota pertahanan sipil merawat bocah lelaki yang terluka di dalam sebuah ambulans setelah Rusia menjatuhkan gugus bom menurut aktivis di Maaret al-Naaman, provinsi Idlib, Suriah, Rabu (7/10).

sudah tiba bagi militer Rusia untuk bertindak.

Seperti sudah diprediksikan oleh para pengamat, pada penghujung September 2015 Rusia akhirnya turun tangan langsung secara militer di Suriah, untuk menyelamatkan sekutunya Bashar al-Assad. Dalam sudut pandang Moscow, langkah itu akan menegaskan kembali status Rusia sebagai kekuatan yang tak bisa ditinggalkan, dalam setiap upaya penanganan krisis di level regional maupun global.

Langkah itu juga diharapkan akan memecah isolasi internasional,



dengan mengalihkan perhatian dari kasus keterlibatan Rusia di kawasan Crimea, Ukraina. Kelompok warga berbahasa Rusia di daerah Crimea menentang kontrol dari pemerintah Ukraina, yang didukung Amerika dan negara-negara Barat. Rusia dituduh memberi dukungan militer dan persenjataan pada kelompok antipemerintah di Crimea, dan karena itulah sejumlah sanksi ekonomi dijatuhkan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya terhadap Rusia. Meski bisa bertahan, sanksi-sanksi ini cukup mengganggu Moscow.

Lewat intervensi militer di Suriah, Rusia juga berharap meraih sejumlah dukungan di Uni Eropa, dan mungkin menciptakan kondisi-kondisi bagi pelanggaran sanksi, yang diterapkan

terhadap Rusia sejak kasus Crimea. Yang lebih penting, aksi Rusia membuat Amerika melunakkan posisinya terhadap Presiden Bashar al-Assad, di mana pengunduran diri Assad tidak lagi dipandang sebagai prasyarat bagi langkah penyelesaian krisis Suriah.

Metode Sistematis Putin

Menurut pengamat Dmitry Adamsky, untuk mengkaji apa yang sebetulnya dicari Rusia lewat intervensinya di Suriah dan bagaimana negara beruang merah ini akan mencapai tujuan itu, perlu dibuat beberapa asumsi.

Pertama, perbedaan pendapat di kalangan pengamat --tentang sikap kehati-hatian Presiden Rusia Vladimir Putin dan kapasitas Kremlin

terhadap kebijakan keamanan nasional yang kuat-- hingga saat ini belum mencapai titik temu. Namun bukti-bukti empiris mengisyaratkan, Putin tampaknya memiliki metode sistematis tersendiri untuk mengelola berbagai krisis dan interaksi strategis.

Sebagai mantan petinggi dinas rahasia KGB era Uni Soviet, Putin dibimbing oleh pemahamannya tentang masa lalu Rusia dan visi yang kukuh dipegangnya tentang masa depan Rusia. Ia mengkaji pilihan-pilihan yang ada, mengubah langkah untuk menanggapi peristiwa, dan menunjukkan kemampuan improvisasi dan eksploitasi terhadap kekeliruan yang dilakukan lawan-lawannya.

Kedua, hasil akhir yang didambakan Moscow lewat intervensi militer di Suriah bisa diduga adalah terciptanya Suriah yang stabil, di mana Rusia bisa menjaga dan memelihara kehadiran regionalnya. Untuk mencapai hal itu, pada awalnya, Rusia akan mencoba mengamankan dan memperkuat basisnya di daerah pesisir Suriah, di fasilitas-fasilitas militer Latakia dan Tartus. Militer Rusia sudah sekian lama hadir di sana.

Rusia dapat memperluas daerah kepala pantainya dengan meningkatkan kapasitas lapangan terbang, serta melengkapi galangan-galangan untuk kapal-kapal pengangkut dan kapal perang yang lebih besar. Rusia akan memanfaatkan landasan luncur yang sudah dioptimalkan itu untuk memasok pasukan Assad dan pasukan Rusia sendiri dalam pertempuran, untuk menstabilkan dan melindungi perbatasan-perbatasan "Suriah kecil," yakni basis pertahanan wilayah yang masih dikuasai pasukan Assad.

Sementara itu, Moscow mungkin mulai melangkah ke arah penyelesaian politik atas krisis Suriah. Kemungkinan, Kremlin pertama-tama akan mendesak dipulihkannya garis-garis perbatasan Suriah pra-perang. Jika hal itu tampaknya sulit diwujudkan

Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) memimpin rapat bersama anggota pemerintah di kediaman kepresidenan NOvo-Ogaryovo di luar Moskow, Rusia, Rabu (30/9). Putin mengatakan dalam rapat kemarin bahwa satu-satunya cara memerangi teroris di Suriah adalah bertindak terlebih dahulu, mengatakan militer Rusia di Timur Tengah hanya melibatkan angkatan udara dan sementara.

atau terlalu berisiko, maka Rusia mungkin akan menerima keberadaan perbatasan “Suriah kecil” yang sudah ada.

Pengalaman Pahit di Afghanistan

Rusia pada dasarnya lebih menginginkan posisi Assad tetap bertahan dalam masing-masing skenario tersebut. Namun Rusia tidak akan menghalangi digesernya Assad, dengan syarat pemerintah baru Suriah akan melindungi kepentingan Moscow dan memungkinkan proyeksi kekuatan Rusia di tingkat regional.

Ketiga, Moscow mungkin memahami bahwa posisinya di Suriah tidaklah kuat dan intervensi militer itu suatu saat mungkin akan berubah jadi bencana. Rusia sangat menyadari petualangan regional yang gagal oleh Amerika di Afghanistan, serta pengalaman pahit yang pernah dialami Rusia di negeri yang sama, juga di Kaukasus Utara dan Ukraina.

Jika kita mencoba menganalisis berdasarkan karya penerbitan studi kawasan dan penerbitan yang dikeluarkan militer Rusia pada tahun-tahun terakhir ini, tampak bahwa para pakar dan ahli strategi Rusia telah memiliki gambaran yang jelas tentang kemungkinan terbaik dan terburuk dari intervensi militer dan kampanye serangan udara. Namun, seberapa jauh pemahaman itu akan diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di Suriah, masih belum jelas.

Secara strategis, komentar para pakar Rusia telah mengerucut ke batas-batas kapasitas militer Rusia yang sangat besar, dalam menghadapi musuh yang menganut ideologi kuat. Kekuatan militer kasar Rusia mungkin bisa menimbulkan kerugian besar pada para pejuang jihad, namun bukan pada gagasan-gagasan



Salafinya. Para ahli strategi itu telah memperdebatkan, bagaimana menjalankan pertempuran di Suriah, dengan risiko-risiko yang layak diambil dan biaya-biaya yang harus dibayar.

Moscow juga mempertimbangkan potensi kesulitan untuk mempertahankan toleransi publik terhadap perang di sebuah negara asing yang jauh di seberang lautan, khususnya pada saat ekonomi Rusia sendiri sedang merosot dan ada kebuntuan situasi di Ukraina. Terakhir, Kremlin juga peka terhadap keprihatinan kalangan elite bisnis tentang kemungkinan dampak buruk intervensi militer di Suriah, khususnya karena potensi kemiripannya dengan pengalaman kegagalan militer Rusia di Afghanistan.

Dengan semua aspek situasi, yang mungkin saja berjalan tidak sesuai rencana, keputusan Putin untuk campur tangan secara militer di Suriah bisa jadi merupakan salah perhitungan. Was-was terhadap kemungkinan bertindak ceroboh, Rusia bisa jadi akan terjebak dalam pengeluaran energi dan sumberdaya yang terlalu besar dan berlarut-larut, sehingga merepotkan dirinya sendiri (overextension). Overextension ini adalah risiko utama yang dihadapi Rusia dalam keterlibatan militernya di Suriah. Oleh karena itu, Kremlin

harus berusaha menemukan keseimbangan yang pas agar tidak bertindak berlebihan, tapi juga tidak boleh kekurangan.

Ajaran Mikhael Gorbachev

Di sini Kremlin mungkin akan mengadopsi pendekatan yang mirip dengan prinsip Soviet, tentang pemenuhan kebutuhan yang masuk akal (*reasonable sufficient*). Prinsip yang pertama kali diartikulasikan oleh pemimpin Soviet Mikhael Gorbachev ini awalnya dimaksudkan untuk memelihara kekuatan militer secukupnya, sekadar mampu untuk melindungi Soviet terhadap ancaman-ancaman dari luar.

Jika diterapkan dalam konteks Suriah, prinsip ini berarti membatasi skala intervensi ke level minimum, yang akan tetap memungkinkan Rusia memproyeksikan pengaruhnya di Suriah. Di Ukraina, Moscow telah memperoleh pembelajaran pahit tentang batas-batas kekuatan, di mana tambahan aplikasi kekuatan militer tidaklah berarti menambah kemampuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah di lapangan.

Sebaliknya, hal itu justru menyeret Rusia semakin jauh ke dalam pertempuran yang tidak pernah diperkirakan ataupun didambakannya. Saat ini, pemenuhan kebutuhan yang masuk akal itu

mungkin mencegah Moscow, agar tidak sampai melampaui titik kulminasi intervensi. Yakni, manakala penggelaran kekuatan tambahan tidak lagi menguntungkan, tetapi justru menjadi bersifat kontraproduktif.

Dalam intervensi di Suriah, Moscow berusaha menggalang aliansi seluas mungkin. Meski demikian, inti koalisi militer yang terbentuk cukup sempit, yakni terdiri atas: Unit-unit militer Suriah yang masih loyal pada Assad, Pengawal Revolusi Iran dan pasukan Basij, pasukan Hizbullah-Lebanon, dan pemerintah Irak yang didominasi Syiah. Dalam kampanye ini, Moscow tampaknya akan mencoba merancang dan mengawasi operasi-operasi koalisi, serta bertindak sebagai pelipatganda kekuatan di garis depan.

Sebagai tambahan atas dukungan diplomatik, Rusia mungkin memberikan bantuan perencanaan dan logistik; komando, komunikasi kontrol, dan kapabilitas intelijen; dan tentu saja serangan udara. Komponen udara dari misi ini mungkin mencakup pesawat pembom tempur, jet dukungan serangan udara jarak dekat, helikopter tempur dan helikopter angkut, serta pesawat tanpa-awak (drone).

Semua itu akan dikerahkan untuk mendukung pasukan pro-Assad. Rusia mungkin juga akan menggunakan jet-jet pencegat untuk menangkalkan kemungkinan serangan udara terhadap wilayah yang dikontrol pasukan Assad. Rusia juga dapat menggelar sistem rudal darat-ke-udara dan jet-jet canggih untuk pertahanan bagi semua komponen yang dikerahkan.

Mendelegasikan Pertempuran Darat

Pada saat yang sama, sesuai dengan prinsip *reasonable sufficiency*, Moscow tampaknya akan mendelegasikan sebagian besar pertempuran darat kepada para sekutunya. Rusia dapat berpartisipasi dalam perencanaan operasional, berbagi informasi intelijen visual dan sinyal, dan pengarahan sasaran. Namun, tampaknya tidak mungkin

batalyon-batalyon pasukan Rusia akan menjadi pemandangan reguler di Damascus., ibukota Suriah. Sebagai gantinya, Moscow tampaknya akan mendorong program-program untuk melatih dan memberi masukan pada unit-unit pasukan Assad, yang menurut pandangan Moscow –untuk alasan politik dan militer—sebagai pasukan tempur yang paling efektif untuk melawan ISIS.

Rusia tampaknya cukup percaya diri bahwa ia dapat merancang sebuah kampanye koalisi yang efektif, berdasarkan pengalaman dari puluhan latihan yang diselenggarakan dengan Perjanjian Keamanan Kolektif (Collective Security Treaty) dan Organisasi Kerjasama Shanghai (Shanghai Cooperation Organizations). Meski begitu, Rusia agak merasa prihatin pada kemampuan kerjasama operasi (interoperability) pasukan-pasukan koalisi pro-Assad.

Pada tingkatan strategis, Rusia, Iran, dan Suriah, dan mungkin juga Hizbullah dan Irak, dilaporkan telah berkoordinasi pada beberapa upaya militer sejak musim panas. Moscow juga terbiasa bekerjasama dengan pasukan Suriah, yang ia latih, perlengkapi, dan didik selama puluhan tahun. Sedangkan Assad sudah lama bekerjasama secara mendalam dengan Hizbullah. Kedua negara itu juga bekerjasama dengan Iran. Namun kubu koalisi ini tidak memiliki banyak pengalaman bekerja bersama sebagai satu keseluruhan, dan sebagian besar pihak-pihak itu tidak pernah menyelenggarakan operasi koalisi skala-besar sebelumnya.

Maka kemampuan Rusia untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas para mitranya akan menjadi faktor kunci. Menurut pakar Rusia, keberhasilan militer ISIS selama ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan Assad untuk mengkonsentrasikan upaya militernya terhadap ISIS, langkah setengah-setengah dan serba tanggung dari kelompok koalisi sebelumnya, dan kurangnya

koordinasi di kalangan para pemberontak anti-Assad.

Dengan memberikan semacam fokus dan pembenaran bagi kampanye anti-ISIS, koalisi yang dipimpin Rusia tampaknya berusaha membalikkan arah jalannya perang. Berdasarkan teori militer Rusia yang telah ada, kampanye serangan udara tampaknya akan berbentuk serangan terhadap tiga sistem yang menyatukan ISIS: rantai komando dan kontrol, rantai pasokan-pasokan, dan pusat-pusat daya tarik ekonomi.

Ketika serangan udara mencoba memecah-mecah ISIS, operasi-operasi darat akan berusaha membubarkan atau memporak-porandakan kelompok-kelompok pejuang lokal kecil. Kampanye itu tidak harus berskala besar, tapi hanya dibutuhkan sekadar untuk pembalikan dari tren yang ada, dan mendemonstrasikan kekuatan dari rezim yang masih berkuasa sekarang, serta memfasilitasi kondisi-kondisi bagi sebuah proses politik.

Dalam beberapa aspek, rancangan kampanye mungkin juga dinukil dari konsep Perang Generasi Baru Rusia (*Russia's New Generation Warfare*). Ini adalah seperangkat gagasan tentang perubahan karakter perang yang telah beredar di komunitas strategis Rusia, di bawah pimpinan Kepala Staf Umum yang menjabat saat ini, Valery Gerasimov. Gagasan itu sudah membentuk doktrin militer Rusia 2014 dan operasi-operasi yang menyusul kemudian di Ukraina.

Konsep itu meminimalkan peran operasi-operasi militer skala-besar dari era perang industrial, dan sebagai gantinya mengkombinasikan kekuatan keras (*hard power*) dan kekuatan lunak (*soft power*) di lintas ranah militer, diplomatik, dan ekonomi. Ia memanfaatkan tindakan tak-langsung, operasi informasi, paramiliter, dan pasukan-pasukan operasi khusus yang didukung oleh kapabilitas militer yang canggih. Jika diterapkan dengan benar, konsep ini secara alamiah akan nyambung dan serasi dengan prinsip *reasonable sufficiency*. • Satrio Arismunandar

Air Unsur Paling Cerdas di Alam Semesta

Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari molekul air. Dan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr Masaru Emoto, peneliti dari Jepang, menunjukkan bahwa struktur molekul air sangat dipengaruhi oleh berbagai kejadian non fisik seperti kekuatan pikiran, kata-kata, dan niat seseorang.

Ya, ternyata air merespon "kata" tidak hanya sebagai sebuah desain sederhana, tetapi air dapat memahami makna "kata" tersebut. Saat air sadar bahwa kata yang diperlihatkan membawa informasi yang baik maka air akan membentuk kristal. Namun, bila kata positif yang diberikan, maka kristal yang terbentuk akan mekah seperti bunga yang sedang mekar penuh, seakan ingin menggambarkan gerakan tangan air yang sedang mengekspresikan 'kenikmatannya'.

Namun, jika seseorang mengucapkan kata-kata negatif, maka akan menghasilkan pecahan kristal dengan ukuran yang tidak seimbang. Mungkin juga air dapat merasakan perasaan orang yang menulis kata tersebut.

Dari studi yang dilakukan oleh Dr. Emoto bersama timnya menunjukkan, bahwa air juga menunjukkan tanda-tanda "kesadaran" dan "kecerdasan".

Dr. Masaru menggunakan kekuatan air untuk pengobatan dengan menemukan efek gelombang energi yang ia sebut sebagai "HADO" (energi atau kumpulan getaran yang ada pada sebuah benda). Lalu dengan HADO, tersebut, dokter

Masaru bisa mengombinasikan efek energi air untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Pengobatan dengan HADO ini merupakan salah satu cara pengobatan alternatif.

Masaru menjelaskan, banyak peneliti saat ini mulai mempelajari berbagai pengobatan alternatif karena merasakan beberapa kekurangan dalam obat konvensional dari Barat, yang hanya mampu mencapai level sel yang menyebabkan gejala penyakit. Sedangkan, air HADO mampu mengobati penyakit hingga ke dalam partikel sub atom terkecil. Terbukti, beberapa pasien Dr. Masaru yang sembuh setelah minum air HADO.

Air juga mampu membentuk heksagonal

merupakan air yang mampu melunturkan racun-racun pada tubuh manusia. Percobaan terhadap air tidak hanya dilakukan dengan "kata-kata" namun juga melalui musik. Ternyata musik klasik mampu merubah air membentuk kristal yang sangat indah. Sementara itu, musik genre 'heavy metal' justru membentuk air yang tidak baik.

Hal yang berkaitan dengan manfaat air sebagai penyembuhan spiritual juga mengagumkan.

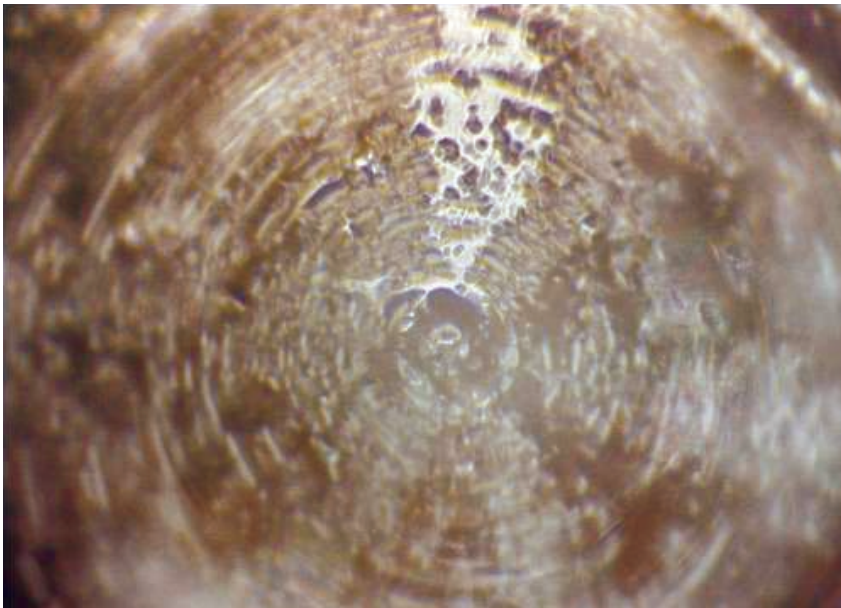
Dari penelitian tersebut, air yang diberikan doa ternyata bisa memberikan kesembuhan kepada penyakit yang berat sekalipun. Ilmu pengetahuan menyatakan, bahwa doa yang dibacakan pada air mampu merubah air



Dr Masaru Emoto



Bentuk air saat dilakukan percobaan dengan musik klasik Beethoven.



Bentuk air saat dilakukan percobaan dengan musik heavy metal.

tersebut menjadi air penyembuh.

Di kesempatan berbeda, dalam teorinya, buku karya Dr Emoto *The Hidden Messages in Water*, menyebutkan, bahwa air berinteraksi dan bereaksi dengan 'kecerdasan' menyesuaikan lingkungan, sekaligus mampu beradaptasi dengan makhluk asing di Planet Bumi. Selanjutnya, hasil dari penelitian Dr Emoto menyisakan pertanyaan bagi kita tentang kehidupan dan bagaimana

kehidupan itu sendiri dimulai di Planet Bumi?

"Penelitian saya terhadap misteri air membuat saya berpikir bahwa air adalah 'sesuatu' yang bukan dari Bumi ini. Mengapa Anda berpikir ada begitu banyak air di Bumi ini? Mayoritas peneliti menjelaskan, bahwa ketika Bumi terbentuk, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, air berubah menjadi uap, menguap dan membentuk hujan yang jatuh di

Bumi, sehingga terjadi penciptaan lautan."

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Louis Frank, ilmuwan dari University of Iowa, Amerika Serikat, yang mengungkapkan asal-usul air di Planet Bumi, di mana dalam bentuk gumpalan es dari luar angkasa.

Kesimpulan itu dilontarkan oleh Profesor Frank dari risetnya, di mana ia baru menyadari bahwa fakta foto-foto satelit menunjukkan bintang hitam. Akhirnya, ia berkesimpulan analisa bintang-bintang hitam dari komet yang jatuh ke Bumi. Teorinya yaitu, bola es menghujani bumi empat puluh miliar tahun yang lalu, sehingga menciptakan laut dan samudera. Dan, fenomena tersebut berlanjut hingga sekarang.

Kemungkinan kajian itu bisa diterima secara universal bahwa tidak akan ada kehidupan tanpa air, dan jika kita menerima bahwa air merupakan sumber dari segala kehidupan, atau berasal dari luar angkasa, maka pemikiran kita akan menyimpulkan bahwa semua unsur kehidupan termasuk manusia adalah makhluk asing (Alien) di Planet Bumi.

Bahkan, pesawat antariksa Amerika Serikat, NASA melaporkan bukti bahwa air mengalir di dalam permukaan Planet Mars. Kita tertantang menjawab pertanyaan, mengapa air berada di permukaan Planet Merah itu, sekaligus mengungkap mengapa manusia ada di Alam Semesta beserta dengan kehidupan 'Extra-Terrestrial' di sekitarnya.

Kembali ke hasil kajian ilmiah Dr. Emoto tentang sifat dari air sebenarnya? Dia mengatakan, saat Anda mengaitkan air di Alam Semesta, maka betapa pentingnya unsur air di dalam kehidupan di Bumi. Dan, cara air berinteraksi dengan manusia dengan cara yang unik, boleh dikatakan air mungkin lebih dari sekedar zat yang ditemukan di ruang angkasa. Itu menunjukkan, bahwa air elemen paling penting dan cerdas di dalam kehidupan Alam Semesta. Ferro Maulana

Ghea Memukau Marakesh

Busana Muslim karya perancang busana terkemuka Indonesia Ghea Panggabean mencuri perhatian masyarakat di Maroko dalam acara peragaan busana memperingati 10 tahun 'Islamic Fashion Festival (IFF)' bertema "One Thousand & One Night" di Balqis a Palais Soleiman, di kota Marrakesh, Maroko.

Hasil karya perancang terkemuka Indonesia Ghea Panggabean mendapat sambutan dari sekitar 200 undangan, menjadi penutup peragaan busana yang dihadiri Raja Pahang dan istri serta para princess dari Malaysia dan Prince Fahd of Pahang dengan menampilkan busana dengan Arabesque.

"Saya senang bisa berpartisipasi dalam peringatan 10 tahun IFF yang

saya ikuti sejak awal terbentuknya 'Islamic Fashion Festival' yang digagas Dato Sri Raja Rezza Shah," ujar Ghea Panggabean, pada Selasa (13/10).

Rancangan busana Ghea Panggabean untuk IFF kali ini terinspirasi dari kecantikan dan magis dari "Kisah 1001 Malam" dan Seni Orientalis yang dituangkan dalam bentuk mozaik dan motif karpet Persia yang diterjemahkan kedalam rancangan busana malam yang elegant dan fashionable.

"Its fantastic, busana Ghea is real collection," ujar Beatrice Paul, Desainer asal Prancis yang pengalaman dalam industri fashion selama lebih dari 40 tahun dan memiliki butik di hotel terkenal dan tertua di dunia, 'La Mamounia' di Marrakesh.. /Ferro Maulana-Ant



Produk Halal Sudah Jadi Tren Global Lifestyle

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Profesor Din Syamsuddin mengemukakan bahwa produk makanan halal dan thoyiban saat ini sudah menjadi global 'lifestyle', bahkan beberapa negara maju pun juga gencar mengampanyekannya.

"Sekarang ini beberapa negara maju sudah mempromosikan produk makanan halal thoyiban, seperti Tiongkok, Korea, Jepang, dan Thailand. Banyaknya negara mulai tertarik dengan produk-produk halal thoyiban itu karena motif ekonomi untuk menjangkau wisatawan muslim untuk berkunjung ke negaranya," kata Din Syamsudin yang disampaikan dalam 'Simposium Nasional Produk Halal Indonesia' di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Sabtu (10/10) malam.

Din mengatakan, selain motif ekonomi, pemerintah Jepang yakin sepenuhnya jika makanan yang halal dan thoyiban akan membawa manfaat bagi masyarakat, sehingga penerapan halal dan thoyib tidak hanya dipahami sebagai ajaran Islam saja, namun sudah menjadi "global lifestyle".

Hanya saja, lanjutnya, justru Indonesia sampai saat ini belum berhasil menerapkan halal dan thoyiban sebagai "lifestyle", karena masih banyak makanan, obat-obatan dan kosmetika di Tanah Air yang masih diragukan kehalalannya. Padahal, penduduk Indonesia mayoritas muslim dan jumlahnya juga yang terbesar di dunia.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia masih belum maksimal mengawasi kehalalan produk makanan. Berbeda dengan Indonesia, Jepang justru jauh lebih peka memikirkan kehalalan makanan. Contohnya, di Kota Fuji, Jepang, yang sudah mendeklarasikan menjadi 'kota halal'.

Walaupun ada motif ekonomi dibalik pendeklarasian kota halal, kata Din, namun ia mengapresiasi



Pemerintah Jepang yang telah lebih dulu membuat standarisasi halal dengan akurat.

“Memang ada motif ekonomi dibalik pendeklarasian Kota Fuji sebagai kota halal, tapi saya salut,” ucapnya.

Ia mengemukakan banyak wisatawan muslim yang berkunjung ke Kota Fuji, sehingga Pemerintah Jepang membuat terobosan menjadikan Kota Fuji menjadi ‘kota halal’.

Seharusnya, kata Din, Indonesia bisa lebih dahulu membuat sistem labelisasi halal dengan benar dan akurat, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Walaupun label halal tertera di banyak produk makanan dan rumah makan, seluruh label halal tersebut belum sepenuhnya teruji kehalalannya.

“Sudah banyak pengelola rumah makan menggunakan label halal, tapi kita belum mengetahui kebenarannya. Pemasangan label halal tidak bisa digunakan seenaknya, butuh pengujian secara ilmiah, karena itu, saya berharap pengurus ICMI yang sedang menggelar Muswil ini dapat merumuskan konsep labelisasi halal yang baik dan akurat, melalui uji produk, sebab halal tidaknya makanan bukan diukur dari labelnya, tapi harus diuji dengan akurat,” tegasnya.

Din juga berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk segera menertibkan label halal tersebut. Selain itu, juga meminta pemerintah untuk melibatkan cendekiawan muslim yang berkompeten untuk terjun langsung ke masyarakat guna mengevaluasi label halal yang sudah beredar. /Ferro Maulana-Ant



Cegah Kekeringan dengan Pendekatan Basis Ekoregion

Pakar hidrologi Universitas Gadjah Mada Agus Maryono menyatakan untuk mencegah kekeringan berulang agar digunakan pendekatan berbasis ekoregion.

“Baik desa maupun kota harus dilihat dalam perspektif sebagai bagian dari daerah aliran sungai (DAS). Sebagai bagian dari DAS, tempat tersebut harus mengelola air hujan dengan konsep tampung, resapkan, alirkan, pelihara,” kata Agus di Jakarta, Kamis (1/10).

Masyarakat di desa, kata dia, harus bisa mengelola air hujan pada musim penghujan. Dengan menangkap dan menanam air hujan, dampak El-Nino bisa dikurangi. Air hujan bisa ditampung melalui tangki, ember atau membuat danau buatan.

“Air ditampung dulu, untuk jadi air bersih, sisanya diresapkan dan dipelihara,” ujar Agus.

Hal yang sama berlaku di kota. Kota harus bisa menangkap air hujan, misalnya di Jakarta, kata dia, 75 persen lahan bangunan beratap. Jika semua warga bisa menampung air hujan, maka bisa ditampung mencapai 600 juta meter kubik dengan asumsi tiap satu hektare lahan, bisa menampung 325 meter kubik.

“Jika kemarau panjang, sangat bermanfaat. Korea, Jepang dan negara lain mulai menerapkan hal ini. Mereka mengembangkan beberapa model bak tampung. Bahkan di Queensland, semua rumah menggunakan air hujan untuk mandi. Mereka punya tangki menangkap air hujan. Jakarta juga harus mulai menerapkan langkah ini,” tuturnya.

Industri, menurut dia juga diimbau menerapkan konsep itu. Hingga air yang masuk ke kota bisa ditanggulangi. Pengelolaan danau dan situ di pemukiman perlu dilakukan.

Tanah yang tidak terpakai bisa untuk membuat danau buatan. Juga harus dipastikan volume air tidak berkurang, meskipun kemarau berkepanjangan.

Masyarakat bisa menanam pohon dan rumput gajah dan perdu di sekeliling danau. Ketika kemarau panjang, meski terjadi penguapan volume air akan tetap terjaga.

“Ini bukan pekerjaan yang sulit. Kampanye harus dilakukan. Saluran drainase bisa dibuat ‘cascade’. Air hujan bisa diresapkan. Masyarakat bisa membuat sumur resapan di rumah sendiri,” jelas dia. /Ferro Maulana-Ant

Geopolitik Lumajang

Hendrajit

Gara-gara terbunuhnya Salim Kancil, kota Lumajang yang berlokasi di Jawa Timur sontak orang mulai tersadar bahwa ada sebuah kota yang punya sejarah, kisah dan khasanah budaya yang kaya dan cukup membanggakan. Selain tanahnya yang subur. Lumajang merupakan bagian dari kabupaten Probolinggo. Berarti, termasuk wilayah Tapal Kuda. Tapal Kuda merupakan wilayah yang meliputi kota-kota pantai Jawa Timur bagian timur yaitu Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, terus membentang menyisir pantai selatan madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, sampai Sumenep.

Karena Lumajang masuk wilayah Tapal Kuda, maka kota ini termasuk wilayah yang cukup strategis sebagai kunci sukses dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah Tapal Kuda. Sekadar info, Lumajang adalah sebuah kota kecil yang terletak disebelah timur kaki gunung Semeru di propinsi Jawa Timur. Lumajang dapat di tempuh dalam waktu sekitar 4 jam dari Surabaya ke arah selatan.

Secara geografis wilayah Lumajang dikelilingi oleh pegunungan vulkanik dengan puncak-puncaknya berupa gunung api aktif. Di sebelah barat ada gunung Semeru yang merupakan gunung berapi aktif dan juga gunung tertinggi di pulau Jawa. Di sebelah utara ada pegunungan Tengger, Bromo yang juga merupakan gunung berapi aktif. Dan juga gunung Lamongan. Letak Lumajang yang diapit oleh pegunungan menyebabkan wilayah Lumajang mempunyai lahan yang subur.

Namun, yang tak kalah menarik adalah geokultural Lumajang sebagai kota kuno yang sudah ada sejak era sebelum kerajaan Majapahit. Bahkan, ada sebuah cerita menarik tentang Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Yaitu tentang pemberian tanah hadiah oleh Raden Wijaya kepada Arya Wiraraja atas jasa-jasanya telah membantu Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang.

Janji Raden Wijaya kepada Arya Wiraraja diceritakan dalam kidung Panji Wijayakrama yang dikutip oleh Slamet Mulyana (2006:122) bahwa Raden Wijaya secara jujur berjanji kepada Wiraraja, jika kelak terkabul maksudnya, dapat menguasai pulau Jawa, sebagai tanda terima kasih, kerajaan akan dibagi menjadi dua antara Raden Wijaya dan Arya Wiraraja, dimana Arya Wiraraja mendapatkan Lamajang Tigang Juru yang meliputi Lamajang, Panarukan, dan Blambangan (Rangkuti,2003:27).

Sesudah Arya Wiraraja meninggal, yang menguasai Lamajang adalah Mpu Nambi. Gara-gara berontak terhadap Majapahit, kekuasaan Mpu Nambi di Lamajang tidak bertahan lama karena kemudian Majapahit di bawah pemerintahan Jayanegara menumpas habis pemberontakan Nambi. Serangan Majapahit tersebut berhasil memporandakan Lamajang. Bahkan pertahanan Mpu Nambi di Pajarakan juga ikut hancur lebur.

Sepertinya, Lumajang punya wibawa spiritual yang cukup kuat sampai-sampai jadi incaran para raja-raja Jawa tempo dulu maupun incaran berbagai kerajaan.

Seperti dituturkan dalam Kitab Negara Kertagama karya Mpu Prapanca, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Lumajang dikunjungi dalam rangka kunjungan kenegaraan. Dikisahkan dalam kitab tersebut, beberapa nama tempat di Lamajang yang disinggahi oleh Hayam Wuruk antara lain, Padhali (Ranubedali), Arenon (Kutorenon), Panggulan, Payaman, Rembang (Tempeh), Kamirahan, Kunir. Menurut Gunadi (1990) ada 8 kota kuno di Lumajang yaitu, Kertosari, Lumajang, Pajarakan, Kandangan, Kunir, Kutorenon, Kertowono dan Pasrujambe.

Tidak saja semasa kekuasaan Majapahit. Di era kerajaan Islam Demak, Lumajang jadi incaran Demak maupun kerajaan Demak maupun Mataram. Sepertinya Lumajang secara geostrategis sangat diperhitungkan sebagai wilayah yang jadi batu loncatan untuk penguasaan daerah-daerah lainnya.

Seperti yang ada dibenak Sultan Agung Mataram, untuk menguasai Blambangan (Banyuwangi), secara geografis Lumajang harus ditaklukkan terlebih dahulu. Begitu Lumajang ditaklukkan oleh Sultan Agung, maka Lumajang jadi pos penyerangan terdepan.

Tapi ya itu tadi. Meski dikenal sebagai kota kuno yang tetap lestari yang kaya akan khasanah budaya dan sejarah, Lumajang seakan tenggelam oleh perkembangan zaman.

Terbunuhnya Salim Kancil dan kisruh pertambangan liar yang sarat berbagai kepentingan para elit politik dan aparat keamanan di daerah, sontak menyadarkan kita bahwa Lumajang mengandung sumberdaya alam yang cukup kaya di bawah permukaan bumi. Punya nilai strategis secara geografis, dan kaya secara geo-kultural.

Di atas itu semua, Lumajang punya sejarah dan cerita. Hikayat Lumajang. ♪

AKTUAL

Berani
Beda
Karena
Benar



INFO & PEMASARAN

- 📞 Dedy 081 20 53 8776
- Ranie 081 38 210 44 69
- Rhiza 081 828 0941 009
- ✉ marketing@aktual.com
- iklan@aktual.com

Ingin Tahu Industri Keuangan? Klik



www.ojk.go.id

OTORITAS JASA KEUANGAN
MENGATUR • MENGAWASI • MELINDUNGI

LAYANAN KONSUMEN
1500 655

OJK OTORITAS
JASA
KEUANGAN